

**POLITIK PEMBANGUNAN DESA WISATA MENUJU  
TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DESA BERDASARKAN UU  
NO. 6 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji,  
Kabupaten Jepara Periode 2016-2022)**

Skripsi

Progam Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**Rizal Eka Ardiyanto**

1906016049

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara :

Nama : Rizal Eka Ardiyanto

NIM : 1906016049

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Pembangunan Desa Wisata Menuju Terwujudnya Kemandirian Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara Periode 2016-2022)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 24 Maret 2023

Pembimbing,



Drs. Nur Syamsudin, M.A

NIP. 196805051995031002

**SKRIPSI**  
**POLITIK PEMBANGUNAN DESA WISATA MENUJU TERWUJUDNYA**  
**KEMANDIRIAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014**  
**(Studi Kasus Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji,**  
**Kabupaten Jepara Periode 2016-2022)**

Disusun Oleh

**Rizal Eka Ardiyanto**

1906016049

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 4 April 2023  
dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Ketua

Dr. Moh. Khasan M.Ag  
NIP. 197412122003121004

Penguji I

Muhammad Mahsun, M.A  
NIP. 19511182016011901

Sekretaris

Drs. Nur Syamsudin, M.A  
NIP. 196805051995031002

Penguji II

Moh. Yamin Darsyah, M.Si  
NIP. 198409092019031007

Pembimbing

Drs. Nur Syamsudin, M.A  
NIP. 196805051995031002

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya Rizal Eka Ardiyanto menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "*Politik Pembangunan Desa Wisata Menuju Terwujudnya Kemandirian Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara Periode 2016-2022)*" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang maupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 Maret 2023

Yang Menyatakan,

Rizal Eka Ardiyanto

NIM. 1906016049

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Penulis ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul *"Politik Pembangunan Desa Wisata Menuju Terwujudnya Kemandirian Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara Periode 2016-2022)"* tanpa suatu halangan apapun. Tidak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya skripsi ini penulis ucapkan Alhamdulillah serta rasa syukur sebanyak-banyaknya karena dalam proses penulisan skripsi ini terdapat satu tantangan besar yang dirasakan oleh penulis yaitu melawan rasa malas. Bagi pembaca yang sedang berjuang mengerjakan penulisan skripsi saran dari penulis tetap semangat dan jangan pernah berputus asa, perjuangan kalian tinggal selangkah lagi serta ada harapan yang harus diwujudkan kedepannya. Penulis juga menyadari dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Di dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Subiyanto serta Ibu Listiyorini yang telah memberikan semangat serta dukungan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu serta menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum yang telah memberikan ilmu, nasehat serta motivasi selama penulis berkuliah disini.
4. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A yang juga selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis ucapkan

banyak terimakasih karena telah memberikan ilmu, arahan, serta motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini.

5. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun, M.A yang telah memberikan ilmu serta dukungan kepada penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini serta sebagai bekal pada kehidupan penulis kedepannya.
7. Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu segala keperluan penulis dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dwi Ganoto selaku Kepala Desa Tanjung Periode 2016-2022 yang telah memberikan segala informasi yang penulis butuhkan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
9. Bapak Hariyanto selaku Kepala Desa Tanjung Periode 2022-2028 yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meminta data yang penulis butuhkan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
10. Bapak Dian Fatur Rohman selaku pengurus BumDes Tanjung yang telah memberikan segala informasi yang penulis butuhkan dari awal pra-riset sampai pada penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
11. Ara Rizka Ardani yang senantiasa memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Segenap narasumber yang telah bersedia memberikan informasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
13. Rekan kamar kos Muhammad Fikri alias Acenk yang selalu kebersamai selama penulis berjuang menyelesaikan pendidikan S1 di FISIP UIN Walisongo Semarang.
14. Sahabat penulis Rifky Ali Aziz, Aji Ali Saputra, M. Faris Balya, Fuad Dhiaulhaq yang telah selalu kebersamai dalam berproses di PMII serta telah membantu dalam memberikan arahan serta motivasi pada penulisan skripsi ini.

15. Rekan FSC Farishi Aditya Sandi, Ganung Ringganing Putra, Galih Rahmat Dhani, Syukron Faiz dkk yang telah selalu kebersamai.
16. Sedulur Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang (KMJS) yang telah menjadi keluarga baru selama menjalani kehidupan di Semarang.
17. Seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik maupun saran sangat penulis butuhkan supaya skripsi ini menjadi skripsi yang berkualitas serta memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis sampaikan terimakasih.

Semarang, 23 Maret 2023

Penulis,

Rizal Eka Ardiyanto

NIM. 1906016049

**PERSEMBAHAN***Bismillahirrahmannirahim*

Dengan segala syukur dipanjatkan kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam serta tidak ada yang mampu menandingi kekuatan serta kekuasaannya

Saya persembahkan karya ini kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Subiyanto dan Ibu Listiyorini yang telah membesarkan serta mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada saya untuk dapat menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Melalui do'a yang senantiasa beliau panjatkan yang akan mengantarkan kepada kesuksesan saya kelak.

**MOTTO**

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha

**~B.J. Habibie**

”Don’t be afraid to make a mistake. But make sure you don’t make the same mistake twice”

(Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan. Tapi pastikan anda tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya)

**~Akio Morita**

## ABSTRAK

Pembangunan dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dari generasi ke generasi. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa, hal tersebut merupakan angin segar bagi desa untuk dapat melakukan arah pembangunannya sendiri serta diberikannya ruang yang begitu besar kepada desa untuk dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki pada setiap wilayahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Tanjung untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di Desa Tanjung untuk menjadi sebuah desa dengan kawasan wisata yang dapat memberi dampak positif dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat Desa Tanjung. Selain itu, dalam pembangunan Desa Wisata Tanjung hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung untuk mewujudkan Desa Tanjung sebagai desa mandiri. Maka fokus dari penelitian ini adalah mengetahui landasan politik dan yuridis dari pembangunan desa wisata di Desa Tanjung, proses pembangunan desa wisata di Desa Tanjung serta dampak pembangunan desa wisata terhadap kemandirian desa di Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori *integrated rural development* dan *governability*. Teori *integrated rural development* digunakan melihat bagaimana pembangunan yang dilakukan untuk mentransformasikan desa menjadi desa wisata. Sedangkan *governability* digunakan untuk melihat mengenai peran aktor dalam mewujudkan pembangunan desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan studi kasus untuk menarasikan fenomena yang penulis temukan di lapangan. Kemudian data lapangan diperoleh dengan melakukan observasi lapangan yang dilanjutkan dengan proses wawancara, dokumentasi, serta studi literatur dari penelitian terkait sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan berangkat dari hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, hal tersebut yang memicu pemerintah Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara untuk melakukan pembangunan pada sektor pariwisata. Terdapat beberapa aktor utama dalam pembangunan desa wisata Tanjung yaitu Pemerintah Desa Tanjung, Pokdarwis Desa Tanjung, masyarakat desa Tanjung, serta investor. Kemudian dampak dari hadirnya desa Tanjung sebagai desa wisata tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga perlu inovasi lebih lanjut. Untuk mewujudkan desa Tanjung sebagai desa mandiri tidak dapat hanya dilakukan dengan melakukan pembangunan pada sektor pariwisata saja, hal tersebut harus ditopang dengan melakukan pembangunan pada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial lainnya.

**Kata Kunci: Pemerintah Desa, Politik Pembangunan, Desa Wisata, Desa Mandiri**

### **ABSTRACT**

*Development is carried out as an effort to realize a better quality of life for the community from generation to generation. With the presence of Law no. 06 of 2014 concerning villages, this is a breath of fresh air for villages to be able to carry out their own development directions and to give villages so much space to be able to develop all their potential in each region in order to improve the welfare of their people. This is utilized by the Tanjung Village government to take advantage of the natural potential that exists in Tanjung Village to become a village with a tourist area that can have a positive impact in order to improve the economy of the Tanjung Village community. In addition, in the development of the Tanjung Tourism Village this is one of the efforts made by the Tanjung Village government to realize Tanjung Village as an independent village. So the focus of this research is to find out the political and juridical basis of the development of a tourist village in Tanjung Village, the process of developing a tourism village in Tanjung Village and the impact of tourism village development on village independence in Tanjung Village, Pakis Aji District, Jepara Regency.*

*The analysis in this study uses the theory of integrated rural development and governability. The theory of integrated rural development is used to see how development is carried out to transform villages into tourist villages. Meanwhile, governability is used to look at the role of actors in realizing the development of tourist villages. This study uses qualitative research methods and uses a case study approach to narrate the phenomena that the authors found in the field. Then field data was obtained by conducting field observations followed by interviews, documentation, and literature studies from previous related studies.*

*The results of this study indicate that departing from the presence of Law no. 6 of 2014 concerning villages, this is what triggered the Tanjung Village government, Pakis Aji District, Jepara Regency to carry out development in the tourism sector. There are several main actors in the development of the Tanjung tourism village, namely the Tanjung Village Government, the Tanjung Village Pokdarwis, the Tanjung village community, and investors. Then the impact of the presence of Tanjung village as a tourist village cannot be felt by the whole community so that further innovation is needed. To realize Tanjung village as an independent village cannot only be done by carrying out development in the tourism sector alone, this must be supported by carrying out development in other sectors such as education, health and other social services.*

**Keywords: Village Government, Development Politics, Tourism Village, Independent Village**

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
E. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
1. Politik Pembangunan Desa Wisata .....	8
2. Peran Pemerintah Desa Mewujudkan Desa Mandiri .....	11
F. METODE PENELITIAN.....	13
1) Jenis dan Pendekatan .....	13
2) Sumber dan Jenis Data.....	14
3) Teknik Pengumpulan Data.....	14
4) Analisis Data.....	15
<b>BAB II INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT DAN GOVERNABILITY .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB III PROFIL DESA TANJUNG KEC. PAKIS AJI KAB. JEPARA .....</b>	<b>18</b>
A. Profil Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara .....	18
1. Letak Geografis Desa Tanjung .....	18
2. Data Kependudukan dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung .....	40

3. Visi dan Misi Desa Tanjung.....	43
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung .....	44
B. Potensi Desa Wisata di Desa Tanjung .....	45
<b>BAB IV LANDASAN POLITIK DAN HUKUM PEMBANGUNAN DESA WISATA TANJUNG .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB V PROSES PEMBANGUNAN DESA WISATA TANJUNG .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB VI DAMPAK PEMBANGUNAN DESA WISATA TERHADAP KEMANDIRIAN DESA TANJUNG .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Batas Desa Tanjung .....	18
Tabel 3. 2 Pembagian RW dan RT Desa Tanjung .....	32
Tabel 3. 3 Pemanfaatan Wilayah Desa Tanjung .....	32
Tabel 3. 4 Topografi Akses Masyarakat Desa Tanjung .....	40
Tabel 3. 5 Kelompok Usia Masyarakat Desa Tanjung .....	41
Tabel 3. 6 Rincian Profesi Masyarakat Desa Tanjung .....	41
Tabel 3. 7 Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung .....	42
Tabel 3. 8 Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Tanjung .....	42
Tabel 3. 9 Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Tanjung .....	43
Tabel 4. 1 Perbedaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014.....	53

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung .....	44
Gambar 3. 2 Wisata Kali Bening .....	32
Gambar 3. 3 Wisata Bukit Tanjung .....	32
Gambar 3. 4 Wisata Air Terjun Jurang Nganten.....	32
Gambar 3. 5 Wisata Watu Lawang .....	50
Gambar 3. 6 Kolam Renang Wisata Watu Lawang .....	51
Gambar 4. 1 Berita Acara Rapat RPJMDes Desa Tanjung Tahun 2017-2022 .....	61
Gambar 5. 1 Penyebaran Benih Ikan Tawar di Sungai .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Menurut Mahayanti Fitriandari dan Winata (2021) pembangunan diartikan sebagai suatu upaya perbaikan yang dilakukan sekarang atas kondisi terkini agar dapat tercipta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya dalam konteks masa depan yang lebih gemilang. Secara singkatnya pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju arah yang lebih baik dari generasi ke generasi. Pembangunan tidak terlahir secara alamiah, tetapi pembangunan merupakan hasil dari proses politik yang dilakukan oleh para aktor politik yang di dalamnya penuh dengan intrik, kepentingan, serta perjuangan yang memiliki implikasi politik. Politik pembangunan tidak hanya menganalisis mengenai latar belakang pembangunan, tetapi juga menganalisis mengenai proses-proses yang terjadi dalam sebuah pembangunan, aktor yang terlibat di dalamnya, serta ide atau gagasan yang dikembangkan dalam pembangunan (Warjio, 2016). Kemudian pembangunan dalam konteks politik pembangunan dapat diartikan sebagai proses politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun jejaring atau membangun komunikasi dengan pemerintah di atasnya untuk mewujudkan suatu pembangunan.

Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada intinya desa merupakan suatu wilayah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh pemerintahannya sendiri berdasarkan kewenangan untuk mengatur serta merumuskan kebijakannya sendiri. Dengan hadirnya UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa hal tersebut merupakan angin segar bagi desa untuk dapat berbenah dengan mewujudkan menjadi desa yang mandiri.

Berdasarkan pada Permendes No 2 Tahun 2016 desa mandiri atau desa sembada merupakan desa maju yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan desa demi peningkatan kualitas hidup serta kehidupan sebesar-besarnya demi

terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ekonomi, serta ekologi secara berkelanjutan. Kemudian menurut Lisnawati (2019) desa mandiri yaitu suatu desa independent yang berhasil mengelola sumber daya alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna dengan pemanfaatan sumber daya manusia. Desa mandiri mampu mengolah potensi alam desanya menjadi sesuatu yang dapat menjadi ciri khas dari desa tersebut serta mengemasnya dalam suatu produk yang kompetitif sehingga dapat menambah nilai jual. Dari hal tersebut maka akan terciptanya roda perekonomian pada desa itu sendiri. Dalam mewujudkannya, maka kontribusi dari masyarakat serta pemerintah desa sangat diperlukan.

Tugas pemerintah desa tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) yakni tugas kepala desa sebagai penyelenggara dalam pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentu desa diberikan ruang yang begitu besar untuk dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki pada setiap wilayahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan salah satu tugas pemerintah desa di atas yaitu melaksanakan pembangunan, maka dalam melakukan pengembangan potensi desa dapat dilakukan melalui pembangunan. Salah satu aspek yang perlu dibangun dalam rangka mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat adalah dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang tersedia untuk kemudian dijadikan sebuah sarana baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ahkam, 2018). Salah satu pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki nilai ekonomi adalah dengan cara melakukan pengembangan pada sektor pariwisata.

Pariwisata adalah bentuk kebijakan pembangunan nasional dengan tujuan agar dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah dengan memanfaatkan kekayaan lokal yang bertujuan untuk dapat memperluas kesempatan kerja (Marlina, 2019). Menurut Wardoyo dan Bahtarudin (2003) dalam jurnal Marlina (2019, p. 18) pariwisata mempunyai tiga peranan penting dalam sebuah pembangunan, diantaranya yaitu, dari sisi ekonomi pariwisata mampu sebagai penyelamat perekonomian, dari sisi sosial pariwisata dijadikan sebagai alternatif untuk dapat membuka lapangan pekerjaan serta dapat menyerap tenaga kerja setempat, dan dari segi kebudayaan pariwisata sebagai wadah dalam eksistensi serta perkembangan budaya lokal yang ada di Indonesia. Suatu desa yang memiliki keunggulan potensi alam dengan kondisi pemerintah dan masyarakat yang aktif, kritis, serta inovatif

pastinya tidak akan mengabaikan peluang itu untuk mengelola potensi desanya kemudian mendeklarasikan diri sebagai desa wisata.

Desa wisata merupakan sebuah area pedesaan yang memberikan segala suasana yang mencerminkan kemurnian dari desa dengan pemanfaatan segala potensi yang ada pada suatu desa. Menurut Nuryanti (Kemenpar) dalam jurnal Ira (2020, p. 125) desa wisata merupakan sebuah daerah yang memiliki tujuan wisata diantaranya merupakan gabungan dari daya tarik wisata, amenities, akomodasi, dan aksesibilitas yang dikemas dalam suatu kajian struktur kehidupan masyarakat sesuai dengan aturan dan tradisi yang berlaku. Desa wisata tidak akan berdiri tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Dalam hal ini tentu peran dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai perwakilan dari masyarakat harus dapat berperan aktif dalam berbagai hal untuk menghindari berbagai dampak negatif pada lingkungan serta ekosistem desa. Sehingga berbagai dampak positif dengan hadirnya desa wisata akan dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Karena itu, pentingnya peran pemerintah desa dalam melakukan politik pembangunan pada sektor pariwisata sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan desa mandiri juga menarik beberapa peneliti lain untuk melakukan kajian. Seperti studi Nupus (2019) yang mengkaji mengenai proses pengembangan desa wisata serta fokus pada faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan desa wisata. Studi lain dilakukan oleh Hidayat (2020) yang menganalisis mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata serta dampak dari pengembangan potensi wisata. Kemudian studi Prameswari (2021) membahas mengenai pengembangan desa wisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat, strategi pemerintah dalam mengembangkan desa wisata, dan faktor penghambat pengembangan desa wisata.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Desa Tanjung merupakan salah satu desa di Kabupaten Jepara yang terletak dengan ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.731 Ha (Tanjung, 2022). Sejak Bapak Dwi Ganoto, S. H menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung pada 19 Desember 2016, beliau langsung melakukan gebrakan dengan mengembangkan empat wisata di Desa Tanjung diantaranya yaitu wisata Kali Bening, Watu Lawang, Air Terjun Jurang Nganten, serta Bukit Tanjung. Kemudian pada tahun 2018 Desa Tanjung mendapatkan SK Desa Wisata dari Bupati Jepara Bapak K.H. Ahmad Marzuqi, S. E. Setelah diresmikannya Desa Tanjung menjadi desa wisata melalui SK

Bupati Jepara No. 59 Tahun 2018, Pemerintah Desa Tanjung kemudian melakukan program pengembangan diantaranya yaitu memberi bantuan sarana dan prasarana, melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait kepariwisataan seperti pelatihan *tour guide*, pelatihan manajemen pariwisata, serta pelatihan pengembangan wahana baru. Pembangunan desa wisata memiliki tujuan dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengembangkan potensi daerah serta menanggulangi rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2018 pasal 4, misi pembangunan pariwisata Kabupaten Jepara yaitu:

- a. Meningkatkan PAD melalui perwujudan pariwisata.
- b. Pariwisata sebagai sarana pembangunan ekonomi masyarakat dengan melibatkan peran serta seluruh masyarakat desa.
- c. Meningkatkan kualitas produk wisata diiringi dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan perkembangan IPTEK sehingga mampu bersaing.
- d. Melakukan pengembangan pariwisata dengan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya buatan, serta kerajinan sebagai daya tarik wisata dengan tidak mengabaikan kelestarian dan keberlanjutannya.

Berdasarkan perda tersebut sangat terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki harapan dalam pembangunan pariwisata melalui misi atau tahapan dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Jepara diantaranya yaitu pariwisata sebagai sarana dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, menciptakan SDM yang mampu bersaing, serta tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan SDA. Maka sesuai misi atau tahapan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2018 pasal 4, Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki harapan untuk mewujudkan suatu daerah atau desa mandiri melalui kepariwisataan. Karena berdasarkan pada Permendes No 2 Tahun 2016 indikator dalam desa mandiri yaitu mencakup ketahanan sosial, ekonomi, serta ekologi secara berkelanjutan.

Pada awal masa kepemimpinan Bapak Dwi Ganoto Desa Tanjung tergolong cukup tenggelam dan kurang dikenal oleh masyarakat dari daerah lain. Pada masa awal merintis wisata Kali Bening warga setempat bersikap acuh dan cenderung kurang peduli. Pemerintah Desa Tanjung berkontribusi dalam hal menumbuhkan kesadaran masyarakat

untuk bergotong royong. Dua RT yang berada di Dukuh Ngrebu khususnya yang berada di wilayah Kali Bening digerakkan oleh pemerintah desa untuk melakukan bersih-bersih sungai sepanjang Kali Bening serta melakukan reboisasi di pinggiran sungai. Lokasi Kali Bening yang berada di wilayah pegunungan dengan dikelilingi oleh sawah serta pepohonan yang rimbun. Kali Bening yang pada mulanya hanya sungai serta kubangan air kini berubah menjadi tempat wisata dengan konsep kolam renang alami yang menawarkan keindahan alam serta keasriannya. Kemudian wisata Watu Lawang, wisata Watu Lawang pada mulanya hanya dua bongkahan batu besar yang berada pada dua sisi sehingga menyerupai pintu atau masyarakat Jawa biasa menyebutnya dengan “lawang” serta ada satu lagi bongkahan batu yang merupakan punden sesepuh desa. Wisata watu lawang berada pada perbukitan dengan pemandangan sawah serta pepohonan yang rimbun. Pemerintah Desa Tanjung bersama masyarakat setempat kemudian bergotong royong untuk membersihkan kemudian membangun spot foto pada lokasi tersebut sehingga wisata tersebut ramai dikunjungi warga untuk berswafoto serta menikmati pemandangan dengan nuansa pedesaan yang masih alami. Selanjutnya ada Wisata Air Terjun Jurang Nganten. Wisata Air Terjun Jurang Nganten terletak cukup jauh dari pemukiman warga serta akses agar dapat sampai ke lokasi cukup sulit karena kondisi jalanan yang terbuat dari bebatuan alami sehingga pada musim hujan tiba akses menuju wisata air terjun tidak bisa dilewati karena kondisi jalan yang licin. Kemudian pada kepemimpinan Bapak Dwi Ganoto, beliau melakukan pembangunan jalan dengan pengaspalan jalan menuju lokasi Wisata Air Terjun Jurang Nganten. Hal tersebut tentu dapat memudahkan wisatawan untuk menuju lokasi sehingga wisata tersebut sampai sekarang masih ramai dikunjungi. Serta wisata yang terakhir yaitu wisata Bukit Tanjung.

Wisata Bukit Tanjung pada mulanya hanya sebuah lahan yang berada pada perbukitan. Kemudian pemerintah desa bersama warga setempat melakukan gotong royong untuk membersihkan lahan tersebut hingga sampai saat ini wisata Bukit Tanjung menawarkan keindahan alam dengan berbagai fasilitas diantaranya yaitu spot foto, taman bunga, gazebo, gardu pandang, jembatan bambu, kolam renang anak dan dewasa, serta dilengkapi dengan mini resto untuk memberi kenyamanan kepada wisatawan saat berkunjung. Akses jalan menuju lokasi juga tergolong cukup mudah karena jalanan mulus dengan kondisi sudah beraspal tentu akan menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

Pemanfaatan potensi alam yang ada pada Desa Tanjung tentu tidak terlepas dari peran pemerintah desa setempat. Peran Pemerintah Desa Tanjung dalam mengembangkan wisata

dapat dilihat dari beberapa kontribusi yang diberikan diantaranya yaitu sebagai penyedia infrastruktur untuk obyek wisata yang baru dirintis maupun dikembangkan, kemudian kolaborasi dengan *stakeholder* seperti POKDARWIS, BUMDes, serta masyarakat setempat yang memiliki aset, kemudian pola pemasaran agar dapat dikenal oleh masyarakat luas, serta pendanaan. Berdirinya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) tentu tidak terlepas dari peran pemerintah desa.

Oleh karena itu, penting kiranya mengkaji mengenai bagaimana politik pembangunan desa wisata dilakukan di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Kajian mengenai politik pembangunan dalam penelitian ini akan berfokus untuk memahami realitas politik dalam pembangunan. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana cara pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pembangunan desa wisata. Dalam konteks ini akan dilakukan fokus kajian terhadap landasan pemerintah desa Tanjung untuk melaksanakan pembangunan desa wisata baik secara politis maupun yuridis. Selain itu dalam penelitian ini juga akan mengkaji mengenai proses pembangunan desa wisata yang dilakukan yang di dalamnya juga akan mengkaji mengenai aktor yang terlibat, strategi dalam pembangunan, serta hasil yang didapat dari pembangunan tersebut.

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga akan mengkaji mengenai dampak dari pembangunan desa wisata terhadap upaya dalam mewujudkan desa mandiri. Untuk mewujudkan suatu desa menjadi desa mandiri berdasarkan Permendes No. 2 Tahun 2016 dalam Indeks Desa Membangun terdapat tiga indikator utama yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, serta ketahanan ekologi. Kajian dalam penelitian ini menarik untuk diteliti karena akan mengkaji mengenai dampak dari pembangunan desa wisata sebagai upaya dalam memenuhi ketiga indikator untuk mewujudkan desa mandiri.

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat diketahui mengenai proses pembangunan desa wisata Tanjung Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara pada tahun 2016-2022. Selain itu penelitian ini juga akan memberikan kajian mengenai landasan politik dan yuridis dari pembangunan desa wisata Tanjung serta dampak dari pembangunan desa wisata dalam rangka mewujudkan desa mandiri. Untuk dapat mengkaji mengenai problematika tersebut, peneliti mengambil judul "Politik Pembangunan Desa Wisata Menuju Terwujudnya

Kemandirian Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara Periode 2016-2022)”.  
 Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara Periode 2016-2022)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas adalah:

1. Apa landasan politik dan yuridis dari pembangunan desa wisata di Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana proses pembangunan desa wisata di Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana dampak pembangunan desa wisata terhadap kemandirian desa di Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui landasan politik dan yuridis dari pembangunan desa wisata di Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui proses pembangunan desa wisata di Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui dampak pembangunan desa wisata terhadap kemandirian desa di Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian yang dapat berguna untuk pembaca, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan secara teoritis, baik sebagai sumbangsih terhadap dunia pendidikan khususnya FISIP UIN Walisongo Semarang maupun sebagai pandangan pemerintah desa dalam mengelola potensi alamnya guna memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah desa agar dapat memanfaatkan potensi alam yang ada pada desanya untuk dijadikan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakatnya.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini guna menghindari adanya kesamaan dalam objek, variabel, ataupun hal lain yang dapat mempengaruhi originalitas dari penelitian penulis. Kajian pustaka dari penelitian terdahulu memberikan wawasan terhadap penulis mengenai realitas yang berkaitan dengan topik pembahasan ini dan dapat dibuktikan dengan data empiris.

### 1. Politik Pembangunan Desa Wisata

Penelitian yang relevan dari topik pembangunan desa wisata adalah studi jurnal dari Hidayat (2020) dalam judul *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya* menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil pembahasan penelitian tersebut adalah dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi awal mula dari keberadaan desa sebagai *pioneer* pembangunan dimana peran pemerintah desa terutama kepala desa menjadi salah satu faktor penentu berhasilnya sebuah desa menjadi mandiri baik dari segi ekonomi, sosial maupun kualitas sumber daya. Dari penelitian tersebut, peran kepala desa yaitu sebagai inovator, modernisator dan pelopor. Peran selaku inovator, Pemerintah Desa Raksabaya belum secara nyata menjadi *role model* dalam pembaruan kehidupan yang dapat menjadi inspirasi oleh masyarakat. Peran sebagai modernisator yaitu melakukan digitalisasi pelayanan, membangun *e-governance* dan pengelolaan sumber daya desa menuju cara kehidupan modern. Peran selaku pelopor, Pemerintah Desa Raksabaya belum menyusun konsep pembangunan desa berbasis kewilayahan secara rapi. Selain itu, terdapat beberapa faktor pendukung seperti dukungan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten sebagai landasan mengembangkan potensi desa, kewenangan desa dalam alokasi anggaran dan pengembangan potensi wisata diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Faktor penghambat seperti rendahnya partisipasi masyarakat untuk aktif dalam pengembangan wisata, daya dukung infrastruktur yang masih rendah dan belum melakukan kegiatan sosialisasi secara sistematis dari Pemerintah Desa Raksabaya.

Penelitian selanjutnya yang relevan adalah studi jurnal dari Habibi (2022) dalam judul *Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Fokus pembahasan dalam jurnal tersebut yaitu keberhasilan dari sinergi antara pemerintah desa melalui eksplorasi potensi dan masyarakat sebagai fasilitator, implementor maupun akselerator dalam

pengembangan desa wisata di Desa Semen Kabupaten Blitar yaitu sebagai Kawasan Wisata Ekologis (KWE) Puspa Jagad. Keberhasilan itu meliputi pembangunan fisik seperti sarana atau prasarana dan pembangunan sumber daya seperti pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak kesejahteraan masyarakat meliputi penghasilan, pemukiman yang layak, tingkat pendidikan serta terpenuhinya akses kesehatan.

Penelitian lain yang dapat dijadikan referensi adalah studi jurnal dari Istiyanti (2020) dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening*. Penelitian tersebut berfokus pada mengkaji proses pemberdayaan masyarakat desa melalui program sosialisasi dan pelatihan masyarakat serta hasil dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi beberapa kegiatan yaitu kegiatan kebudayaan yang dikelola oleh tim Sarapala, industri sepatu dan sandal, budidaya edamame dan peternakan kelinci. Sosialisasi yang telah diterapkan yaitu terkait air dan kesehatan, pemasaran, pelatihan pembuatan biodiesel, pembuatan sabun dari minyak jelantah dan melakukan inventarisasi potensi desa untuk perencanaan tata ruang desa yang dapat dimanfaatkan untuk destinasi wisata. Pengembangan yang telah dilakukan mempunyai dampak terhadap ketahanan budaya seperti menguatnya budaya terkhusus adalah budaya panahan dan perubahan pada tata nilai lingkungan dan sosial.

Penelitian selanjutnya adalah studi jurnal dari Fahira (2022) dengan judul *Peran Pemerintah Desa Purworejo dalam Pengembangan Wisata Alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri*. Fokus penelitian tersebut adalah peran pemerintah desa sebagai motivator, sebagai fasilitator dan sebagai dinamisator. Peran sebagai motivator seperti memberikan sosialisasi terkait pariwisata untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Purworejo dalam mengelola potensi wisata, memberikan pelatihan kepada UMKM hingga melakukan kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menaungi UMKM serta melakukan studi banding agar tercipta ide baru sebagai referensi meningkatkan kualitas wisata. Peran sebagai fasilitator seperti penyedia fasilitas wisata seperti gazebo, lahan parkir, tempat ibadah, kamar mandi serta kolam renang yang dapat menarik wisatawan, sebagai penyedia dana dan promosi wisata dengan menyediakan tempat untuk rapat atau pertemuan dengan instansi lain. Peran sebagai dinamisator seperti melakukan kerja sama dengan masyarakat dan organisasi pemerintah dalam pengembangan wisata alam. Faktor pendukung dalam pengembangan Wisata Alam Sumber Complang yaitu adanya potensi wisata yang indah, aksesibilitas, keamanan dan dukungan masyarakat. Faktor penghambat dalam pengembangan wisata alam seperti sumber daya manusia, faktor kebersihan, kurangnya promosi dan kurangnya

relasi investor serta menjelaskan upaya untuk mengatasi penghambat melalui program pelatihan, mencari investor dan memperbaiki media promosi.

Penelitian lainnya adalah studi jurnal dari Masitah (2019) dengan judul *Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran* dengan pembahasan dari hasil penelitian yaitu Masitah menilai bahwa Pemerintah Desa Babakan belum melaksanakan dengan baik terkait pengembangan desa wisata. Penilaian itu berdasarkan hambatan-hambatan pengembangan desa wisata seperti kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, kurangnya anggaran untuk promosi melalui media sosial, kurangnya kreativitas dan kesiapan masyarakat untuk mengelola sumber daya sehingga masih terdapat beberapa fasilitas yang telah dibangun namun belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Babakan telah menerapkan beberapa upaya-upaya dalam mengembangkan desa wisata dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, melibatkan masyarakat untuk ikut musyawarah dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa wisata, memberikan dukungan anggaran yang memadai serta mengadakan pelatihan untuk masyarakat guna meningkatkan kemampuan pengrajin di Desa Babakan sehingga dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatannya.

Penelitian selanjutnya ditulis dalam studi jurnal dari Sari (2021) berjudul *Potensi Lokal dan Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang*. Pembahasan dari penelitian tersebut yaitu peran BUMDes sebagai lembaga dari pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata Desa Pujon yang didukung dengan bantuan dana dari Kementerian Desa lewat Pemda untuk pemberdayaan masyarakat bersumber dari dana desa. Desa Pujon atraksi utamanya adalah dengan adanya kafe sawah yang dilengkapi dengan beragam atraksi seperti pendopo, gazebo yang berada di tengah sawah, berbagai wahana *fun adventure* (area *off-road*, panahan, *outbound*) serta membuka lapangan pekerjaan lain seperti penjaga parkir, penjaga tiket, petugas kebersihan dan membuka stan makanan yang berhasil mengurangi angka pengangguran, menambah pendapatan masyarakat sekitar, dan juga pendapatan BUMDes.

Referensi penelitian lain adalah studi jurnal dari Larasati (2019) yang berjudul *Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang*. Fokus topik penelitian tersebut adalah peran pemerintah Desa Bendosari untuk mengelola wisata

hutan pinus dengan melakukan sosialisasi, pembentukan POKDARWIS, promosi pariwisata di media sosial, melaksanakan perencanaan pembangunan pariwisata dan mengadakan studi banding ke desa wisata yang lain. Kemudian membahas terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peran pemerintah desa seperti keadaan alamnya yang terpengaruh ketika sedang musim hujan serta kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk ikut mengelola wisata tersebut sehingga perlu pelatihan serta pendampingan intensif dari Pemerintah Desa Bendosari.

## **2. Peran Pemerintah Desa Mewujudkan Desa Mandiri**

Penelitian yang relevan dengan topik ini telah dilakukan oleh Rachmawati (2020) dalam studi pustaka skripsi yang berjudul *Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMDes Sinar Mulya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mulyosari*. Dalam penelitian tersebut membahas terkait strategi yang diterapkan oleh BUMDes Sinar Mulya untuk mengembangkan desa mandiri dengan melakukan penambahan unit usaha BUMDes, menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa, masyarakat desa dan bermitra dengan beberapa pihak. Dengan strategi yang telah diterapkan oleh BUMDes Sinar Mulya memberikan dampak positif seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan peternak sapi perah mendapatkan konsumen.

Penelitian selanjutnya yaitu studi pustaka tesis oleh Tristantono (2022) yang berjudul *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban)*. Fokus penelitian tersebut adalah membahas terkait partisipasi politik oleh masyarakat Desa Sambonggede terdiri dari empat macam kegiatan yaitu partisipasi dalam melakukan pengambilan keputusan ketika ada musyawarah, partisipasi dalam melaksanakan kegiatan atau program dari Pemerintah Desa Sambonggede yang dinilai berjalan baik, partisipasi dalam melakukan tinjauan dan evaluasi pembangunan oleh Pemerintah Desa Sambonggede dengan cara mendatangi langsung kantor desa atau melalui grup media sosial pemerintah desa, serta partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan atau infrastruktur yang telah disediakan agar dapat memberikan dampak untuk peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sambonggede.

Penelitian lain yaitu studi pustaka skripsi oleh Nugraha (2019) yang berjudul *Perbandingan Keberhasilan Implementasi Program Desa Mandiri Pangan Desa Pulosari dan Desa Batusari Kabupaten Pemalang*. Hasil dari pembahasan penelitian tersebut adalah Desa Pulosari telah berhasil memenuhi indikator program desa mandiri

pangan yang telah direalisasikan seperti terdapat lumbung pangan desa, terdapat dua kelompok afinitas dan lembaga keuangan desa yang berjalan baik dengan pembagian tugas yang jelas serta menjalin komunikasi dengan kepala desa sehingga memperlancar jalannya program. Sementara Desa Batusari dinilai belum berhasil untuk memenuhi indikator program desa mandiri pangan dikarenakan kelompok afinitas yang tidak aktif, belum terdapat lembaga keuangan desa, sumber daya manusia dan sumber dana serta sarana prasarana belum memadai, dan juga pemerintah desa tidak mendukung dalam menjalankan program desa mandiri pangan.

Penelitian selanjutnya yaitu studi pustaka jurnal oleh Hasyim (2019) dengan judul *Peningkatan Kemandirian Desa Panggungharjo Melalui Komunikasi Pembangunan*. Hasil dari penelitian tersebut adalah berawal dari dilantiknya kepala desa Wahyudi yang memiliki kekuatan kepemimpinan lokal dan kejujuran untuk melakukan pendekatan personal dengan masyarakat berhasil membawa Desa Panggungharjo menjadi suatu desa wisata. Desa Panggungharjo dapat mencapai sebuah prestasi membanggakan yaitu berhasil memperoleh penghargaan tingkat nasional sebagai desa mandiri dan lestari. Pada awal pendirian desa mandiri masih ada masyarakat yang kurang optimis dengan potensi desa sehingga menjadi suatu tantangan bagi kepala desa. Beberapa program pembangunan bisnis tersentral dengan baik dengan pengelolaan dari BUMDes seperti program KUPAS (program pengelolaan sampah) yang berhasil membuka lapangan kerja untuk masyarakat, menciptakan bahan kerajinan dari daur ulang sampah yang bernilai ekonomis hingga dapat membuka program lain yaitu mendirikan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Program KUPAS dinilai berhasil karena dapat dirasakan kebermanfaatannya untuk masyarakat dari ekonomi, Pendidikan, hingga lingkungan. Program lainnya yaitu Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dengan layanan kesehatan meliputi biaya konsultasi dan pemeriksaan medis, layanan luar gedung, perawatan di rumah oleh Perawat Desa, pemeriksaan kehamilan selama tujuh kali, persalinan normal, dua kali pemeriksaan nifas dan lima imunisasi lengkap ditujukan untuk bayi. Program JPS dalam layanan pendidikan meliputi layanan beasiswa pendidikan, layanan asuransi pendidikan dengan premi dibayar oleh JPS, beasiswa kuliah gratis dan bantuan Pendidikan tunai. Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan oleh Hasyim, diharapkan desa lain dapat menjadikan keberhasilan Desa Panggungharjo sebagai motivasi untuk kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya komunikasi aktif dan sinergi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat tidak mungkin program pemberdayaan, pelayanan sosial dan pembangunan ekonomi dapat berjalan baik, efektif dan efisien.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian lain yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis lebih terfokus pada praktik politik pembangunan desa wisata serta peran pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri melalui program desa wisata dengan studi kasus yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara dengan melakukan pembaruan ilmu yang relevan dengan kondisi masyarakat terkini.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1) Jenis dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Denzin dan Lincoln (2011, p. 3) dalam Creswell (2015), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang terdiri dari serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia menjadi terlihat. Serangkaian representasi yang digunakan untuk memperlihatkan bukti penelitian mencakup berbagai catatan pribadi, lapangan, rekaman hasil wawancara dengan narasumber serta foto untuk keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini penelitian kualitatif memiliki suatu pendekatan penafsiran yang apa adanya terlihat. Para peneliti yang menggunakan metode kualitatif ini mempelajari atas benda pada lingkungan alamiahnya, memaknai atau mendeskripsikan fenomena dengan sudut pandang peneliti serta masyarakat menerima makna dari mereka.

Menurut Erickson (1968) dalam buku Anggito (2018, p. 7) penelitian kualitatif memiliki pengertian sebagai penelitian dengan tujuan untuk menemukan dan memberikan gambaran terperinci dengan bentuk narasi terkait kegiatan yang dilakukan beserta dengan dampak terhadap kehidupan mereka. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau secara fakta serta dalam proses pelaporannya harus memperhatikan interpretasi ilmiah (Fadli, 2021).

Selanjutnya, dalam penelitian ini pendekatan penelitian secara studi kasus dipilih karena akan mendukung jenis penelitian kualitatif. Prosedur utama dalam pendekatan studi kasus, yaitu *sampling purposeful* yang digunakan untuk menentukan kejadian yang dianggap penting kemudian dilanjutkan dengan *analisis holistik* atas kasus tersebut melalui deskripsi yang mendetail terkait konteks, pola serta *setting* dimana kasus tersebut terjadi (Creswell, 2015).

## 2) Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah sesuatu darimana informasi didapatkan. Data yang dihasilkan merupakan data primer. Sumber informasi pendukung serta tambahan disebut data sekunder.

### a) Data Primer

Data primer merupakan informasi dari sumber utama informasi (informan), yaitu pemerintah Desa Tanjung sebagai penyelenggara pembangunan desa, masyarakat desa sebagai pendukung penyelenggara pembangunan desa, serta catatan lapangan dikaitkan dengan rumusan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan siapa yang menguasai informasi, siapa yang memiliki informasi, dan siapa yang mau memberikan informasi.

### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dihasilkan melalui orang lain yang tidak dihasilkan secara langsung dari data primer. Informasi yang dihasilkan dari sumber kedua disediakan oleh pengumpul data. Hasil dari sumber kedua guna mendukung data primer seperti buku, resensi, literatur, foto, kajian atau sumber yang lain yang serupa dengan pembangunan desa.

## 3) Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan untuk memecahkan masalah, teknik berikut yang diterapkan adalah:

### a) Wawancara

Dalam wawancara penelitian ini peneliti melakukan sesi tanya jawab bersama masyarakat atau pihak yang dekat dengan masalah untuk berdiskusi menggunakan teknik wawancara antara lain dengan Kepala Desa Tanjung, Kepala Urusan Perencanaan Desa Tanjung, Badan Permusyawaratan Desa Tanjung, POKDARWIS, Pengurus BumDes Desa Tanjung, pedagang sekitar wisata Desa Tanjung dan masyarakat Desa Tanjung.

### b) Observasi

Observasi mempunyai ciri yang khusus bila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain karena observasi memiliki responden yang tidak terbatas serta dapat juga menggunakan objek-objek alam lain Observasi merupakan teknik pengumpulan data jika: (1) berkaitan dengan tujuan penelitian, (2) disusun dan ditetapkan secara terstruktur, dan (3) kondisinya (reliabilitas) dan kebenarannya

(validitas) dapat dipantau. Definisi observasi yakni proses kompleks yang terdiri dari proses biologis dan proses psikologis. Saat menggunakan teknik observasi, urgensi menggunakan penglihatan dan ingatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari lapangan, menjadi partisipan langsung dalam objek penelitian, yaitu. pembangunan Desa Tanjung (Hardani, 2020, p. 123).

#### **c) Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara pendataan informasi dan menghasilkan dokumen-dokumen yang dapat diperoleh dan dipertimbangkan sehingga menjadi bukti konkret. Dokumentasi seperti pengumpulan data dalam bentuk pencatatan merupakan objek pengumpulan data dengan mempertimbangkan tiga jenis sumber yaitu kertas, tempat dan orang. Metode ini digunakan untuk menghasilkan informasi, dokumen tertulis atau informasi lain yang dapat memengaruhi perkembangan Desa Tanjung diantaranya yaitu Raperda Kabupaten Jepara tentang desa wisata, RPJMDes dan RKPDes..

#### **4) Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu metode dimana para peneliti dapat mengelola data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan tentang penelitian mereka, analisis data adalah metode yang paling penting dari penelitian ilmiah, dikarenakan dengan bantuan analisis, data lebih bermakna serta berarti untuk menemukan hasil. Penelitian ini menerapkan teknis analisis data yaitu:

##### **a) Reduksi Data**

Reduksi data didefinisikan sebagai suatu pengolahan dimana data informasi disederhanakan, data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam bentuk laporan, yang kemudian dipadatkan dan difokuskan pada isu-isu penting. Tema dan sistem yang terorganisir secara terstruktur. Data yang padatkan memberikan suatu hasil yang tajam dan juga memudahkan untuk menemukan hasil.

##### **b) Penyajian Data**

Penyajian materi dilakukan untuk melihat gambaran umum dari pekerjaan penelitian atau bagian-bagian tertentu, untuk membuat deskripsi deskriptif dari masalah yang dikaji.

**c) Penarikan Kesimpulan**

Tahap terakhir dari penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang ada haruslah disusun dengan baik serta mencakup penjelasan mengenai bagaimana politik pembangunan desa wisata serta upaya pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Tanjung. Kesimpulan yang ditulis peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## BAB II

### ***INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT DAN GOVERNABILITY***

Diskusi dalam bab ini akan membahas mengenai beberapa teori. *Pertama*, teori pembangunan pedesaan terintegrasi (*integrated rural development*) digunakan untuk membaca mengenai proses politik pembangunan desa wisata yang dilaksanakan di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Teori ini merujuk pada Michael P. Todaro & Stephen C. Smith. *Kedua*, teori *governability* digunakan untuk melihat mengenai peran aktor dalam mewujudkan pembangunan desa wisata. Berikut penjelasan lebih detail mengenai kedua teori tersebut:

#### **A. Pembangunan Pedesaan Terintegrasi (*Integrated Rural Development*)**

Pembangunan Pedesaan Terintegrasi merupakan rentang spektrum yang luas mengenai kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah pedesaan. Beberapa aspek yang tercakup dalam pembangunan pedesaan terintegrasi diantaranya yaitu pembangunan pertanian bagi petani kecil, penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, pembangunan industri nonpertanian pedesaan, serta kapasitas sektor pedesaan untuk mempertahankan dan mempercepat proses perbaikan ini dengan seiring berjalannya waktu.

Fakta menyebutkan bahwa mayoritas penduduk yang memiliki kategori miskin berasal dari daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya mengandalkan perekonomian mereka hanya dari sektor pertanian. Bagi masyarakat desa yang terpenting yaitu bisa bertahan hidup. Intisari dari permasalahan tersebut yaitu kemiskinan yang tersebar luas, ketimpangan yang semakin meningkat, laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, hal tersebutlah yang membuat kehidupan di pedesaan seringkali mengalami stagnasi serta kemunduran kehidupan ekonomi pada daerah pedesaan (Todaro, 2011).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kapasitas *stakeholder* dari tingkat desa hingga tingkat pusat menjadi variabel utama dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai garda terdepan karena yang bersentuhan langsung dengan objek pembangunan harus memiliki kemampuan untuk dapat menafsirkan berbagai kebijakan untuk dapat menjadi program strategis pembangunan desa. Sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat (Samsir, 2017).

Pembangunan desa serta pembangunan masyarakat desa secara definisi adalah dua istilah yang berbeda. Menurut Sumarjan dalam Samsir (2017) beliau menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa atau *community development* merupakan suatu usaha pembangunan yang hanya diarahkan pada kualitas manusia. Kemudian pembangunan desa atau *rural development* merupakan suatu pembangunan masyarakat yang dibarengi dengan pembangunan lingkungan hidupnya. Berdasarkan kedua definisi tersebut pembangunan masyarakat desa pada intinya diartikan sebagai pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan sertas pengorganisasian masyarakat. Sedangkan pembangunan desa memiliki makna yang lebih luas dimana pembangunan masyarakat desa sudah tercakup didalamnya bahkan sekaligus terintegrasi juga sebagai usaha pemerintah serta masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan serta penghidupan.

Menurut Djiwadono dalam Samsir (2017) beliau menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi empat hal diantaranya yaitu: pertama, pada tujuan ekonomi yaitu meningkatkan produktivitas pada daerah pedesaan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan; kedua, pada tujuan sosial diarahkan untuk pemerataan kesejahteraan penduduk desa; ketiga, yaitu tujuan kultural yang memiliki maksud untuk meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat pedesaan; keempat, tujuan kebijakan untuk menumbuhkan serta mengembangkan partisipasi masyarakat secara maksimal dalam menunjang berbagai usaha pembangunan serta dalam pemanfaatan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan dari beberapa tujuan pembangunan desa yang telah dijelaskan, sudah jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya modal.

Napitupulu dalam Samsir (2017) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting dalam mewujudkan suatu pembangunan, terutama pada hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam berbagai usaha pembangunan serta pemanfaatan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan desa serta pembangunan masyarakat desa sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidak perlu dibedakan secara mutlak, karena pada intinya suatu pembangunan desa sudah mencakup pembangunan masyarakat desa di dalamnya. Dalam proses pembangunan desa tentu tidak dapat dilakukan secara individual baik dari pemerintah, masyarakat, maupun *stakeholder* lainnya. Hal tersebut tentu sangat dibutuhkan

kolaborasi atau saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga akan tercipta proses-proses politik di dalamnya.

Dalam proses perencanaan pembangunan di desa, tentu tidak terlepas dari proses analisis potensi desa yang dilakukan sebagai tahapan awal sebelum penetapan program kerja. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi yaitu banyaknya dokumen perencanaan yang ada dimiliki oleh desa merupakan dokumen lama bahkan ada juga yang hanya *copypaste* milik desa lain yang keadaannya tidak sesuai dengan desa tersebut. Karena pada faktanya setiap desa memiliki kondisi geografis serta sosial yang berbeda-beda sehingga dokumen perencanaan yang ada pada suatu desa harus ditindak lanjuti ke tingkat yang lebih tinggi supaya terciptanya integritas pembangunan di desa tersebut serta dampaknya akan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat (Samsir, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan yang dimulai dari daerah pedesaan diyakini sebagai inti dari pembangunan nasional. Tanpa adanya pembangunan pedesaan terintegrasi (*integrated rural development*), pertumbuhan industri tidak dapat berjalan secara lancar serta akan tercipta berbagai ketimpangan internal dalam perekonomian tersebut. Pembangunan pedesaan yang terintegrasi menjadi pembangunan daerah maupun nasional dapat dijadikan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai sektor ekonomi yang saling berkaitan. Mengintegrsikan pembangunan desa sebagai agenda dalam pembangunan daerah serta nasional, tentu dapat mengarahkan desa sebagai pusat terciptanya beragam produk ekonomi yang dapat terkoneksi atau mempunyai akses pasar yang lebih luas. Selain dapat mengurangi gejala urbanisasi, perkenomian yang bergerak serta memiliki basis di desa juga dapat memberdayakan masyarakat desa serta segala potensi yang ada di dalamnya.

Salah satu dari beberapa aspek yang tercakup dalam pembangunan pedesaan terintegrasi yaitu pembangunan industri nonpertanian pedesaan. Hal tersebut tentu dapat dimanfaatkan berdasarkan letak geografisnya daerah pedesaan yang lebih unggul dari daerah perkotaan karena memiliki potensi alam yang cukup melimpah. Dengan potensi alam yang melimpah salah satunya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan industri pariwisata di desa atau lebih dikenal dengan desa wisata. Dengan dilakukannya pembangunan industri pariwisata pada suatu desa, maka hal tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu aspek dalam ekonomi desa. Pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan pedesaan cukup mendukung dalam pengembangan pada sektor pariwisata.

Dalam pembangunan desa wisata maka peran dari pemerintah desa bersama masyarakat sangat dibutuhkan (Todaro, 2011).

Oleh karena itu, Todaro (2011) menyebutkan bahwa terdapat enam pertanyaan yang perlu diajukan dalam pembangunan desa wisata karena menjadi bagian salah satu wujud pembangunan desa yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan nasional, diantaranya:

- 1) Cara-cara apa yang harus dilakukan untuk mentransformasikan suatu desa menjadi desa wisata?
- 2) Bagaimana transformasi desa menjadi sebuah desa wisata agar dapat meningkatkan pendapatan per kapita pada suatu wilayah desa serta mendukung industri pariwisata di Kabupaten/Kota?
- 3) Ketika ada sekelompok masyarakat menolak perubahan, apakah hal tersebut karena mereka keras kepala dan irasional, atautkah sebaliknya mereka telah bertindak rasional sesuai konteks lingkungan ekonominya?
- 4) Bagaimana dampak dari risiko kemiskinan tinggi yang dihadapi oleh masyarakat pada daerah pedesaan, bagaimana masyarakat menanggulangi risiko tersebut, serta kebijakan apa yang tepat diterapkan untuk dapat mengurangi risiko tersebut?
- 5) Apakah perubahan struktural serta kelembagaan untuk mentransformasikan desa menjadi desa wisata juga perlu dilakukan?
- 6) Apakah dengan mentransformasikan desa menjadi desa wisata sudah cukup dalam hal perbaikan taraf hidup masyarakat pedesaan atau hal tersebut harus pula disertai dengan upaya-upaya perbaikan pada bidang pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial lainnya?

Selain enam pertanyaan terkait pembangunan desa menjadi desa wisata, Todaro (2011) juga menjelaskan mengenai syarat-syarat yang diperlukan dalam pembangunan desa wisata antara lain:

a) Reformasi Pertanahan

Upaya yang dilakukan untuk menata ulang serta mengubah sistem agraria menjadi suatu kawasan wisata dengan tujuan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata serta memfasilitasi pembangunan pedesaan.

b) Kebijakan-kebijakan pendukung

Manfaat penuh dari pembangunan desa wisata tidak dapat direalisasikan tanpa adanya sistem pendukung dari pemerintah sebagai pemberi insentif serta peluang ekonomi.

c) Tujuan-tujuan Pembangunan yang Terintegrasi

Pembangunan pada suatu desa pada umumnya cukup bergantung pada sektor industri pertanian, tetapi pada sisi lain pembangunan pedesaan juga meliputi beberapa hal diantaranya (1) upaya-upaya untuk meningkatkan PADes, baik melalui sektor pertanian maupun non pertanian, melalui penciptaan lapangan kerja, melakukan industrialisasi di pedesaan serta penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, serta penyediaan berbagai layanan sosial lainnya; (2) berkurangnya ketimpangan pendapatan serta peluang ekonomi antara pedesaan dengan perkotaan; (3) memberi perhatian khusus pada kelestarian lingkungan, mendukung konservasi, serta melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan bahan kimia; (4) mengembangkan kapasitas pada sektor pedesaan untuk menopang serta mewujudkan langkah-langkah perbaikan dari waktu ke waktu.

Pembangunan dalam konteks politik pembangunan disini yang dimaksud adalah sebagai proses politik yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membangun jejaring atau membangun komunikasi dengan pemerintah di atasnya untuk mewujudkan suatu pembangunan desa wisata. Sehingga dalam membangun jejaring tersebut ada proses politik yang dilakukan dengan *stakeholder* yang terlibat baik dari internal maupun eksternal. Jejaring dari sisi internal berkaitan dengan pemerintah di atasnya seperti pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, serta dinas pariwisata kabupaten. Kemudian jejaring dari sisi eksternal yaitu investor. Selain membangun jejaring, proses politik dalam pembangunan desa wisata juga dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memprioritaskan anggaran desa untuk pembangunan desa wisata, kemudian terkait bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodir semua keinginan serta kepentingan *stakeholder* yang terlibat. Seperti pada masyarakat yang memiliki harapan dalam peningkatan penghasilan, peningkatan kesejahteraan, menurunkan angka pengangguran. Kemudian pada investor memiliki kepentingan dalam mendapatkan penghasilan atau keuntungan, serta pada masyarakat pendukung atau wisatawan memiliki kepentingan berupa pelayanan. Sehingga guna tercapainya kepentingan dari

masing-masing *stakeholder* yang terlibat maka disitulah terdapat proses politik didalamnya.

## **B. Governability**

### **Keanekaragaman dan Tata Kelola**

Ketertarikan pada keragaman, heterogenitas, dan perbedaan ranah sosial-politik telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Keanekaragaman telah menjadi salah satu kata yang paling sering digunakan di zaman ini dan hampir tidak pernah didefinisikan. Keragaman dipanggil dalam diskusi tentang semuanya, mulai dari kebijakan ketenagakerjaan hingga reformasi kurikulum dan dari hiburan hingga politik (Kooiman, 2003).

Salah satu faktor terpenting keragaman yang membentuk pola perkembangan masyarakat yang terus bergerak adalah citra diri yang diciptakan oleh individu, organisasi, kelompok, dan bahkan negara. Mereka melakukannya untuk menjaga dan melindungi diri mereka dari bahaya disintegrasi yang selalu ada. Aktor sosial dan politik akan berinvestasi banyak untuk mewujudkan citra diri mereka, sementara citra diri terbentuk dalam pendapat, tujuan, dan kepentingan yang mereka perjuangkan. Keanekaragaman budaya di tingkat makro adalah isu yang lebih diperdebatkan. Di satu sisi kita menemukan teori-teori yang menyatakan bahwa nilai-nilai cenderung menyatu, karena media seperti televisi dan periklanan meratakan perbedaan budaya, bahkan secara global. Di sisi lain kita melihat penemuan kembali budaya regional dan lokal, seringkali digabungkan dengan tuntutan daerah atau nasional untuk otonomi politik. Mengatur keragaman berarti mempengaruhi entitas sosial atau alam yang beragam dengan melindungi, mempertahankan, menciptakan, mempromosikan, atau membatasi kesamaan atau ketidaksamaan kualitas mereka. Semakin beragam kualitas yang akan diatur, semakin beragam tindakan pengaturan yang diperlukan, dan semakin beragam hubungan antara keduanya. Ini adalah inti dari '*Law of Requisite Variety*' dari Ashby. Wilden menambahkan prinsip 'diversitas' yang diperlukan dalam representasi yang menyatakan bahwa bukan keragaman dari keseluruhan sistem yang harus diwakili, melainkan sistem yang mengatur harus mampu mewakili tipe dasar varietas yang ditemukan di sistem yang akan diperintah. Kualitas sistem yang memerintah dan yang diperintah harus sesuai dua arah adalah dasar dari dua 'hukum' ini, dan ide-ide tentang representasi seperti yang dikembangkan sebelumnya (Kooiman, 2003).

Dalam interaksi kolaboratif publik-swasta dalam situasi masyarakat, keragaman dalam representasi masing-masing organisasi merupakan faktor penting; cara penanganannya merupakan faktor penjas yang kuat dalam keberhasilan atau kegagalan mereka. Argumen penting untuk mempertimbangkan keragaman nilai, tujuan, dan kepentingan mereka yang terlibat dalam interaksi. Namun, keragaman memiliki batas-batasnya. Entitas sosial tidak dapat berfungsi tanpa ukuran keseragaman tertentu dalam interaksi antar manusia, antar organisasi, antar wilayah dan antar negara. Keanekaragaman yang tidak terbatas dapat dengan cepat menjadi kontra-produktif, karena dengan keragaman yang berkembang, kesamaan yang dibutuhkan untuk komunikasi akan berkurang dengan cepat bahkan mungkin secara eksponensial. Para filsuf dan penyair Yunani kuno sadar akan hal ini. Ketakutan akan keragaman adalah subjek penting dalam pemikiran mereka, mengeksplorasi ketegangan antara keragaman manusia dan apa yang mengikat mereka bersama, ketakutan bahwa keragaman dan perbedaan dapat membawa kekacauan, mengakibatkan tuntutan agar dunia diatur dalam pola yang teratur. Aristoteles melihat konsekuensi politik dari keragaman dalam hubungannya dengan dunia politik secara keseluruhan. Ini menurut Saxenhouse adalah cara Aristoteles 'melahirkan ilmu politik'. Aturan informal dan formal membentuk kerangka kerja di mana keragaman tujuan, minat, dan aspirasi fundamental yang tidak terbatas dari para aktor di berbagai tingkat agregasi diekspresikan dan dapat dikembangkan. Kedua sisi keragaman ini menimbulkan ketegangan terus-menerus antara kebebasan bertindak dan berekspresi aktor dan entitas, dan aturan serta kebiasaan yang harus dipatuhi oleh tindakan dan ekspresi tersebut. Ini adalah tema yang mengalir melalui pemikiran terkini tentang bagaimana mengatasi perbedaan dan keragaman. Keanekaragaman, di samping individualisme, dianggap sebagai batu penjurus masyarakat liberal. Tujuan liberal mendukung keragaman liberal demi memenuhi tantangan dan mempertahankan persatuan dalam menghadapi kekuatan sentrifugal keragaman (Kooiman, 2003).

Pendekatan lain menekankan hubungan antara perbedaan, keragaman dan demokrasi. Dalam pandangan ini, pemahaman tentang demokrasi, politik identitas, perbedaan, dan keragaman menghasilkan banyak gerakan. Kemudian adanya pencarian untuk teori demokrasi yang memungkinkan dalam mengekspresikan keragaman dalam politik dan menekankan pentingnya mencapai keadilan. Dalam pengembangan teori demokrasi tentang keragaman, ranah publik dan peran langsung masyarakat sipil sangat penting. Secara aktif menerapkan keragaman nilai, tujuan, dan kepentingan dalam

mengatur interaksi dalam pemerintahan modern berarti mengembangkan pegangan operasional terhadapnya. Ini membutuhkan proses penataan ulang keanekaragaman (penciptaan) kualitas. Pemikiran dan literatur feminis tentang pengalaman etnis memberikan contoh perbedaan atau keragaman yang dijelaskan seperti kehidupan sehari-hari (pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, pekerjaan berupah rendah dan pengucilan dari pusat-pusat utama kekuatan politik dan budaya); hubungan sosial (mekanisme untuk praktik eksklusif dan diskriminatif); identitas (modus keberadaan); dan bagaimana 'tatanan simbolis' dan 'tatanan sosial' diartikulasikan dalam pembentukan suatu subjek? Ketika kita membahas keragaman dan bagaimana mengatur atau mengklasifikasikan perbedaan, kita juga membahas perbedaan fisik dan simbolik yang menciptakan batas-batas yang memisahkan entitas masyarakat. Batasan adalah fakta sosial, mereka membedakan tetapi juga bisa dilintasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting bagi tata kelola: bagaimana mengidentifikasi (mengubah) kesamaan dan perbedaan dan (mengaturnya kembali), bagaimana mengakui batasan, tetapi juga melintasinya?

Wawasan terbaru dari teori 'klasifikasi' dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Klasifikasi seharusnya tidak dilihat sebagai hasil sederhana dari proses pengurutan, tetapi proses pengurutan ini 'sendiri tertanam dalam tindakan sebelum dan selanjutnya'. Ini adalah bagian tengah dari lingkaran tanya jawab, di mana 'pengklasifikasian diri merupakan elemen penting dari komunitas demokratis'. Klasifikasi memiliki konsekuensi yaitu beberapa menyebabkan kerusakan dan yang lain menguntungkan. Hal ini terutama berlaku untuk kategori resmi, dan banyak konflik sosial-politik telah diperjuangkan terkait pembentukan atau penghapusannya. Mengklasifikasikan keragaman dalam pemerintahan pada dasarnya adalah proses penataan kualitas. Dalam sejumlah langkah, kualitas dapat diurutkan dan ditata ulang dimana kesamaan dan perbedaan di antara entitas menemukan tempatnya. Proses pengurutan seperti itu bersifat iteratif, di mana pencarian, pengenalan, dan pengkategorian persamaan dilakukan bergantian dengan prosedur yang sama tentang perbedaan. Di pengaturan sosial-politik proses penataan seperti itu niscaya akan memiliki banyak hasil yang terus tumpang tindih dan mengesampingkan satu sama lain. Untuk tata kelola interaktif, iterasi adalah salah satu 'dasar', mungkin sulit, tetapi bukan tugas yang mustahil. Justru dalam karakter tata kelola yang interaktif, kemungkinan urutan berulang dapat dieksplorasi, pada tingkat yang disengaja, serta dalam konteksnya. Tata kelola berarti memanfaatkan kekayaan keragaman

masyarakat secara sistematis, mengaturnya (kembali), dan menentukan batas-batasnya dalam interaksi pengaturan yang berulang.

Kompleksitas fenomena manusia tidak inheren, tetapi turunan, yang bergantung pada sifat kepentingan kita. Inti dari perspektif ini adalah gagasan bahwa dalam perkembangan masyarakat jalan diferensiasi dan spesialisasi telah diikuti secara dominan. Akibatnya, ada kemajuan besar dalam pengetahuan bagian-bagian, tetapi lebih sedikit pengetahuan tentang hubungan di antara mereka, dan hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan. Dalam menangani kompleksitas oleh tata kelola, banyak saling ketergantungan antara dan di dalam sistem sosial menjadi subyek dan obyek dari kepentingan kita, dan dalam melakukannya kita menghadapi sejumlah masalah konseptual dan praktis yang agak sulit. Kami berasumsi bahwa ada batasan pada kapasitas manusia untuk mengetahui dan bertindak. Artinya, dalam mengatasi kompleksitas, kita harus mengikuti jalur strategi gabungan. Beberapa terlintas dalam pikiran. Tiga sumber intelektual dapat disebutkan sebagai panduan ide tentang hubungan antara pemerintahan dan kompleksitas: Luhmann, Weaver dan Simon. Dalam perjalanan pekerjaan Luhmann, cara dia 'mengurangi kompleksitas' melewati beberapa tahap. Awalnya dia melihat kompleksitas sebagai pertanyaan apakah sistem sosial memiliki cukup kesempatan untuk bereaksi terhadap dunia yang terus berubah. Kemudian paradigma sistem-lingkungan ini bergeser, dan masalahnya tidak hanya menjadi adaptasi terhadap lingkungan, tetapi juga adaptasi terhadap kompleksitas internal. Wawasan ini membawanya selangkah lebih maju, dan kompleksitas menjadi masalah pengamatan (diri) dan dengan referensi diri membangun realitas (mereka sendiri).<sup>18</sup> Hal ini akhirnya membawa Luhmann ke wawasan radikal tentang autopoietik sifat sistem sosial (lihat Bab 6). Garis pemikiran penting kedua tentang kompleksitas dan tata kelola adalah perbedaan<sup>1</sup> antara kompleksitas terorganisir dan tidak terorganisir (Weaver). Menurutnya ada dua macam sistem yang kompleks: satu di mana beberapa unit saling berhubungan dalam banyak cara (deterministik) dan dua sistem di mana terdapat banyak unit tetapi tidak dapat ditentukan (acak) keterkaitannya. Faktanya Weaver menempatkan kompleksitas pada skala dengan kesederhanaan yang terorganisir (deterministik) di satu sisi dan kompleksitas yang sangat tidak terorganisir (acak) di sisi lain. Dia berpendapat bahwa banyak, jika bukan masalah yang paling penting, berada di antara dua ekstrem ini. Inilah yang dia sebut kompleksitas terorganisir, yang terdiri dari sejumlah besar bagian yang terkait dengan cara yang saling bergantung. Sistem sosial khususnya memiliki karakteristik kompleksitas terorganisir, dan karenanya sulit

ditangani dengan metodologi statistik atau probabilitas.<sup>19</sup> Banyak ahli teori tentang kompleksitas telah menerapkan pembedaan Weaver. Seseorang menganggap hubungan internasional memiliki yang terburuk dari kedua dunia: pada tingkat sistem itu adalah anarki, dan pada tingkat aktor para aktor berperilaku dengan cara yang tidak dapat ditentukan. Hal ini menimbulkan masalah tata kelola yang sangat besar, karena prediksi yang sukses tidak dapat dibuat dengan cara statistik (acak) atau melalui pengetahuan tentang posisi unit dalam kaitannya dengan keseluruhan (deterministik). Terakhir, ada penemuan Simon tentang kualitas hirarkis dari sistem yang kompleks. Dalam makalah klasiknya 'Arsitektur Kompleksitas' Simon mempertimbangkan sistem kompleks yang terdiri dari sejumlah besar bagian, yang saling berinteraksi dengan cara yang tidak sederhana. Dalam sistem seperti itu, keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagian, bukan dalam satu kesatuan. pamungkas, pengertian metafisik tetapi dalam pengertian pragmatis yang penting bahwa, mengingat sifat-sifat bagian-bagian, dan hukum interaksinya, bukanlah masalah sepele untuk menyimpulkan sifat-sifat keseluruhan. Di antara sistem semacam itu, hierarki adalah salah satu skema struktural pusat. Simon mendefinisikan hierarki secara berbeda dari kebanyakan pengguna lain, yang agak memperumit masalah. Hirarki dalam pandangannya berarti bahwa suatu sistem terdiri dari subsistem yang saling terkait, masing-masing pada gilirannya berstruktur hierarkis sampai tingkat terendah dari subsistem dasar tercapai. Pada titik ini Simon memperkenalkan perbedaan, yang membuat kontribusinya pada teori kompleksitas begitu penting. Jenis partisi atau penguraian dapat dibedakan atas dasar apakah suatu sistem sepenuhnya atau 'hampir terurai'. Dalam sistem yang hampir terdekomposisi, interaksi di dalam subsistem mungkin sangat kompleks, tetapi saling ketergantungan di antara mereka sedikit dan relatif lemah. Sistem sosial, di mana setiap elemen terkait dengan kekuatan yang hampir sama dengan hampir semua bagian sistem lainnya, jarang terjadi. Dengan kata lain dalam sistem sosial hampir-terurai umumnya sangat menonjol. Untuk mengatasi kerumitan dalam sistem yang hampir dapat terurai, kombinasi dua prosedur: komposisi dan dekomposisi, dapat membantu kita.<sup>22</sup> Di yang pertama, sistem (de) disusun menjadi bagian-bagian yang sehomogen mungkin; yang kedua, suatu sistem (de) disusun sehingga mereka memiliki sesedikit mungkin keterkaitan, menjadi bagian-bagian yang hampir otonom. Keduanya memiliki konsekuensi pengaturan khusus. (De) komposisi menurut homogenitas mendorong pencapaian tujuan, sedangkan (de) komposisi menjadi bagian-bagian otonom, memungkinkan penyesuaian bersama. Prinsip 'hampir terurai' dan gagasan teoretis yang dikembangkan darinya merupakan titik awal yang baik untuk menghadapi sistem sosial-politik yang kompleks, misalnya dalam

hal memecahkan masalah atau menciptakan peluang, atau merancang dan memelihara kapasitas kelembagaan. Kompleksitas ada di mata yang melihatnya. Itulah salah satu alasan mengapa Kooiman membatasi dan mengurangi penggunaan kompleksitas subjek dengan membuat perbedaan antara jenis interaksi sosial, mode, dan tatanan pemerintahan. Contoh lain dari pengurangan kompleksitas dalam penelitian ini dapat diberikan juga. Kompleksitas masyarakat hanya dapat dipahami dan ditangani sebagian; strategi gabungan komposisi dan dekomposisi diperlukan untuk menguranginya untuk tujuan pengaturan secara bertanggung jawab (Kooiman, 2003).

### **Dinamika dan pemerintahan**

Menurut Mayntz, pengetahuan tentang dinamika masyarakat yang sangat maju sangat terbatas. Hal ini sebagian karena perbedaannya yang sangat besar, dan pada saat yang sama hubungan yang sangat besar antara bagian-bagian yang berbeda ini, tetapi sebagian juga karena kurangnya teori proses dinamis yang tepat. Realitas dinamika melibatkan masyarakat yang berpindah dari satu negara ke negara lain, dalam pola yang tidak teratur dan tidak dapat diprediksi: didorong, ditarik atau dengan cara lain dipengaruhi oleh kekuatan teknologi, ekonomi, sosial atau politik. Dinamika dapat dilihat sebagai komposisi gaya yang kadang-kadang berubah menjadi perkembangan bertahap, tetapi lebih sering menghasilkan gaya nonlinier. pola perubahan. Skema sebab-akibat penjelasan tradisional tampaknya tidak cukup berlaku untuk mereka. Perkembangan terkini dalam ilmu alam telah merangsang minat ilmu sosial dalam kegunaan konsep seperti entropi, dinamika non-ekuilibrium, dan struktur kekacauan dan disipatif untuk penjelasan dinamika fenomena sosial. Untuk mendapatkan wawasan tentang dinamika, tiga sumber intelektual dapat disebutkan: Sorokin (perubahan masyarakat), Prigogine (non-reversibilitas), Etzioni (teori kekacauan dan entropi). Masing-masing menyoroti aspek dinamika yang relevan dengan pemerintahan. Sorokin, dalam kajian klasiknya tentang dinamika, melihat dua prinsip dasar perubahan sosial-budaya: dinamisme imanen dan batas-batasnya. Poin pertama pada penyebab perubahan sistem sosial-budaya yang tidak terkecuali, selalu ada, permanen, universal dan perlu. Prinsip kedua berkaitan dengan fakta bahwa sejumlah besar sistem dan proses sosial-budaya menunjukkan rentang kemungkinan yang terbatas dalam variasi mereka dalam penciptaan bentuk-bentuk fundamental baru. Mengembangkan kedua prinsip ini secara sistematis, dan menerapkannya pada masalah tentang 'kekambuhan, ritme, linearisme, dan kebaruan abadi', Sorokin sampai pada kesimpulan bahwa pola paling umum dari perubahan sosio-kultural adalah salah satu proses yang terus berubah-ubah.

Menurut wawasan yang lebih baru dalam proses dinamis, 'mengapa' dinamika dapat dijawab melalui anggapan yang berasal dari teori proses yang tidak dapat dibalik. Teori ini mensyaratkan bahwa sistem terbuka seperti sistem sosial biasanya tidak stabil atau disequilibrasi; mereka 'berfluktuasi' terus-menerus. Melalui proses umpan balik positif, fluktuasi ini dapat menjadi 'tidak dapat diubah'. Konfigurasi orde baru dan lebih tinggi dapat muncul - yang disebut struktur disipatif. Proses ireversibel belum tentu kacau atau menjalankan kursus yang tidak teratur, tetapi sebaliknya, dapat dilihat sebagai sumber tatanan dinamis. Juga, berbagai bentuk proses sosial non-linear dapat dibedakan, seperti 'siklus', 'chaotic' dan 'cata stropic', masing-masing dengan bentuk dinamika khusus mereka sendiri. Di samping proses non linier, sistem sosial dicirikan oleh keseimbangan, siklus, kumulasi dan pola proses linier lainnya. Sistem sosial dapat dikatakan terdiri dari berbagai bentuk keseimbangan dan ketidakseimbangan, bria: dekat dengan kesetimbangan, tidak terlalu dekat atau jauh darinya. Apa yang baru-baru ini dikenal sebagai teori chaos memungkinkan pendekatan baru yang tampaknya relevan dengan diskusi tentang dinamika (dan pengaturannya). Mereka adalah ekspresi dari tatanan yang anggun, di mana tidak ada tatanan yang diakui atau dianggap tidak tertib sebelumnya, ' Terakhir, entropi adalah kecenderungan yang ada dalam sistem apa pun untuk hancur dan bahkan menghilang dalam jangka panjang. Semua sistem, fisik, alam, atau sosial dapat dilakukan untuk melawan kecenderungan entropik ini untuk mengimbangi kehilangan energi ini. Penyeimbangan ini disebut negentropi. Disebagian besar sistem sosial-politik keadaan keseimbangan (akhir) entropis seperti itu tidak akan pernah tercapai. Semua sistem sosial cenderung ke arah 'atomisasi dan anarki - kecuali dilakukan investasi terus-menerus untuk mempertahankan tingkat integrasi dan organisasinya'. Disensus, menurut Etzioni, adalah keadaan entropis dari sifat masyarakat; konsensus tidak ditemukan tetapi harus dihasilkan. Tinjauan tentang pendekatan teoretis terhadap dinamika ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi dinamika masyarakat, jalan baru dapat dibuka, untuk membuat konsep dan memahaminya dengan lebih baik. Proses non-linear dan linear memainkan peran konstruktif dalam teori-teori ini. Konsep-konsep seperti percabangan, struktur disipatif, titik balik katastrofik, dan stabilitas di tingkat yang lebih tinggi, memberi cahaya baru pada fenomena yang telah dikenal dalam analisis sosial dan sejarah sejak lama. Namun, mengingat penemuan-penemuan baru ini, mereka tampaknya memiliki dasar yang lebih kokoh. Pentingnya proses dinamika non-linier, di samping linier, dalam masalah tata kelola sosial politik hampir tidak dapat dilebih-lebihkan, meskipun Mayntz memperingatkan bahwa apa yang mungkin dihasilkan oleh wawasan baru ini bukanlah sesuatu yang 'diberikan' tetapi harus diuji dalam kehidupan

sosial yang serius. Wawasan dalam dinamika masyarakat ini memiliki relevansi langsung atau tidak langsung untuk tata kelola, karena masing-masing atau kombinasinya, mengkondisikan setidaknya sebagian karakteristik ruang dinamis di mana tata kelola berlangsung. Mereka penting sebagai alat dan teknik heuristik untuk membuat kita berpikir secara berbeda dan menyusun perspektif baru tentang dinamika seperti yang dijelaskan. Meskipun perkembangan ini masih jauh dari prinsip sibernatika asli, konsep yang relatif sederhana seperti putaran umpan balik positif dan negatif serta kualitasnya menunjuk pada mekanisme tata kelola yang penting, yang masih relatif kurang dimanfaatkan dalam ilmu sosial dan politik. Kualitas dinamis dari sistem sosial-politik, baik yang linier (seperti sibernetik) maupun non-linier, (seperti yang kacau) dapat dipengaruhi. Putaran dengan operasi 'positif' menunjukkan efek bahwa ketegangan 'saling menguatkan': mereka memiliki kecenderungan untuk 'keluar kendali'. Loop 'Negatif' menunjukkan efek yang semakin berkurang; mereka memiliki kecenderungan untuk 'menyeimbangkan' / membatalkan. Dalam teori sibernatika, dua cara untuk 'mengendalikan' putaran semacam itu dibedakan: umpan maju dan umpan balik. Umpan-maju mencoba untuk mengontrol fluktuasi atau gangguan dalam satu lingkaran dengan mengambil tindakan pengendalian terlebih dahulu; kontrol umpan balik dengan mengambil tindakan setelah gangguan atau fluktuasi telah terjadi. Putaran seperti apa yang dapat kita kenali dalam perkembangan sosial-politik? Jenis ketegangan apa yang dapat kita harapkan untuk menciptakan situasi dinamis, yang menunjukkan jenis kualitas sibernetik tertentu seperti umpan balik positif atau negatif atau putaran umpan maju? Bagaimana loop ini diatur? Jenis aktor apa dalam jenis proses apa di bawah jenis kondisi struktural apa yang dapat diharapkan untuk mengembangkan putaran umpan balik positif atau negatif? Jawaban atas pertanyaan seperti ini adalah langkah pertama menuju teori tentang kemungkinan dan keterbatasan dinamika pemerintahan dalam situasi tertentu. Jika kita melihat tata kelola dinamika berurusan dengan ketegangan yang tergantung bersama dengan prinsip-prinsip dinamis non-linier atau linier ini, akan jelas bahwa ini hanyalah awal dari pemikiran sistematis tentang konsekuensi tata kelola mereka. Dua contoh dapat disebutkan yang menggunakan ketegangan dinamis untuk tujuan tata kelola. Yang pertama berasumsi bahwa selalu ada, secara bersamaan, ketegangan antara di satu sisi keinginan untuk mempertahankan negara yang ada dan, di sisi lain, penyebab perubahan negara itu. Dalam perspektif demikian, dinamika dapat dipahami sebagai potensi perubahan sosial-politik. Dinamika pemerintahan kemudian disamakan dengan mengambil ketegangan seperti itu sebagai titik awal untuk interaksi tata kelola, baik di tingkat yang disengaja, struktural atau keterkaitan antara

keduanya. Ketegangan seringkali merupakan indikasi di mana harus menerapkan mode pengaturan dinamis. Dalam contoh kedua, ketegangan dinamis digunakan sebagai dasar untuk merangsang umpan balik positif dan negatif serta putaran umpan maju. Dalam konteks ini Dunsire berbicara tentang kolaborasi, menggunakan 'kekuatan tandingan' sebagai alat untuk merangsang atau melemahkan kekuatan yang sudah ada dalam masyarakat. Ini adalah bentuk pemerintahan yang memanfaatkan dinamika yang melekat dalam pembagian kekuasaan masyarakat dalam sebuah cara yang penuh tujuan. Cara-cara pemerintahan lainnya akan mencoba memperkuat, mengurangi, membengkokkan, atau meredam kekuatan-kekuatan tertentu untuk memengaruhi potensi dinamis yang dimiliki semua masyarakat dan interaksinya. Ketegangan dapat didefinisikan sebagai loop. Menyadari hal ini adalah awal dari pengembangan gagasan konseptual, teoretis, dan praktis tentang penggunaan dinamika dalam model pemerintahan. Sebuah Bidang penelitian dan analisis yang penting dengan menggunakan konsep dinamis adalah konflik dan resolusi konflik. Dinamika masyarakat penting bagi pemerintahan dalam dua hal; (1) pola dinamis linear dan non-linear dari perubahan masyarakat membentuk dasar untuk mengatur (objek); dan (2) kekuatan dinamis juga dapat digunakan untuk mengatur tujuan (subjek) (Kooiman, 2003).

### **Keanekaragaman, kompleksitas, dinamika dan interaksi**

Governability dapat dibuat terlihat dalam hubungan antara niat dan tingkat struktural dari interaksi yang mengatur. membedakan dan mengkontraskan kedua tingkat interaksi ini menghasilkan potensi tata kelola situasi. Pada tingkat struktural dari interaksi ini dapat dibedakan antara struktur yang lebih terbuka dan yang lebih tertutup, dan sama pada tingkat yang disengaja. Perbedaan antara kualitas-kualitas ini dinyatakan dalam sejauh mana mereka responsif terhadap sinyal atau tekanan dari lawannya: struktur untuk sinyal dari tingkat yang disengaja dan sebaliknya. Keempat kuadran tersebut menunjukkan empat situasi governance dengan profil keragaman, dinamika dan kompleksitas yang berbeda. Misalnya di kuadran pertama kita menemukan situasi yang dicirikan oleh keterbukaan pada kedua tingkat interaksi yang mengatur, yang berarti situasi tata kelola yang cukup memungkinkan. Dalam kasus seperti itu orang mungkin berharap akan ada keragaman pola interaksional yang mungkin terjadi, dan karena sifat interaksi yang memungkinkan tidak akan ada dinamika yang kuat berdasarkan ketegangan yang dibangun dalam interaksi semacam itu. Dengan cara yang sama, tiga profil pemerintahan lainnya dapat dihipotesiskan dari karakter interaksi sebagaimana didefinisikan. Pemerintahan

menunjukkan berbagai 'profil' keragaman, dinamika dan kompleksitas tergantung pada kombinasi sifat terbuka dan tertutup dari interaksi yang mengatur pada tingkat yang disengaja dan struktural. Di pekerjaan yang dilakukan gubernur, keragaman, kompleksitas, dan dinamika sistem yang akan diatur akan terlihat secara langsung. Gagasan yang disampaikan adalah bahwa keragaman masyarakat pertama-tama direpresentasikan dalam citra-citra yang mengatur. Citra dan sistem faktual dan evaluatif dalam pemerintahan kontemporer memiliki makna yang relatif terbuka. Mengatasi keragaman masyarakat dalam pemerintahan khususnya masalah proses penataan di mana variasi gambar yang hampir tak terbatas yang tersedia dalam ikatan masyarakat modern disaring dan diatur terutama dengan meyakinkan dan berbagi. Komunikasi interaktif seperti di ruang publik, bukan dengan pemaksaan oleh otoritas publik atau lainnya, adalah cara mengatur keragaman yang dapat ditangani. Berbeda dengan ini, keragaman paling tidak dibenci dalam kondisi instrumental. Salah satu kesulitan besar dalam memerintah adalah menemukan instrumen yang mewakili keragaman masyarakat. Hal ini membuat Kooiman berpikir bahwa dari ketiga unsur pemerintahan tersebut, unsur citra merupakan unsur yang paling utama dalam representasi keberagaman dalam pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan, kompleksitas masyarakat merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Meskipun pendapat berbeda tentang sifatnya - baik sebagai keterbatasan pengetahuan, atau sebagai kenyataan 'di luar sana', upaya untuk menguasai kompleksitas sejauh ini belum terlalu berhasil. Mengingat 'fakta kehidupan' ini, mengurangi kompleksitas dengan prosedur komposisi dan dekomposisi tampaknya merupakan rute yang tepat untuk diambil. Ini berarti bahwa kompleksitas masyarakat, untuk semua tujuan praktis harus dianggap sebagai salah satu instrumen. Adapun dua elemen pengatur lainnya, Representasi kompleksitas masyarakat dalam pembentukan citra tampaknya menjadi kepentingan tata kelola yang lebih besar daripada elemen tindakannya. Ketiga, ada dinamika masyarakat dan cara ini terwakili dalam unsur-unsur yang mengatur. Sebagaimana dikonseptualisasikan, dinamika dapat dilihat sebagai hasil dari semua jenis kekuatan masyarakat, dan ketegangan yang berasal darinya. Dari sudut pandang yang mengatur, banyak, jika tidak sebagian besar kekuatan dinamis yang lebih dominan dalam masyarakat modern hanya dapat dipengaruhi secara marjinal, terlepas dari retorika di sekitarnya. Prinsip-prinsip sibernetika, seperti umpan balik, menunjukkan arah bagaimana menghadapi dinamika masyarakat. Elemen tindakan dari pemerintahan tampaknya menjadi fokus utama dalam konteks ini. Dari itu ada dinamika masyarakat dan cara ini terwakili dalam unsur-unsur yang mengatur. Sebagaimana dikonseptualisasikan, dinamika dapat

dilihat sebagai hasil dari semua jenis kekuatan masyarakat, dan ketegangan yang berasal darinya. Dari tindakan dua elemen pengatur lainnya dapat disimpulkan, instrumen lebih dari gambar. Representasi ciri-ciri masyarakat dalam unsur-unsur pemerintahan dapat dibedakan. Keragaman terutama ditemukan dalam gambar yang mengatur kompleksitas dalam mengatur instrumen dan dinamika yang diwakili dalam tindakan mengatur (Kooiman, 2003).

### **Keragaman, kompleksitas, dinamika dan mode tata kelola**

Di samping cara di mana keragaman, kompleksitas, dan dinamika masyarakat muncul dalam elemen-elemen yang mengatur, seseorang dapat mengajukan pertanyaan apakah sesuatu yang lebih spesifik dapat dikatakan tentang cara-cara di mana fitur-fitur masyarakat ini diurus dalam tata kelola. Tabel ini menunjukkan bahwa, secara hipotetis, tiga mode tata kelola yang berbeda, dengan cara yang berbeda-beda, mampu mengatasi keragaman masyarakat, kompleksitas dan dinamika. Namun, mereka juga dapat menambah keragaman, kompleksitas, dan dinamika masyarakat yang sudah ada. Misalnya, Kooiman berhipotesis bahwa tata kelola mandiri sebagai jenis tata kelola yang paling tidak diformalkan paling mampu mengatasi dinamika masyarakat. Ini adalah mode pengaturan yang sesuai dengan campur tangan masyarakat, sebagai bentuk interaksi masyarakat yang paling terbaru; jadi kita memang berharap tata kelola semacam ini menambah dinamika masyarakat. Hal yang sama berlaku, jika kurang mencolok, pada keragaman masyarakat. Ini menjadi bentuk interaksi masyarakat yang paling terbuka, keragaman dapat diharapkan untuk diambil alih oleh pemerintahan sendiri, dan karena keragaman pengalaman dengan ini, keragaman baru dapat diciptakan. Karena sifatnya yang cair, pemerintahan sendiri tidak mampu mengatasi kompleksitas masyarakat dengan baik. Ini mungkin menambahnya karena kecenderungannya untuk 'tertutup' yang mungkin berarti bahwa entitas masyarakat yang mengatur diri sendiri tidak memiliki mata yang terbuka untuk konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan dari perilaku mereka terhadap orang lain. Pada keseimbangan berhipotesis bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara pemerintahan sendiri dan kompleksitas masyarakat. Sekarang, melihat bagaimana dua mode tata kelola dapat diharapkan untuk mengatasi fitur-fitur sosial ini, gambaran yang berbeda muncul, yaitu:

- Co-governing dapat menangani keragaman masyarakat dengan baik, agak kurang rumit dan paling tidak mampu mengatasi dinamika. Co-governing juga menambah keragaman, sedikit kompleksitas dan sedikit dinamika masyarakat.
- Kompleksitas masyarakat dapat ditangani dengan baik oleh pemerintahan hierarkis, sampai titik tertentu mode ini juga mampu menangani keragaman, dan kurang mampu mengatasi dinamika masyarakat. Namun Kooiman berhipotesis bahwa pemerintahan hierarkis juga berkontribusi paling besar pada kompleksitas masyarakat, agak kurang pada keragamannya, dan paling sedikit pada dinamika masyarakat.

### **Keanekaragaman, kompleksitas dan dinamika, dan urutan tata kelola**

Cara lebih lanjut untuk mengonseptualisasi tata kelola adalah dengan mencoba memajukan gagasan tentang cara keragaman, dinamika, dan kompleksitas masyarakat memengaruhi tiga tatanan pemerintahan/tata kelola yang dibedakan. Di awal bab ini, Kooiman berpendapat bahwa ketiga karakteristik ini sering dipandang secara negatif, terutama sebagai menciptakan kesulitan bagi tata kelola masyarakat, tetapi juga berpendapat bahwa ada banyak alasan atau bahkan lebih banyak alasan untuk melihatnya dalam perspektif positif, untuk melihat mereka sebagai peluang. Sudut pandang ini dapat dioperasionalkan secara lebih tepat dengan 'menyilangkan' ketiganya dengan tiga tatanan pemerintahan yang berbeda. Cukup jelas bahwa keragaman, dinamika dan kompleksitas masyarakat modern menciptakan kesulitan untuk memerintah, khususnya jika dilihat dengan cara klasik 'melakukannya sendiri', daripada mencari opsi pemerintahan/pemerintahan lainnya. Dinamika yang kuat, yang diekspresikan dalam perkembangan non-linier yang tak terduga, menempatkan desain dan pemeliharaan kelembagaan di bawah tekanan. Dan kompleksitas, jika tidak dihadapi secara langsung, membuat pengaturan klasik menjadi sulit, terutama bila tidak ada aturan meta yang tersedia untuk mengatasinya dengan cara yang bertanggung jawab. Namun, fitur-fitur ini juga dapat dipertimbangkan dari sudut yang lebih positif, dari cara mereka dapat berkontribusi pada tata kelola, untuk membuka opsi pengaturan, untuk menciptakan peluang dan peluang. tata kelola urutan pertama (penciptaan peluang sehari-hari). Orientasi penciptaan peluang di masa depan, keragaman adalah kapasitas masyarakat untuk dieksplorasi dan diterapkan, dan tidak berdasarkan sejarah (kepentingan pribadi), seperti yang sering terjadi dalam pemerintahan tradisional. Beberapa orang memandang dinamika sebagai faktor penting

dalam penciptaan peluang; yang lain berpendapat bahwa mengatasi proses yang rumit adalah kualitas penting masyarakat modern (Kooiman, 2003).

Kemudian untuk mewujudkan suatu desa menjadi desa mandiri maka harus dapat memenuhi beberapa perangkat indikator. Perangkat indikator berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 dalam Indeks Desa Membangun memiliki konsepsi bahwa untuk mewujudkan desa mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana terdapat tiga indikator utama di dalamnya yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, serta ketahanan ekologi yang menjadi kekuatan utama serta saling mengisi dan menjaga potensi demi mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Berikut akan dijelaskan mengenai ketiga indikator tersebut diantaranya:

#### 1. Ketahanan sosial

Dalam indeks ketahanan sosial terdapat empat dimensi yaitu:

##### a. Modal sosial

Pada dimensi modal sosial terdiri dari beberapa perangkat indikator diantaranya:

- 1) Memiliki solidaritas sosial, dalam perangkat indikator ini suatu desa harus memenuhi beberapa unsur atau indikator seperti memiliki kebiasaan gotong royong di desa, memiliki ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar, memiliki fasilitas lapangan olahraga, serta terdapat kelompok kegiatan olahraga.
- 2) Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator seperti warga desa terdiri dari masyarakat homogen yang terdapat beberapa suku atau etnis di dalamnya, warga desa dapat menggunakan bahasa yang berbeda-beda dalam berkomunikasi sehari-hari, serta terdapat keragaman agama di desa.
- 3) Terciptanya rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator diantaranya seperti terdapat poskamling lingkungan, partisipasi warga dalam mengadakan siskamling, tingkat kriminalitas yang terjadi di desa, serta upaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di desa.
- 4) Kesejahteraan sosial, terdapat beberapa indikator diantaranya seperti terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa, terdapat penyandang kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, pekerja seks komersial, dan pengemis, serta terdapat penduduk yang bunuh diri.

##### b. Dimensi Kesehatan

Pada dimensi kesehatan terdiri dari beberapa perangkat indikator diantaranya:

- 1) Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari beberapa indikator seperti waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit, terdapat tenaga kesehatan bidan, terdapat tenaga kesehatan dokter, serta terdapat tenaga kesehatan lain.
- 2) Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, terdiri dari indikator seperti bagaimana aktivitas di posyandu serta akses ke poskesdes, polindes, serta posyandu.

c. Dimensi pendidikan

Pada dimensi pendidikan terdiri dari beberapa perangkat indikator diantaranya:

- 1) Akses menuju sarana pendidikan, yang terdiri dari indikator seperti akses ke SD/MI kurang dari 3 kilometer, akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer, serta akses ke SMA/SMK kurang dari 6 kilometer.
- 2) Akses ke pendidikan non-formal, yang terdiri dari terdapatnya kegiatan pemberantasan buta aksara, terdapat kegiatan pendidikan anak usia dini, serta terdapat kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat.
- 3) Akses pengetahuan, seperti terdapatnya taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa.

d. Dimensi Permukiman

Pada dimensi permukiman terdiri dari beberapa perangkat indikator diantaranya:

- 1) Akses ke air bersih serta air minum layak, terdiri dari indikator mayoritas penduduk memiliki sumber air minum yang layak, terdapat akses penduduk desa untuk mendapatkan air bersih .
- 2) Akses sanitasi, yang terdiri dari indikator seperti mayoritas penduduk desa memiliki jamban serta terdapat tempat pembuangan sampah.
- 3) Akses listrik, yang terdiri dari indikator seperti jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
- 4) Akses informasi dan komunikasi, terdiri dari indikator seperti penduduk desa yang memiliki telepon seluler serta sinyal yang kuat, terdapatnya siaran televisi lokal, nasional, serta internasional, serta terdapat akses internet.

2. Ketahanan Ekonomi

Dalam indeks ketahanan ekonomi terdapat beberapa perangkat indikator diantaranya yaitu:

- a. Keragaman produksi masyarakat desa, serta terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.

- b. Terdapat pusat perdagangan, indikatornya adalah:
  - 1) Tersedia sektor perdagangan seperti warung serta minimarket.
  - 2) Tersedia warung makan, hotel serta penginapan.
  - 3) Akses ke pusat perdagangan seperti pasar maupun pertokoan dapat diakses dengan mudah.
- c. Terdapat akses distribusi/logistik, seperti tersedia kantor pos maupun jasa logistik/pengiriman.
- d. Akses ke lembaga keuangan serta perkreditan, indikatornya adalah:
  - 1) Terdapat lembaga perbankan umum.
  - 2) Terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- e. Terdapat lembaga ekonomi rakyat (koperasi).
- f. Keterbukaan wilayah, indikatornya adalah:
  - 1) Tersedia moda transportasi umum.
  - 2) Tersedia jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih.
  - 3) Kualitas jalan utama desa ber aspal, kerikil, serta tanah.

### 3. Ketahanan Ekologi

Dalam indeks ketahanan ekologi terdapat beberapa perangkat indikator diantaranya yaitu:

- a. Kualitas lingkungan, indikatornya yaitu:
  - 1) Terdapat maupun tidak terdapatnya pencemaran air, tanah, serta udara.
  - 2) Terdapat sungai yang tercemar limbah.
- b. Potensi rawan bencana serta tanggap bencana, indikatornya adalah:
  - 1) Terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan.
  - 2) Adanya upaya serta tindakan terhadap potensi bencana alam seperti tanggap bencana, jalur evakuasi, serta tersedianya peralatan penanganan bencana.

Dalam menunjang seluruh aspek serta indikator untuk mewujudkan suatu desa menjadi desa mandiri, tentu pemerintah desa bersama *stakeholder* terkait melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya, salah satunya yaitu melalui pembangunan desa wisata. Menurut Marpaung dalam Asri (2022) dalam pengembangan desa wisata, paling tidak mencakup beberapa aspek diantaranya yaitu :

1. Aksesibilitas, yang mencakup mengenai akses rute atau jalur transportasi menuju obyek wisata.

2. Obyek dan Daya Tarik, yang di dalamnya mencakup mengenai wisata alam, buatan, serta budaya.
3. Amenitas, di dalamnya mencakup mengenai fasilitas penunjang seperti biro perjalanan atau paket wisata, rumah makan, pusat informasi pariwisata serta akomodasi.
4. Fasilitas Pendukung, di dalamnya mencakup seperti bank, rumah sakit, pasar oleh-oleh dan sebagainya.
5. Kelembagaan, yang mencakup terkait adanya peran dari masing-masing *stakeholder* dalam menunjang kegiatan pariwisata.

Diantara beberapa indikator serta beberapa aspek yang telah dijelaskan diatas, di mana dengan pembangunan desa wisata dapat dilakukan salah satunya guna memenuhi indikator desa mandiri sehingga dengan pembangunan desa wisata dapat dijadikan sebagai langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri salah satunya dengan melakukan pembangunan desa wisata.

### BAB III

#### PROFIL DESA TANJUNG KEC. PAKIS AJI KAB. JEPARA

##### A. Profil Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara

###### 1. Letak Geografis Desa Tanjung

Desa Tanjung terletak di sebelah timur Kota Jepara berjarak 18 km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan selama 45 menit. Secara administratif, Desa Tanjung berada dalam wilayah Kecamatan Pakis Aji yang berbatasan dengan wilayah dalam Tabel 3.1. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Plajan Kecamatan Bangsri, sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Papasan Kecamatan Bangsri, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Batealit Kecamatan Batealit, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji. Secara topografi, Desa Tanjung merupakan wilayah dataran tinggi dengan kondisi topografi yang demikian, Desa Tanjung memiliki variasi ketinggian antara 400 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukkan dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang yaitu fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Tabel 3. 1 Batas Desa Tanjung

<b>Batas</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Utara	Plajan	Bangsri
Timur	Papasan	Bangsri
Selatan	Batealit	Batealit
Barat	Lebak	Pakis Aji

Dilihat berdasarkan topografinya, Desa Tanjung terletak di wilayah pegunungan dengan luas wilayahnya 1.731,00 Ha yang dibagi menjadi 28 dukuh yaitu Dukuh Kerbu, Dukuh Gronggong, Dukuh Salak, Dukuh Jabung, Dukuh Gantungan, Dukuh Pengkik, Dukuh Celong, Dukuh Turung, Dukuh Watu Pelak, Dukuh Tanjung Sari, Dukuh Sebauk, Dukuh Jati Kuwung, Dukuh Botohan, Dukuh Pengkik, Dukuh Cupu, Dukuh Ngemplak, Dukuh Nongko Ngangkrang, Dukuh Nganjir, Dukuh Ngrugas, Dukuh Alang-

Alang Ombo, Dukuh Gumuk, Dukuh Pelem Gadung, Dukuh Senggini, Dukuh Juwet Kentong, Dukuh Bunton, Dukuh Kandangan, Dukuh Nganging dan Dukuh Ngladak.

Desa Tanjung terdiri dari 5 RW dan 35 RT dengan rincian seperti yang tertera pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Pembagian RW dan RT Desa Tanjung

No	Nama RW	Jumlah RT
1	RW 01	7
2	RW 02	10
3	RW 03	9
4	RW 04	7
5	RW 05	4

Desa Tanjung memiliki luas wilayah sebesar 1.731,00 Ha yang digunakan untuk mendukung kegiatan penduduk. Pemanfaatan lahan paling besar diperuntukkan sebagai sawah dan perkebunan penduduk didukung dengan profesi mayoritas penduduk adalah petani. Lahan perkebunan Desa Tanjung menghasilkan tanaman kacang, kopi, jagung dan jambu air.

Tabel 3. 3 Pemanfaatan Wilayah Desa Tanjung

Penggunaan	Luas (Ha)
Luas Tanah Sawah	285,00 Ha
Luas Tanah Kering	1.133 Ha
Luas Tanah Perkebunan	267,00 Ha
Luas Fasilitas Umum	21,00 Ha
Luas Tanah Hutan	25,00 Ha
Total Luas	1.731,00 Ha

Berdasarkan Tabel 3.4 letak Desa Tanjung dapat terlihat jarak untuk menuju ke Kecamatan Bangsri memerlukan waktu 15 menit dengan jarak 3 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor. Jarak dari Desa Tanjung menuju ke Kabupaten Jepara memerlukan waktu 45 menit dengan jarak 18 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan

bermotor. Jarak dari Desa Tanjung menuju ke ibukota provinsi Jawa Tengah yaitu Semarang memerlukan waktu 180 menit dengan jarak 80 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor. Akses menuju ke Desa Tanjung sudah memiliki jalan aspal dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor sehingga memberikan kemudahan untuk penduduk dalam melakukan mobilitas ke daerah lainnya.

Tabel 3. 4 Topografi Akses Masyarakat Desa Tanjung

<b>Topografi Orbitasi</b>	<b>Jarak dan Waktu</b>
Jarak ke ibu kota kecamatan	3 km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	15 menit
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	30 menit
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	18 km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	45 menit
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	180 menit
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	60 unit
Jarak ke ibu kota provinsi	80 km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	300 menit

## 2. Data Kependudukan dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung

### a. Jumlah Penduduk Desa Tanjung

Jumlah penduduk Desa Tanjung yang tercatat pada data administrasi pemerintah desa tahun 2020 yaitu berjumlah 7.062 jiwa dengan penduduk laki laki sebesar 3.584 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 3.478 jiwa yang terdiri dari 2.342 kepala keluarga. Jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 6.185 jiwa dan penduduk yang beragama Buddha sebesar 677 jiwa.

Berdasarkan Tabel 3.5 pembagian usia penduduk Desa Tanjung dapat terlihat bahwa penduduk Desa Tanjung didominasi dengan penduduk yang berusia produktif yakni usia

15-64 tahun sebesar 5.106 orang sehingga ketersediaan tenaga kerja produktif yang cukup jika dimanfaatkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang tinggi.

Tabel 3. 5 Kelompok Usia Masyarakat Desa Tanjung

No	Kelompok Usia	L	P	Jumlah
1	0 – 9 Tahun	599	654	1.253
2	10 – 19 Tahun	724	799	1.523
3	20 – 29 Tahun	783	755	1.538
4	30 – 39 Tahun	376	363	739
5	40 – 49 Tahun	363	362	725
6	50 – 59 Tahun	290	291	581
7	60 – 69 Tahun	0	0	0
8	70 – 75 Tahun	0	0	0
9	>75 Tahun	297	300	597
<b>Jumlah</b>		<b>3.432</b>	<b>3.524</b>	<b>6.956</b>

Mata pencaharian dari penduduk Desa Tanjung dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini, terlihat bahwa mata pencaharian penduduk Desa Tanjung masih bersifat homogen dikarenakan mayoritas penduduk masih bergantung dengan alam seperti petani dan buruh tani sebanyak 2.844 orang dan 2.270 orang.

Tabel 3. 6 Rincian Profesi Masyarakat Desa Tanjung

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2.844 orang
2	Buruh Tani	2.270 orang
3	Tukang Batu	130 orang
4	Pedagang Barang Kelontong	126 orang
5	Guru Swasta	40 orang
6	Sopir	16 orang
7	Pegawai Negeri Sipil	16 orang
8	Perangkat Desa	11 orang
9	Seniman	5 orang
10	Purnawirawan/Pensiun	5 orang

b. Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung

Pendidikan masyarakat Desa Tanjung masih tergolong rendah dikarenakan mayoritas penduduk menyelesaikan pendidikannya hanya sampai SD sebanyak 1.195 orang dan tidak tamat sekolah sebanyak 645 orang. Hal ini harus mendapatkan perhatian lebih lanjut oleh pemerintah agar dapat mewujudkan pemerataan pendidikan untuk masyarakat terutama masyarakat yang berada di desa. Dengan tingginya pemerataan pendidikan untuk masyarakat yang berada di desa dapat mendorong tingkat kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan taraf hidup yang layak serta diharapkan mampu mendorong kemajuan di Indonesia.

Tabel 3. 7 Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung

No	Riwayat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	1.195 orang
2	Tamat SMP	791 orang
3	Tamat SMA	669 orang
4	Tamat Perguruan Tinggi	30 orang
5	Tidak Tamat Sekolah	645 orang
Jumlah		3.330 orang

Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Desa Tanjung juga didukung dengan terbatasnya lembaga pendidikan yang ada di Desa Tanjung, jumlah lembaga pendidikan seperti play group berjumlah 5 tempat, SD berjumlah 7, SMP sebanyak 3 tempat. Hal ini terlihat bahwa masih terbatasnya lembaga pendidikan untuk masyarakat Desa Tanjung pada jenjang SMA dan Perguruan Tinggi.

Tabel 3. 8 Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Tanjung

Lembaga Pendidikan	Jumlah
Play Group	5
SD/Sederajat	7
SMP/Sederajat	3
Sekolah Islam	1

c. Keadaan sosial penduduk Desa Tanjung

Sebagian besar penduduk Desa Tanjung menganut agama Islam dan menjadi agama mayoritas penduduk Desa Tanjung, sedangkan sebagian besar penduduk Desa Tanjung menganut agama Buddha. Hal ini dapat terlihat dari sarana peribadatan di Desa Tanjung dengan sarana terbanyak yaitu masjid sebanyak 10 tempat, mushola sebanyak 40 tempat dan wihara sebanyak 3 tempat. Kehidupan antar umat beragama di Desa Tanjung hidup dengan damai dan berdampingan satu sama lain dengan tetap mempertahankan rasa kebersamaan dan gotong royong.

Tabel 3. 9 Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Tanjung

Sarana Peribadatan	Jumlah
Masjid	10
Mushola	40
Wihara	3

3. Visi dan Misi Desa Tanjung

Desa Tanjung memiliki sebuah visi dan misi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari untuk setiap pihak yang berada di Desa Tanjung. Visi dan misi ini dibuat supaya target desa dapat terpenuhi dan ke depannya agar menjadi lebih baik.

a. Visi Desa Tanjung

Visi Desa Tanjung yaitu melayani masyarakat Desa Tanjung secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Tanjung yang maju aman dan sejahtera

b. Misi Desa Tanjung

Misi Desa Tanjung yaitu :

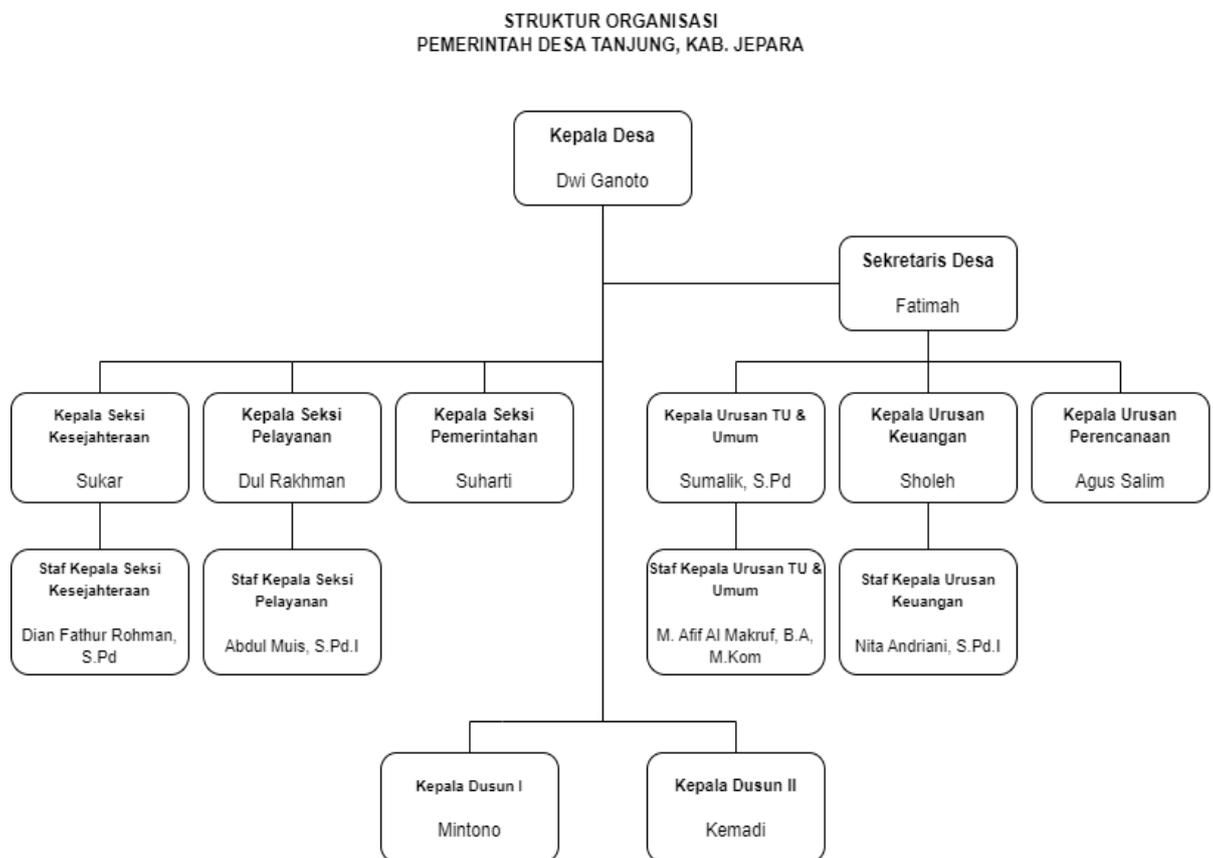
- 1) Meningkatkan kinerja perangkat desa secara maksimal dengan tugas pokok dan fungsinya serta menyelenggarakan tata kelola pemerintah desa yang adil ramah dan bertanggung jawab
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung dengan melibatkan langsung masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat Desa Tanjung
- 4) Pemberdayaan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi mencapai kesejahteraan masyarakat

- 5) Meningkatkan keamanan ketertiban dan ketentraman serta menumbuhkan kembangkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat demi terwujudnya Desa Tanjung yang aman dan nyaman.

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung

Berikut merupakan struktur organisasi Pemerintah Desa Tanjung dalam kepemimpinan Kepala Desa Dwi Ganoto periode 2016-2022.

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung



Struktur organisasi Pemerintah Desa Tanjung dapat dilihat pada Gambar 1 di atas.

Posisi tertinggi dalam pemerintahan desa yaitu kepala desa yang dijabat oleh Bapak Dwi Ganoto yang membawahi sekretaris desa, beberapa kepala seksi dan kepala dusun yang berada di pemerintahan desa. Sekretaris desa atau dapat disebut sebagai carik dijabat oleh Ibu Fatimah untuk membantu kepala desa dalam urusan administrasi pemerintahan dengan membawahi kepala urusan TU & umum yang dijabat oleh Sumalik, S.Pd yang membawahi seorang staf kepala urusan TU & umum dijabat oleh M. Afif Al Makruf, B.A,

M.Kom dengan melaksanakan urusan ketatausahaan seperti arsip, penyiapan rapat, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum, kepala urusan keuangan dijabat oleh Sholeh yang membawahi seorang staf kepala urusan keuangan dijabat oleh Nita Andriani, S.Pd dengan tugas mengurus administrasi keuangan, sumber pendapatan dan pengeluaran, serta pertanggungjawaban keuangan desa dan kepala urusan perencanaan yang dijabat oleh Agus Salim dengan tugas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa), melakukan monitoring evaluasi program serta penyusunan laporan. Terdapat posisi kepala seksi yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis atau operasional pemerintah desa. Kepala seksi kesejahteraan dijabat oleh Sukar dengan membawahi seorang staf kepala seksi kesejahteraan yang dijabat oleh Dian Fathur Rohman, S.Pd dengan tugas untuk melaksanakan pembangunan pendidikan, kesehatan, organisasi desa, sarana dan prasarana Desa Tanjung, kepala seksi pelayanan dijabat oleh Dul Rakhman dengan membawahi seorang staf kepala seksi pelayanan dijabat oleh Abdul Muis S.Pd I dengan tugas untuk melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa Tanjung, serta kepala seksi pemerintahan yang dijabat oleh Suharti dengan tugas melaksanakan manajemen tata praja pemerintah dan menyusun rancangan regulasi desa. Kepala dusun dijabat oleh Mintono dan Kemadi yang bertugas untuk melakukan pembinaan ketertiban, ketentraman, serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dalam suatu kewilayahan desa yang disebut dusun.

## **B. Potensi Desa Wisata di Desa Tanjung**

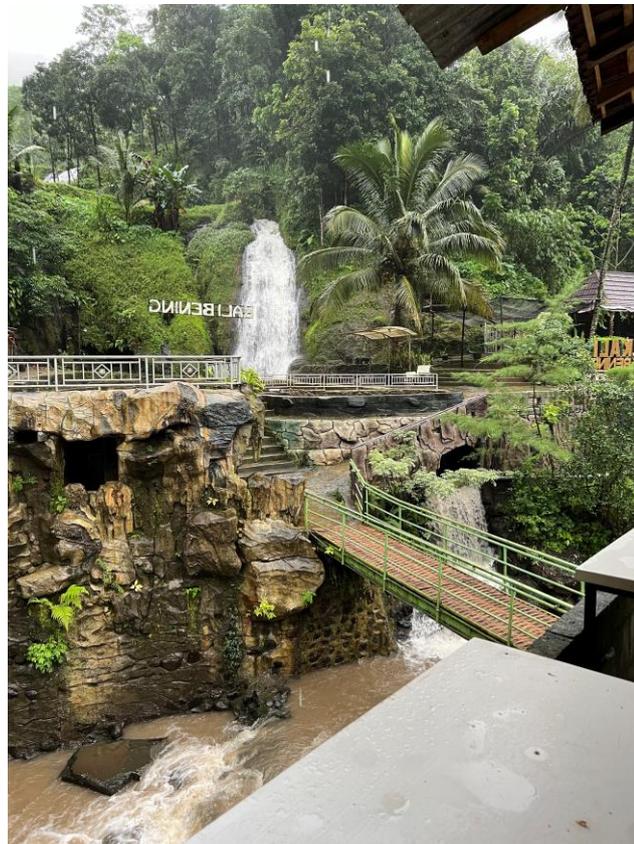
Desa Tanjung merupakan sebuah desa yang memiliki banyak potensi untuk menjadi desa wisata di wilayah Kabupaten Jepara. Hal ini didukung oleh letak geografis Desa Tanjung yang berada di wilayah pegunungan dengan memiliki air terjun, sungai, dan hutan yang menyuguhkan pemandangan alam yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat Desa Tanjung telah berupaya dalam hal pembangunan desa wisata Desa Tanjung dengan adanya beberapa tempat wisata yang ada di Desa Tanjung. Terdapat beberapa wisata alam di Desa Tanjung yang sudah ada sejak dahulu yakni Air Terjun Jurang Nganten, Air Terjun Kalen Wates dan Kedung Plumpang tetapi masih dalam kondisi yang sederhana dan tidak diberdayakan dengan baik.

Semenjak tahun 2016, yaitu ketika periode kepala Desa Tanjung mulai dijabat oleh Bapak Dwi Ganoto bersama dengan antusiasme para pemuda kelompok sadar wisata mulai ada gagasan untuk memanfaatkan potensi alam di Desa Tanjung menjadi tempat wisata

yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat sekitar. Terdapat beberapa wisata yang telah dibangun sejak periode jabatan Bapak Dwi Ganoto yaitu Wisata Kali Bening, Wisata Watu Lawang dan Bukit Tanjung. Wisata Kali Bening merupakan wisata alam yang berada di Dukuh Ngerbu dengan menawarkan pemandangan sungai, air terjun dan sejuknya udara yang masih asri menjadi salah satu wisata di Kabupaten Jepara yang memiliki daya tarik wisata terutama bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam.

Pada awal tahun 2016, Wisata Kali Bening mulai dilakukan penataan dan pembangunan agar dapat dikunjungi wisatawan secara aman dan nyaman. Walaupun sektor pariwisata pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan, Wisata Kali Bening mampu bertahan dan melewati penurunan omzet yang terjadi. Kondisi Wisata Kali Bening pada tahun 2022 sudah memiliki banyak atraksi wisata yang dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Atraksi yang terdapat di Wisata Kali Bening diantaranya adalah adanya *gazebo* yang disediakan untuk umum sehingga dapat digunakan sebagai tempat bersantai. Atraksi lainnya yaitu terdapat *café* dengan pemandangan langsung menghadap sungai dan air terjun di Wisata Kali Bening dengan berbagai macam pilihan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau sehingga dapat digunakan sebagai tempat berkumpul dan juga tempat untuk belajar atau bekerja dengan indahnya pemandangan alam. Para wisatawan juga dapat berenang atau bermain air di bawah air terjun yang ada di Wisata Kali Bening yang diawasi dan dipantau juga oleh petugas yang berada di sekitar. Akses jalan menuju Wisata Kali Bening sudah dilalui jalan beraspal sehingga tidak ada kendala untuk transportasi wisatawan yang mengunjungi Wisata Kali Bening.

Gambar 3. 2 Wisata Kali Bening



Wisata lainnya yaitu Wisata Bukit Tanjung yang terletak di Desa Tanjung yang berada di ketinggian dengan menawarkan berbagai spot foto yang *instagramable* menjadi daya tarik wisatawan. Wisata ini baru diresmikan oleh Kepala Desa Dwi Ganoto pada bulan April 2019 silam. Panorama yang disajikan yaitu keindahan nuansa alam lereng Gunung Muria yang masih asri dan alami. Daya tarik di Wisata Bukit Tanjung ini yaitu ada berbagai macam spot foto yang keren, seperti balon udara untuk spot foto, ada bunga warna-warni untuk spot foto, dan ada jembatan bambu dengan latar pemandangan lereng gunung yang hijau. Wisatawan yang berkunjung ke Wisata Bukit Tanjung perlu menyiapkan sejumlah uang untuk membayar tiket masuk. Harga tiket masuk Wisata Bukit Tanjung dipatok dengan kisaran harga Rp 5.000 untuk setiap orang dan harga parkir kendaraan yaitu Rp 2.000 untuk setiap kendaraan. Dengan harga yang terjangkau dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk semua kalangan agar dapat mengunjungi wisata tersebut. Selain pemandangan, wisatawan juga dapat melakukan wisata kuliner karena di Wisata Bukit Tanjung tersedia berbagai macam makanan tradisional seperti lempur ketan, horog-horog, apem, getuk, gemblong, dan makanan khas Desa Tanjung lainnya. Wisatawan dapat

mencicipi makanan tradisional ini sembari menikmati keindahan pemandangan lereng Gunung Muria di gubuk atau *gazebo* yang terdapat di kawasan Wisata Bukit Tanjung.

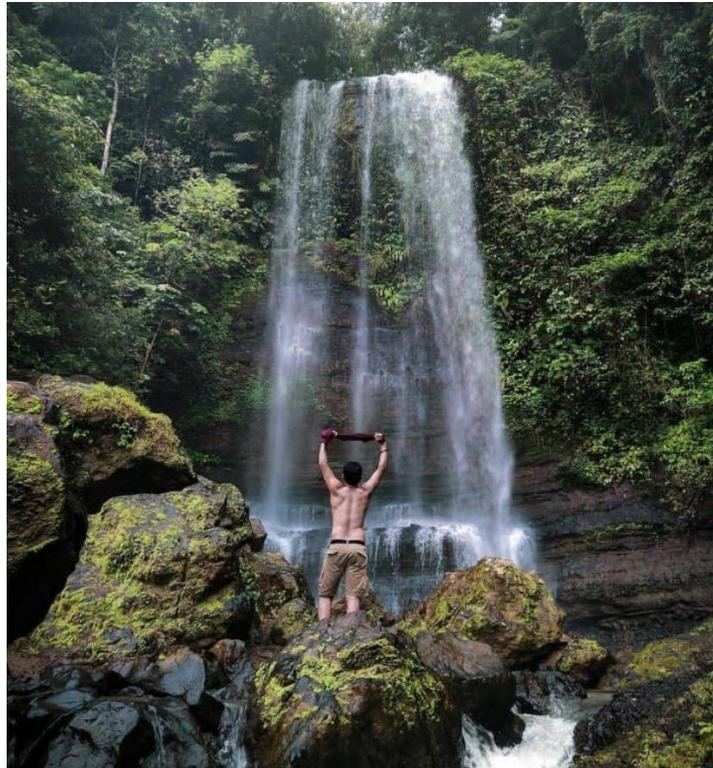
Gambar 3. 3 Wisata Bukit Tanjung



Sumber: *Official Account Facebook Info Seputar Tanjung*

Wisata lain yang terdapat di Desa Tanjung yaitu Air Terjun Jurang Nganten yang memiliki pemandangan alam sejuknya air di sekitar tempat wisata tersebut. Jaraknya lebih jauh dari melewati Wisata Bukit Tanjung. Wisata ini sudah ada sejak lama tetapi kurang mendapat perhatian dari warga sekitar bahwa hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan lainnya. Wisata Air Terjun Jurang Nganten mulai diperhatikan dengan mudahnya akses melalui jalan beraspal menuju ke wisata tersebut tetapi untuk menuju ke air terjunnya dengan berjalan kaki dikarenakan untuk menjaga kealamian di sekitar air terjun ini. Wisatawan yang ingin berkunjung ke Air Terjun Jurang Nganten perlu menyiapkan uang sebesar Rp 5.000 untuk tiket masuk setiap orang. Air Terjun Jurang Nganten menawarkan sensasi kesegaran dari aliran air yang mengalir dari dinding bukit. Aliran air terjun ini masih bersih dan segar sehingga dapat bermain air dan merasakan sejuknya udara di tempat yang belum terpapar polusi asap.

Gambar 3. 4 Wisata Air Terjun Jurang Nganten



Wisata lainnya yang baru saja diresmikan oleh Kepala Desa Dwi Ganoto pada 3 Oktober 2021 yaitu Wisata Watu Lawang. Wisata ini menawarkan keindahan alam dimulai dari pertama masuk akan ada area persawahan hingga sungai. Yang paling istimewa di wisata ini yaitu dua bongkahan batu besar dekat pinggiran sungai dengan sisinya menyerupai pintu sehingga dinamakan Watu Lawang atau dalam Bahasa Indonesia adalah Pintu Batu. Satu batu memiliki bentuk mirip dengan pintu dan satu batu lainnya merupakan punden sesepuh desa. Punden tersebut merupakan tempat yang disakralkan oleh masyarakat karena pada zaman dahulu ada sesepuh desa yang hilang saat usai mencuci baju. Sampai saat ini masyarakat masih rutin memberikan sesajen di punden tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada sesepuh desa. Di sekitar kawasan Wisata Watu Lawang dapat dijadikan area berkemah/*camping ground*. Selain itu di wisata watu lawang juga terdapat kolam renang yang dapat dinikmati oleh wisatawan untuk berenang. Masyarakat Desa Tanjung kompak untuk rutin mengadakan *event* di wisata tersebut setiap bulan dikenal dengan Festival Desa Mitra. Festival ini dimeriahkan dengan kreativitas masyarakat Desa Tanjung mulai dari seni tari, tongtheek, seni lukis, layang-layang dan makanan olahan khas Desa Tanjung. Dengan adanya festival ini membuka kesempatan untuk masyarakat Desa Tanjung untuk mendapatkan penghasilan dan dapat menarik

wisatawan untuk datang berkunjung ke Wisata Watu Lawang. Belum ada biaya untuk tiket masuk ke wisata ini, tetapi ada biaya parkir sebesar Rp 3.000. Masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi yaitu akses jalan menuju Wisata Watu Lawang masih berupa tanah dengan sedikit bebatuan dengan jalanan cukup ekstrim.

Gambar 3. 5 Wisata Watu Lawang



Sumber: *Official Account Facebook Info Seputar Tanjung*

Gambar 3. 6 Kolam Renang Wisata Watu Lawang



Sumber: *Official Account Facebook Info Seputar Tanjung*

Seiring dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung dan berkembangnya inovasi ekonomi kreatif yang dicetuskan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di Desa Tanjung menjadikan Desa Tanjung dinobatkan menjadi desa wisata melalui Keputusan Bupati Jepara No. 56 Tahun 2018. Desa Tanjung juga berhasil meraih predikat Desa Terbaik di Kabupaten Jepara tahun 2022 dan mendapatkan hadiah Rp 1 Miliar serta akan mewakili Jepara dalam Lomba Desa Tingkat Jateng mewakili Kabupaten Jepara. Dengan berhasilnya Desa Tanjung membuktikan bahwa dengan adanya semangat dan optimis dari Kepala Desa dan didukung oleh seluruh kalangan masyarakat dapat mewujudkan kemandirian desa melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Desa Tanjung. Hal ini dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk desa-desa lain yang berada di Kabupaten Jepara maupun seluruh desa di Indonesia untuk selalu bangkit dan mewujudkan ekonomi kreatif untuk menambah pendapatan desa serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

## **BAB IV**

### **LANDASAN POLITIK DAN HUKUM PEMBANGUNAN DESA WISATA TANJUNG**

Desa apabila dilihat dari sejarahnya yaitu bentuk pemerintahan yang otonom serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. tetapi pasca Indonesia merdeka posisi desa secara empiris bergantung kepada politik hukum penguasa, kondisi tersebut lah yang membuat posisi desa menjadi bagian dari pemerintah daerah. Dengan lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa hal tersebut dinilai sebagai upaya untuk dapat mengembalikan kewenangan desa untuk dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri yang didalamnya mencakup kewenangan dalam melakukan pembangunan desa. Secara substansi UU No.6 tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri termasuk kewenangan untuk menyusun serta melaksanakan pembangunan desa. UU No.6 tahun 2014 ini memberikan kewenangan secara rekognisi serta subsidiaritas demi terwujudnya pembangunan desa yang didasarkan kepada prakarsa, tuntutan serta kebutuhan masyarakat desa (Herdiana, 2019).

Jika dibandingkan dengan UU No. 32 tahun 2004, desa hanya menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi kepada pembangunan desa yang tidak mencerminkan terhadap aspirasi, tuntutan serta kebutuhan masyarakat desa. Pada UU No. 32 tahun 2004 menggunakan pendekatan sentralistis atau kewenangan perencanaan pembangunan berada pada pemerintah daerah. Kini dengan hadirnya UU No. 6 tahun 2014 hal tersebut menjadikan pendekatan sentralistis menjadi pendekatan partisipatif atau dengan kata lain yaitu (participatory development planning) “kewenangan desa”. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 26 ayat 2 butir m yang berbunyi “Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Kemudian hal tersebut dipertegas kembali dalam pasal 113 ayat 1 butir d yang berbunyi “ Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif”. Sehingga dengan hadirnya undang undang nomor enam tahun 2014 tentang Desa hal tersebut telah mengkonstruksikan Kewenangan perencanaan pembangunan desa di mana pemerintah desa serta masyarakat memiliki hak untuk dapat menentukan arah perencanaan pembangunan desa mulai dari awal tahap perencanaan pembangunan desa sampai pada akhir pembangunan desa. Berikut

akan dilampirkan perbedaan paradigma UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014.

Tabel 4. 1 Perbedaan paradigma UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014

No	Aspek	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
1.	Asas Utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
2.	Pemegang Kewenangan	Pemerintah Daerah	Desa (Pemerintah Desa dan Masyarakat)
3.	Konsep Terkait	Hubungan desa-kota, pertumbuhan, infrastruktur, kawasan, sektoral dan lain-lain.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipas, pemberdayaan dan lain-lain.
4.	Skema Kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan serta pelaksanaan kemudian didukung alokasi dana. Kemudian pusat melakukan fasilitasi, supervisi, akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana serta kontrol lokal.
5.	Peran Pemerintah Daerah	Merencanakan, membiayai serta melaksanakan.	Fasilitasi, supervisi, dan pengembangan kapasitas desa.
6.	Model Pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i> .	<i>Village driven development</i>

Sumber: Herdiana (2019)

Berdasarkan tabel tersebut telah dijelaskan mengenai beberapa perubahan antara UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 6 tahun 2014. Pada UU No. 6 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa desa diberikan ruang yang begitu besar untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Berangkat dari hadirnya UU No. 6 tahun 2014 hal tersebut yang menjadi pemicu kepala desa tanjung untuk dapat melakukan pembangunan pada sektor pariwisata dengan mengutamakan prakarsa serta potensi yang dimiliki desanya. Dalam melakukan suatu pembangunan desa, pemerintah desa tidak serta merta dapat memutuskan serta

mewujudkannya sendiri, melainkan harus juga melibatkan pihak dari pemerintah kabupaten. Salah satunya yaitu bupati. Bupati sebagai pemegang urusan pemerintahan tertinggi tingkat kabupaten, memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu tugas dari Bupati yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan kabupaten berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Sehingga dengan kuasa yang diberikan kepada Bupati, untuk dapat mengatur daerah otonomnya, bupati dapat membuat perda maupun raperda yang menghasilkan kebijakan atau aturan dalam mengurus wilayahnya. Tidak hanya pemerintah desa serta pemerintah kabupaten yang terlibat, dalam mewujudkan suatu pembangunan yang ada di desa juga melibatkan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam urusan daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Wisata Tanjung, pemerintah Desa Tanjung tidak dapat menentukannya sendiri, melainkan melalui beberapa proses kemudian disahkan oleh Bupati Jepara selaku pemilik kewenangan. Sebelum diajukan untuk menjadi desa wisata kepada pihak pemerintah kabupaten, pemerintah Desa Tanjung juga melibatkan beberapa supradesa dalam prosesnya. seperti pemerintah Kecamatan Pakis Aji, pemerintah kabupaten Jepara, serta pemerintah provinsi Jawa Tengah.

”Dalam mewujudkan Desa Tanjung sebagai desa wisata tentu kami tidak dapat berjalan sendiri, melainkan melibatkan juga supradesa seperti, pemerintah Kecamatan Pakis Aji, pemerintah kabupaten Jepara, serta pemerintah provinsi Jawa Tengah” (wawancara, Bapak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Melalui pernyataan yang telah diutarakan oleh kepala Desa Tanjung tersebut, maka dapat kita lihat bahwa dalam mewujudkan suatu pembangunan pariwisata pemerintah desa harus berkolaborasi dengan berbagai pihak kemudian dari kolaborasi yang dilakukan maka terbentuk relasi kuasa antar instansi tersebut.

Relasi kuasa yang terbentuk dari beberapa stakeholder tersebut kemudian terbentuk sebuah konsep kolaboratif yang bertujuan untuk tercapainya sebuah pembangunan pariwisata. Karena antara Disporapar Prov. Jateng dengan Disparbud Kab. Jepara memiliki visi yang sama yaitu ingin mewujudkan Jepara yang menjadi salah satu bagian daerah dari provinsi Jawa Tengah untuk menjadi tujuan wisata untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Maka dari itu kedua dinas tersebut harus berkolaborasi sesuai

dengan tupoksinya masing-masing dalam agenda pembangunan pariwisata. Serta pemerintah Desa Tanjung yang menjadi salah satu bagian dari Kab. Jepara dalam mewujudkan pembangunan pariwisata harus melibatkan Disparbud Kab. Jepara.

Dalam pembangunan Desa Wisata Tanjung hal tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan kepariwisataan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 06 Tahun 2018 yang berbunyi "Visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu terwujudnya kabupaten Jepara sebagai daerah tujuan wisata unggulan yang dinamis, kompetitif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya dan buatan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kabupaten Jepara".

Dengan visi atau tujuan tersebut, maka terciptalah sinergitas antara pemerintah Desa Tanjung dengan pemerintah kabupaten Jepara agar masing-masing dari tujuan politik pembangunannya dapat tercapai.

"Dalam mewujudkan Desa Tanjung sebagai desa wisata tentu kami terus berupaya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan beberapa supradesa karena untuk mewujudkan suatu pembangunan maka sangat dibutuhkan sinergitas antar supradesa" (wawancara, Bapak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Dalam mencapai target Desa Tanjung menjadi desa wisata setelah terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Tanjung, kemudian pemerintah Desa Tanjung sebagai aktor yang memiliki kuasa pada wilayah pemerintahan Desa Tanjung melakukan *lobbying* kepada pemerintah Kecamatan Pakis Aji untuk mendapatkan persetujuan maupun arahan karena Desa Tanjung berada pada wilayah pemerintahan pakis aji sebagai supradesa paling terdekat. Hal ini ditegaskan oleh kepala Desa Tanjung:

"Dalam menunjang Desa Tanjung menjadi desa wisata tentu kita melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kecamatan Pakis Aji, kemudian dari pemerintah pakis aji memberikan binaan kepada kami mengenai dalam pembangunan desa wisata prosedur serta tahapannya itu meliputi apa saja" (wawancara, Bapak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Setelah dilakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Pakis Aji kemudian pemerintah Desa Tanjung mendapatkan arahan untuk mempersiapkan baik secara administrasi maupun kondisi lapangan wisata, kemudian pemerintah Desa Tanjung melakukan koordinasi kepada pihak pemerintah kabupaten Jepara melalui Disparbud kabupaten Jepara.

”Setelah mempersiapkan secara administratif maupun persiapan lapangan, kami kemudian melakukan pengajuan untuk pendeklarasian Desa Tanjung sebagai desa wisata kepada Disparbud Kab. Jepara” (wawancara, Bapak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Kemudian setelah pengajuan kepada Disparbud oleh pemerintah Desa Tanjung, kemudian dari pihak Disparbud Kabupaten Jepara melakukan proses verifikasi serta melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

”Setelah beberapa proses serta tahapan yang telah kami lalui kemudian Desa Tanjung diresmikan sebagai desa wisata melalui SK NO. 59 Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Bupati Jepara” (wawancara, Bapak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Kemudian setelah diresmikannya Desa Tanjung sebagai desa wisata, banyak hal positif yang dirasakan oleh pemerintah Desa Tanjung maupun masyarakat Desa Tanjung seperti banyaknya bantuan yang turun dari pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten Jepara. Hal tersebut ditegaskan oleh pernyataan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung:

”Setelah diresmikannya Desa Tanjung sebagai desa wisata banyak hal positif yang kami rasakan seperti mendapatkan bantuan dari Disparbud kabupaten Jepara berupa pengadaan musholla serta MCK di kawasan Wisata Kali Bening” (wawancara Bapak Nur Sahid, 4 Maret 2023).

Kemudian hal lain dijelaskan kembali oleh salah satu pengurus Pokdarwis Desa Tanjung:

”Setelah ditetapkannya Desa Tanjung sebagai desa wisata, pokdarwis Desa Tanjung sering mendapatkan undangan untuk mengikuti acara penyuluhan terkait kepariwisataan baik dari Disparbud Kab. Jepara maupun Disporapar Prov. Jawa Tengah” (wawancara Agus Salim, 26 Februari 2023).

UU No. 6 tahun 2014 telah memberikan ruang kepada desa untuk melaksanakan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif. Dalam hal ini masyarakat menjadi subjek sekaligus objek dari pembangunan desa yang harus mengetahui berbagai kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat. Di dalam UU No. 6 tahun 2014 Pasal 78 Ayat (3) telah dijelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan atas dasar kebersamaan, kekeluargaan serta gotong royong. Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut memiliki artian bahwa dalam

melaksanakan pembangunan tidak hanya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat semata, tetapi dalam prosesnya juga harus menjunjung nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai itulah yang seharusnya dijadikan landasan dalam melaksanakan pembangunan desa, termasuk di dalamnya dijadikan sebagai pedoman terhadap pengaturan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan beberapa destinasi wisata yang ada di desa Tanjung, pemerintah desa Tanjung juga mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan serta gotong royong. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan oleh kepala desa Tanjung:

”Dalam melaksanakan pembangunan beberapa destinasi wisata yang ada di desa tanjung kami dari pihak pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa Tanjung saling bahu membahu untuk mewujudkan destinasi wisata yang menarik di desa Tanjung. Pada saat melaksanakan pembangunan destinasi wisata kali bening contohnya, kami melaksanakan gotong royong bersama masyarakat untuk melakukan pembersihan sekitar aliran sungai, kemudian melakukan penanaman pohon dan melakukan pembangunan infrastruktur lainnya di wisata tersebut” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan serta gotong royong tersebut menjadi terdistorsi ketika pembangunan desa diartikan kepada pemberian kewenangan kepada pemerintah desa sepenuhnya serta bertanggung jawab dalam keseluruhan pelaksanaan pembangunan desa. Pengaturan tersebut pada hakikatnya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah desa sebagai representasi negara di desa yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya termasuk di dalamnya untuk melaksanakan pembangunan desa. Tetapi pada praktiknya, besarnya kewenangan dari pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang berimplikasi kepada para pemangku kepentingan lainnya yang ada di desa, yang mana diposisikan sebagai inferior dibanding dengan pemerintah desa dalam perihal pembangunan desa, yang di dalamnya tercakup peran masyarakat dalam pembangunan desa.

Kemudian pada tahap perencanaan pembangunan yang mana pada tahap tersebut merupakan tahap awal dari pelaksanaan pembangunan desa, pada tahap tersebut yang akan menentukan arah pembangunan desa. Pada tahap tersebut keterlibatan masyarakat hanya terdapat pada dua forum yaitu pada forum musyawarah desa dan pada forum Musrenbang desa di mana perwakilan dari masyarakat diberikan hak untuk terlibat dalam proses menyampaikan gagasan serta tuntutan dalam pembangunan desa.

”Melalui musyawarah desa bersama saya serta perangkat desa, BPD, dari masyarakat yang diwakili oleh RT/RW setempat, kami tentu mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak dalam rencana pembangunan yang akan kami lakukan di Desa Tanjung. Kemudian beberapa aspirasi dari musdes kita simpulkan lalu kita masukkan ke RPJMDes” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Kemudian pada proses awal seperti proses penyetoran program yang akan dilaksanakan di desa serta penetapan pagu indikatif masyarakat memiliki peran yang cukup minim bahkan tidak dilibatkan sama sekali. Padahal pada proses awal tersebut merupakan proses yang cukup penting dikarenakan tidak hanya menjadi keharusan masyarakat untuk mengetahui serta terlibat dari awal dalam perencanaan pembangunan tetapi kehadiran masyarakat akan mampu menciptakan transparansi serta akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kehadiran masyarakat pada proses menyusun rencana pembangunan desa termasuk di dalamnya membahas mengenai rencana anggaran yang akan diterima desa dianggap sebagai salah satu cara masyarakat untuk dapat memantau transparansi pada program pembangunan desa. Dengan demikian kehadiran masyarakat dalam proses pembangunan akan menjadi pemantau bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik dan transparan.

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa juga menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk dapat melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa yang kemudian dijelaskan kembali dalam Permendagri Tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa hasil pemantauan tersebut akan disampaikan dalam forum Musrenbang Desa. Tetapi yang menjadi permasalahan yaitu bentuk dari hasil pemantauan tersebut serta pelaporan yang disampaikan melalui forum musyawarah desa menjadi tidak proporsional karena dalam forum tersebut posisi masyarakat sebagai pihak yang diundang serta memiliki posisi yang inferior dibanding pemerintah desa. Hal tersebut tentu akan memunculkan bias terhadap pemantauan serta pelaporan masyarakat tersebut.

## BAB V

### PROSES PEMBANGUNAN DESA WISATA TANJUNG

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat pedesaan yaitu kemiskinan yang tersebar luas, ketimpangan yang semakin meningkat, laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, hal tersebutlah yang membuat kehidupan di pedesaan seringkali mengalami stagnasi serta kemunduran kehidupan ekonomi pada daerah pedesaan. Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan yang dimulai dari daerah pedesaan diyakini sebagai inti dari pembangunan nasional. Tanpa adanya pembangunan pedesaan terintegrasi (*integrated rural development*), pertumbuhan industri tidak dapat berjalan secara lancar serta akan tercipta berbagai ketimpangan internal dalam perekonomian tersebut. Berdasarkan letak geografisnya, daerah pedesaan lebih unggul dari daerah perkotaan karena memiliki potensi alam yang cukup melimpah. Dengan potensi alam yang lebih unggul, maka dibutuhkan peran dari pemerintah desa bersama masyarakat untuk mewujudkan suatu pembangunan salah satunya yaitu pembangunan desa wisata (Todaro, 2011).

Maka guna mendukung pembangunan nasional, pemerintah Desa Tanjung melakukan pembangunan pada sektor pariwisata dengan pemanfaatan potensi alam guna menunjang pembangunan nasional.

#### A. Pembangunan Desa Wisata

Desa Tanjung merupakan salah satu desa di Kabupaten Jepara yang terletak dengan ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.731 Ha (Tanjung, 2022). Berdasarkan letak secara geografisnya, Desa Tanjung memiliki potensi alam yang indah, hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk membuat beberapa destinasi wisata yang mengandalkan potensi alam diantaranya yaitu, air terjun jurang nganten, wisata bukit tanjung, wisata alam watu lawang, dan wisata alam kalibening. Hal tersebut dijelaskan oleh kepala Desa Tanjung periode 2016-2022 yang menyatakan :

”Sejak saya mendapatkan amanat untuk memimpin Desa Tanjung pada 19 Desember 2016 lalu, dengan melihat potensi alam yang dimiliki desa ini, saya langsung melakukan gebrakan dengan melakukan pembangunan empat wisata diantaranya yaitu Watu Lawang,

Air Terjun Jurang Nganten, Bukit Tanjung, dan Kali Bening. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu dengan membentuk kelompok masyarakat sadar wisata (POKDARWIS) untuk membantu dalam hal pembangunan serta pengelolaan wisata yang ada di Desa Tanjung, karena saya sangat sadar betul kalau pembangunan wisata ini saya urus hanya dengan pihak perangkat desa saja tentu tidak akan berjalan dengan baik karena kami juga memiliki fokus pada bidang lainnya” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Kemudian hal tersebut dijelaskan kembali oleh salah satu pengurus BumDes:

”Desa Wisata Tanjung bermula dari potensi keindahan alam yang dimiliki oleh Desa Tanjung, sehingga dari beberapa masyarakat yang mempunyai keinginan untuk melakukan pembangunan wisata. Hal tersebut yang sejalan dengan keinginan kepala desa kami dan masyarakat, kemudian kami bersinergi dengan langkah awal membentuk kelompok masyarakat sadar wisata” (wawancara Pak Dian Fatur Rohman, 26 Februari 2023).

Dalam membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (POKDARWIS), pemerintah Desa Tanjung selalu mengutamakan pada dimensi sosial. Hal tersebut dapat terlihat dari upaya yang dilakukan dalam membentuk pokdarwis tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin maupun usia serta fokus terhadap pengukuhan suatu komunitas yang melibatkan pemuda di dalamnya. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu pengurus pokdarwis desa tanjung:

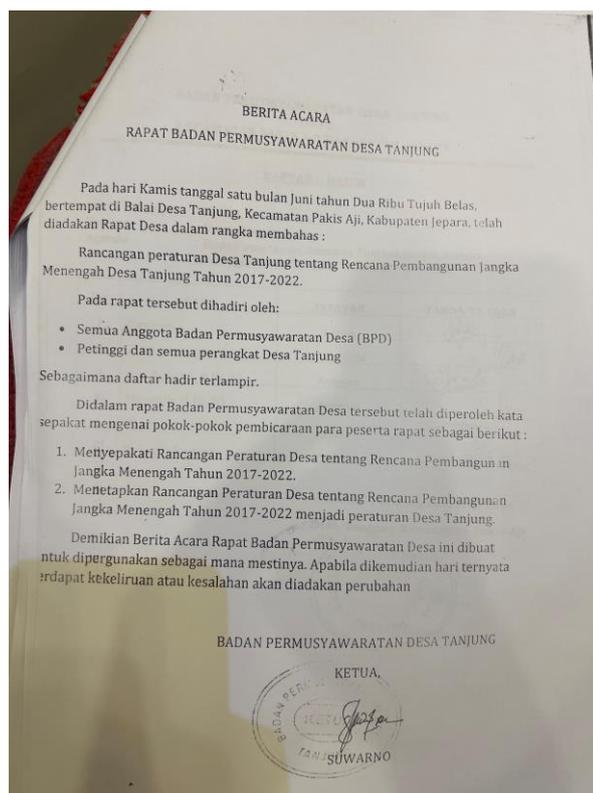
”Dalam kepengurusan pokdarwis dapat dikatakan semua kalangan terlibat, baik dari pemuda maupun orang tua. Hal tersebut cukup memberi dampak positif bagi kelompok kami karena dengan adanya pengurus dari berbagai usia bisa saling sharing atau memberi masukan dari sudut pandang orang tua maupun pemuda” (wawancara Pak Agus Salim, 26 Februari 2023).

Pemerintah desa tentu memiliki hak serta kewenangan dalam pembentukan perencanaan. Perencanaan tersebut biasanya meliputi rencana maupun konsep pembangunan, dana dalam pembangunan, serta peraturan yang akan ditetapkan. Pemerintah desa juga berperan sebagai koordinator dalam menentukan pembangunan di desanya. Pemerintah desa sebagai koordinator tentu memiliki hak untuk menentukan berbagai perencanaan demi kesuksesan pembangunan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka koordinasi, saran, maupun masukan dari berbagai elemen tentu sangat dibutuhkan.

”Melalui musyawarah desa bersama saya serta perangkat desa, BPD, dari masyarakat yang diwakili oleh RT/RW setempat, kami tentu mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak dalam rencana pembangunan yang akan kami lakukan di Desa Tanjung. Kemudian beberapa aspirasi dari musdes kita simpulkan lalu kita masukkan ke RPJMDes” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Kemudian setelah melalui musyawarah desa, telah memperoleh berbagai rencana pembangunan yang akan dilakukan di Desa Tanjung. Maka kepala Desa Tanjung beserta perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) melakukan rapat yang bertujuan untuk menyepakati serta menetapkan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Hal tersebut terlampir berita acara dalam penetapan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Tanjung tahun 2017-2022 di bawah ini.

Gambar 4. 1 Berita Acara Rapat RPJMDes Desa Tanjung Tahun 2017-2022



Sumber : RPJMDes Tanjung 2017-2022

Dalam RPJMDes tersebut telah ditetapkan berbagai rencana pembangunan di Desa Tanjung. Salah satunya yaitu terkait rencana pembangunan pada sektor pariwisata.

Berikut akan dilampirkan berbagai rencana pembangunan pada sektor pariwisata:

Tabel 4. 2 Rencana Pembangunan Desa Tanjung Sektor Pariwisata

No.	Uraian	Anggaran	Sumber
1.	Pembangunan Objek Desa Wisata Tanjung	Rp. 900.000.000,-	ADD/DD
2.	Pengembangan Desa Wisata	Rp. 250.000.000,-	ADD/DD
3.	Pembinaan Kader Pokdarwis	Rp. 60.000.000,-	ADD/DD
4.	Pembangunan Jalan Aspal Air Terjun Jurang Nganten	Rp. 700.000.000,-	APBD
5.	Pembangunan Rumah Punden Jati Kuwung	Rp. 30.000.000,-	ADD/DD

Sumber: RPJMDes Tanjung 2017-2022

Tabel diatas merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa dalam proses pembangunan desa wisata. Pemerintah Desa Tanjung merupakan motor penggerak dari rencana pembangunan tersebut karena pemerintah Desa Tanjung sebagai fasilitator dalam penyediaan dana dalam pembangunan. Anggaran tersebut berasal dari pihak swasta/investor serta dana desa yang didapatkan dari pemerintah pusat kemudian disalurkan kepada pemerintah Desa Tanjung guna menunjang pembangunan desa guna pengaplikasian Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri.

Bermula pada pembangunan Wisata Kali Bening dari tahun 2017 serta Wisata Air Terjun Jurang Nganten. Kemudian pada tahun 2018 Pemerintah Desa Tanjung ingin mendeklarasikan desanya menjadi desa wisata. Hal tersebut dimulai dengan dilakukan musyawarah desa oleh pemerintah Desa Tanjung bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat yang diwakili oleh ketua RT. Kemudian setelah diperoleh kesepakatan dari musyawarah desa kemudian pemerintah Desa Tanjung mengajukan desanya untuk ditetapkan sebagai desa wisata kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.

Untuk mewujudkan suatu desa menjadi desa wisata, berdasarkan buku pedoman desa wisata (2021), Desa Tanjung harus melewati tiga proses tahapan dalam penetapan desa wisata diantaranya:

1. Pengusulan penetapan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kepada pemerintah desa yang disetujui melalui musyawarah.
2. Hasil dari musyawarah tersebut merupakan keputusan kepala desa yang kemudian disampaikan kepada pengembangan desa wisata serta kepada organisasi perangkat daerah yang menangani pariwisata atau dalam hal ini dinas pariwisata.
3. Organisasi perangkat daerah kemudian melakukan verifikasi serta melakukan penilaian secara langsung untuk memastikan kelayakan atau uji kelayakan dan kemudian akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati/Walikota.

Berdasarkan tahapan yang telah dijelaskan, setelah melewati ketiga proses tersebut, pada akhirnya Desa Tanjung resmi mendeklarasikan diri sebagai desa wisata pada tahun 2018. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Tanjung kala itu:

”Alhamdulillah setiap proses yang telah kami lalui bersama Perangkat Desa, BPD, Pokdarwis, Investor, serta masyarakat Desa Tanjung mulai dari awal pembangunan hingga pengelolaan akhirnya pada tahun 2018 desa kami resmi menjadi desa wisata melalui SK No. 59 Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Bupati Jepara kala itu Bapak K.H. Ahmad Marzuqi, S. E.” (wawancara, Bapak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Kemudian setelah diresmikan sebagai desa wisata melalui SK Bupati Jepara No. 59 Tahun 2018. Pemerintah Desa Tanjung bersama masyarakat kemudian melakukan pengembangan dengan melakukan pembangunan destinasi lain seperti Wisata Bukit Tanjung serta Wisata Watu Lawang. Wisata Bukit Tanjung pada mulanya hanya sebuah lahan yang berada pada perbukitan. Wisata Bukit Tanjung yang terletak di Desa Tanjung yang berada di ketinggian dengan menawarkan berbagai spot foto yang *instagramable* menjadi daya tarik wisatawan. Wisata ini baru diresmikan oleh Kepala Desa Dwi Ganoto pada bulan April 2019 silam. Panorama yang disajikan yaitu keindahan nuansa alam lereng Gunung Muria yang masih asri dan alami. Daya tarik di Wisata Bukit Tanjung ini yaitu ada berbagai macam spot foto yang keren, seperti balon udara untuk spot foto, ada bunga warna-warni untuk spot foto, dan ada jembatan bambu dengan latar pemandangan lereng gunung yang hijau. Wisatawan yang berkunjung ke Wisata Bukit Tanjung perlu menyiapkan sejumlah uang untuk membayar tiket masuk. Harga tiket masuk Wisata Bukit

Tanjung dipatok dengan kisaran harga Rp 5.000 untuk setiap orang dan harga parkir kendaraan yaitu Rp 2.000 untuk setiap kendaraan. Dengan harga yang terjangkau dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk semua kalangan agar dapat mengunjungi wisata tersebut. Selain pemandangan, wisatawan juga dapat melakukan wisata kuliner karena di Wisata Bukit Tanjung tersedia berbagai macam makanan tradisional seperti lemper ketan, horog-horog, apem, getuk, gemblong, dan makanan khas Desa Tanjung lainnya. Wisatawan dapat mencicipi makanan tradisional ini sembari menikmati keindahan pemandangan lereng Gunung Muria di gubuk atau *gazebo* yang terdapat di kawasan Wisata Bukit Tanjung.

Kemudian wisata yang dibangun setelah Desa Tanjung resmi menjadi desa wisata yaitu Wisata Watu Lawang. Wisata Watu Lawang baru saja diresmikan oleh Kepala Desa Dwi Ganoto pada 3 Oktober 2021 yaitu Wisata Watu Lawang. Wisata ini menawarkan keindahan alam dimulai dari pertama masuk akan ada area persawahan hingga sungai. Yang paling istimewa di wisata ini yaitu dua bongkahan batu besar dekat pinggir sungai dengan sisinya menyerupai pintu sehingga dinamakan Watu Lawang atau dalam Bahasa Indonesia adalah Pintu Batu. Satu batu memiliki bentuk mirip dengan pintu dan satu batu lainnya merupakan punden sesepuh desa. Punden tersebut merupakan tempat yang disakralkan oleh masyarakat karena pada zaman dahulu ada sesepuh desa yang hilang saat usai mencuci baju. Sampai saat ini masyarakat masih rutin memberikan sesajen di punden tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada sesepuh desa. Di sekitar kawasan Wisata Watu Lawang dapat dijadikan area berkemah/*camping ground*. Masyarakat Desa Tanjung kompak untuk rutin mengadakan *event* di wisata tersebut setiap bulan dikenal dengan Festival Desa Mitra. Festival ini dimeriahkan dengan kreativitas masyarakat Desa Tanjung mulai dari seni tari, tongtheek, seni lukis, layang-layang dan makanan olahan khas Desa Tanjung. Dengan adanya festival ini membuka kesempatan untuk masyarakat Desa Tanjung untuk mendapatkan penghasilan dan dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Wisata Watu Lawang. Belum ada biaya untuk tiket masuk ke wisata ini, tetapi ada biaya parkir sebesar Rp 3.000. Masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi yaitu akses jalan menuju Wisata Watu Lawang masih berupa tanah dengan sedikit bebatuan dengan jalanan cukup ekstrim.

Dalam proses pembangunan Desa Wisata Tanjung, hal tersebut tentu tidak lepas dari proses musyawarah desa untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak agar dalam proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan

kebermanfaatan kepada seluruh elemen masyarakat. Dalam proses musyawarah tersebut, tentu pemerintah desa telah menjalankan fungsinya yaitu fungsi pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan memiliki dua makna, yaitu makna secara *empowering* dan *enabling*. Pemberdayaan berdasarkan *empowering* yang memiliki makna secara politis yang dimaksudkan kepada pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapatnya demi tujuan kesejahteraan bersama. Pada konteks keadaan di Desa Tanjung, pemberian hak kepada masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya sudah terfasilitasi melalui pelaksanaan musyawarah desa. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh salah satu warga Desa Tanjung:

”Kegiatan musyawarah desa sering dilakukan, tetapi hal tersebut dari pihak masyarakat diwakili oleh ketua RT pada setiap wilayah desa. Aspirasi yang kami (masyarakat) sampaikan melalui ketua RT biasanya pada pertemuan pengajian maupun kumpulan rutin” (wawancara Pak Slamet, 26 Februari 2023).

Kemudian pemberdayaan apabila kita maknai secara *enabling* yaitu suatu upaya dari pemerintah desa yang dilakukan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan mutu kualitas SDM masyarakat Desa Tanjung. Pemerintah Desa Tanjung yang diwakili oleh BumDes kemudian bekerjasama dengan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Tanjung melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan pengelolaan wisata demi membentuk SDM wisata yang berkualitas.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengurus Bumdes:

”Langkah awal yang kami lakukan yaitu terfokus pada pengembangan SDM wisata terlebih dahulu, karena saya yakin dengan SDM yang berkualitas tentu akan menciptakan pelayanan wisata yang berkualitas juga. Maka yang kami lakukan bersama Pokdarwis yaitu mengikutsertakan para pengelola wisata untuk mengikuti pelatihan pariwisata yang diselenggarakan oleh dinas pariwisata kabupaten maupun provinsi serta mengikutsertakan dalam kegiatan BumDes pariwisata yang pernah diselenggarakan” (wawancara Pak Dian Fatur Rohman, 26 Februari 2023).

Hal tersebut selaras dengan pernyataan kepala Desa Tanjung kala itu:

”Selain dari sisi wisatanya, Desa Tanjung memiliki beragam produk makanan seperti kopi tanjung, kerupuk gadung, kolang-kaling, dan gula aren. Kami juga mengupayakan ingin mewujudkan dengan memberikan penyuluhan maupun pelatihan kepada pelaku

UMKM lokal desa sini maupun masyarakat lainnya untuk dapat mengolah produk desa sini untuk menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai buah tangan/oleh-oleh untuk para wisatawan” (wawancara, Bapak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Tujuan pemberdayaan yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Tanjung. Para pelaku UMKM lokal Desa Tanjung yang biasanya hanya memasarkan produknya melalui pasar-pasar lokal sekitar desa, harapan dari pemerintah Desa Tanjung dengan berdirinya wisata di Desa Tanjung serta peningkatan kualitas produk hal tersebut dapat menjangkau pasaran yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Tanjung.

Berdasarkan data perkembangan jumlah penduduk menurut mata pencaharian tahun 2016 dikutip dari RPJMDes Tanjung 2017-2022, total usia kerja pada tahun 2016 masyarakat Desa Tanjung yaitu 6.918 dengan rincian sebagian besar masyarakat Desa Tanjung bermata pencaharian sebagai tukang kayu/ukir sebesar 2.523 kemudian buruh tani menempati posisi kedua dengan total 2.010 serta petani dengan total 1.629. Bagi masyarakat Desa Tanjung hal terpenting adalah mereka masih bisa bertahan hidup, karena mayoritas masyarakat yang hidup masih bergantung pada kondisi alam.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Hal tersebut langsung mendapatkan respon cepat dari Kepala Desa Tanjung untuk dapat menumbuhkan ekonomi bagi masyarakatnya. Dengan melakukan pembangunan pada sektor pariwisata, harapan terbesar dari Pemerintah Desa Tanjung yaitu dapat membuat keadaan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Hal tersebut seperti pernyataan dari Kepala Desa Tanjung:

”Dari pembangunan wisata yang ada di Desa Tanjung, harapan saya dampak secara ekonomi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada pada daerah lokasi wisata saja. Harapan saya yaitu masyarakat lain yang tidak berada pada lokasi wisata juga dapat terkena dampaknya dalam hal perekonomian, seperti masyarakat yang berjualan bensin, tambal ban, toko kelontong maupun lainnya dengan hadirnya wisata tentu dengan keluar masuknya orang dari daerah luar tentu akan memberi dampak pada masyarakat kami” (wawancara, Bapak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Selain itu hal lain yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanjung yaitu menggandeng para pemilik lahan di sekitar wisata untuk dapat memanfaatkan lahannya baik untuk tempat

parkir maupun berdagang. Pemerintah desa juga mengajak *stakeholder* lain termasuk investor serta pemilik lahan di sekitar wisata untuk dapat menyewakan lahannya ketika pemilik lahan tidak ingin mengelola sehingga hal tersebut tentu akan menumbuhkan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan serta dapat menunjang perekonomian bagi masyarakat Desa Tanjung. Hal tersebut ditegaskan dalam wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung:

”Untuk semua wisata yang ada di Desa Tanjung kita upayakan untuk dikelola sebaik-baiknya agar dapat menciptakan kebermanfaatan bagi semua pihak. Seperti pemilik lahan di sekitar wisata yang dapat memanfaatkan lahannya sendiri untuk berjualan maupun disewakan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan laju ekonomi pada masyarakat sini” (wawancara Bapak Nur Sahid, 4 Maret 2023).

Dalam upaya untuk melakukan pemerataan dalam laju peningkatan ekonomi upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung yaitu memberikan kesempatan kepada semua warga yang berada pada lokasi satu RW dengan lokasi wisata. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga yang bertempat tinggal disekitar Wisata Kali Bening:

”Seluruh warga yang berada di RT 31 dan RT 32 RW 5 Dukuh Ngerbu ini mendapatkan kesempatan untuk berjaga di pos pintu masuk wisata. Setiap keluarga mendapatkan jatah satu orang. Pembagian jatah jaga berdasarkan hari pasaran jawa seperti wage, kliwon, legi, pahing, serta pon. Hal tersebut dilakukan agar semua warga memiliki kesempatan untuk berjaga pada hari-hari rame seperti hari libur, Kalau hari-hari rame biasanya tiap warga mendapatkan Rp.200.000/hari” (wawancara Pak Karnoto, 2 Maret 2023).

Uang hasil dari wisata tersebut kemudian dialokasikan kepada beberapa pihak diantaranya kepada penjaga loket pintu masuk wisata dan jaga parkir sebesar 40%, kemudian 10% masuk ke dalam PADes, serta 50% untuk kas wisata serta pemilik lahan parkir. Kemudian manfaat ekonomi lain dari hadirnya wisata di Desa Tanjung yaitu warung. Di kawasan Desa Wisata Tanjung untuk mengantisipasi pengunjung yang kena tengkik (harga yang tidak sewajarnya) pengelola wisata bersama para pedagang di sekitar wisata melakukan kesepakatan untuk penyalarsan/penyamaan harga makanan antara warung satu dengan warung lainnya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengurus pokdarwis:

”Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pedagang nakal yang ingin mencari keuntungan lebih banyak/tidak sewajarnya. Kami bersepakat dengan pedagang untuk melakukan penyesuaian harga makanan untuk meminimalisir hal tersebut. Hal tersebut dapat kami lakukan dengan memasang banner harga makanan di setiap warung” (wawancara Pak Agus Salim, 26 Februari 2023).

Dengan hadirnya wisata di Tanjung, hal tersebut sangat dirasakan oleh masyarakatnya. Seperti salah satu masyarakat Desa Tanjung yang sekaligus memiliki warung di area Wisata Kali Bening:

”Alhamdulillah sejak hadirnya Wisata Kali Bening ini sangat membantu perekonomian saya. Sebelum ada wisata ini saya bekerja serabutan, kemudian setelah wisata kali bening mulai rame dikunjungi saya dan istri saya memutuskan untuk berdagang dengan menyewa lahan sebesar Rp. 400.000/bulan. Penghasilan saya sehari rata-rata Rp. 300.000-Rp.400.000. Kalau rame pernah mencapai Rp.2.500.000 sehari, paling sepi saya masih mendapatkan kisaran Rp.100.000/harinya” (wawancara bapak Muhsin, 2 Maret 2023).

Pemerintah Desa Tanjung juga berperan sebagai stimulator. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menstimulasi melalui penciptaan serta pengembangan usaha untuk dapat menarik *investor* atau pelaku usaha agar dapat masuk ke dalam Desa Tanjung. Ketika ada *investor* dari luar masuk hal tersebut tentu akan semakin menambah keberagaman destinasi di dalamnya. Karena peran dari *investor* dalam sektor pariwisata sangat dibutuhkan terutama dalam hal permodalan. Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu pengurus BUMDes:

”Di Desa Wisata Tanjung ada beberapa investor yang masuk dari luar desa kami sendiri. Dengan hadirnya investor tentu sangat berperan penting penting dalam permodalan pengembangan wisata di Desa Tanjung” (wawancara Pak Dian Fatur Rohman, 26 Februari 2023).

Hal serupa juga dijelaskan oleh Kepala Desa Tanjung:

”Berdirinya wisata di Desa Tanjung tentu tidak terlepas dari berbagai elemen yang terlibat, salah satunya investor yang berada di Wisata Kali Bening. Hal tersebut bermula ada warga yang memiliki tanah disana kemudian dikembangkan dengan uang pribadi dan kebetulan lokasinya sangat berdekatan dengan lokasi destinasi Wisata Kali Bening

sehingga hal tersebut dapat menambah daya tarik wisatawan” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Setelah melalui berbagai proses yang ada, serta sebagai desa yang telah secara resmi mendeklarasikan diri menjadi desa wisata melalui SK. Bupati Jepara No. 59 Tahun 2018, tentu harapan dari pemerintah desa dengan dijadikannya Desa Tanjung sebagai desa wisata tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tanjung. Dengan hadirnya berbagai wisata yang ada di Desa Tanjung tentu memberikan dampak positif. Selain membuat Desa Tanjung menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas, dengan hadirnya wisata yang ada di Desa Tanjung tentu dapat menghasilkan *income* tambahan. Dari pihak pemerintah desa yang diuntungkan dengan hasil wisata mendapatkan bagian 10% yang masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa (PADes). Kemudian dari masyarakat juga diuntungkan dengan hadirnya wisata yang ada di Desa Tanjung tentu masyarakat juga mendapatkan *income* tambahan seperti dengan berdagang di sekitar wisata, jaga loket wisata bagi warga di sekitar area wisata, serta pemilik lahan yang diuntungkan dengan sewa lahan.

Permasalahan pariwisata Desa Tanjung mulai muncul pada tahun 2020 ketika melonjaknya virus COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan kuantitas wisatawan yang datang sehingga berdampak pada penurunan omzet pariwisata. Dengan permasalahan tersebut, hanya Wisata Kali Bening yang mampu melewati permasalahan tersebut. Wisata Kali Bening walaupun pada melonjaknya virus COVID-19 sempat ditutup, tetapi hingga kini masih ramai dikunjungi oleh masyarakat dari dalam maupun dari luar daerah. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan dari salah masyarakat yang berada di sekitar Wisata Kali Bening:

”Wisata Kali Bening sebelum ada pandemi COVID-19 sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan. Wisatawan yang datang kesini tidak hanya wisatawan dari daerah Jepara saja, tetapi ada yang dari daerah-daerah sekitar seperti Pati, Blora, Demak, Semarang bahkan pernah ada rombongan dari luar pulau yaitu Medan dengan 2 travel. Kemudian ketika terjadi pandemi COVID-19 wisata yang ada di Desa Tanjung sempat ditutup termasuk pada Wisata Kali Bening. Tetapi setelah pandemi berkurang dan masyarakat sudah diperbolehkan untuk berwisata kembali, dari beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Tanjung hanya Wisata Kali Bening yang masih tetap stabil. Wisata lain seperti Bukit

Tanjung, Watu Lawang, serta Jurang Nganten saat ini sedang mengalami penurunan wisatawan yang cukup drastis” (wawancara Pak Karnoto, 2 Maret 2023).

Berdasarkan pernyataan dari salah satu masyarakat Desa Tanjung, hal tersebut dapat kita lihat bahwa dari beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Tanjung yang hingga pada saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan yaitu Wisata Kali Bening. Kondisi Wisata Kali Bening pada tahun 2022 sudah memiliki banyak atraksi wisata dengan melakukan penambahan fasilitas wisata yang dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Atraksi yang terdapat di Wisata Kali Bening diantaranya adalah adanya *gazebo* yang disediakan untuk umum sehingga dapat digunakan sebagai tempat bersantai. Atraksi lainnya yaitu terdapat *café* dengan pemandangan langsung menghadap sungai dan air terjun di Wisata Kali Bening dengan berbagai macam pilihan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau sehingga dapat digunakan sebagai tempat berkumpul dan juga tempat untuk belajar atau bekerja dengan indahnya pemandangan alam. Para wisatawan juga dapat berenang atau bermain air di bawah air terjun yang ada di Wisata Kali Bening yang diawasi dan dipantau juga oleh petugas yang berada di sekitar. Akses jalan menuju Wisata Kali Bening sudah dilalui jalan beraspal sehingga tidak ada kendala untuk transportasi wisatawan yang mengunjungi Wisata Kali Bening.

Melihat kondisi tersebut, kepala Desa Tanjung terpilih periode 2022-2028 beliau akan fokus untuk melakukan pengembangan wisata lain agar di Desa Tanjung wisatanya akan lebih hidup lagi.

”Saya akan fokus pada pengembangan Wisata Air Terjun Jurang Nganten terlebih dahulu, ketika wisata jurang nganten sudah dapat tertata dengan baik serta dapat meningkatkan kuantitas wisatawan, saya baru merencanakan melakukan pengembangan di wisata lain. Saya fokuskan satu persatu terlebih dahulu” (wawancara pak Hariyanto, 28 Februari 2023).

Berdasarkan pernyataan dari kepala Desa Tanjung yang baru satu bulan dilantik, fokus dari pemerintah Desa Tanjung dalam melakukan pengembangan pariwisata selanjutnya yaitu melakukan pengembangan Wisata Air Terjun Jurang Nganten. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan wisatawan yang datang ke Desa Tanjung serta ingin membangkitkan pariwisata di Desa Tanjung setelah sempat menurun akibat pandemi COVID-19.

## **BAB VI**

### **DAMPAK PEMBANGUNAN DESA WISATA TERHADAP KEMANDIRIAN DESA TANJUNG**

#### **A. Harapan Masyarakat Dengan Hadirnya Desa Wisata**

Kooiman (2003) beliau menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah aktor yang mengatur, yang dibatasi, atau tindakan yang terstruktur. Aktor yang dimaksud disini yaitu setiap unit sosial yang memiliki kekuatan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Aktor tersebut dapat berupa individu, asosiasi, pemimpin, perusahaan, badan nasional, maupun internasional. Struktur dapat mengacu pada kerangka kerja sosial sehingga para aktor dapat beroperasi yang memungkinkan untuk membatasi maupun memperluas potensi tindakan mereka. Aktor disini yaitu pemerintah desa yang memiliki tanggung jawab untuk mengoperasikan sistem sosial-politik dengan area tugas publik, swasta, bahkan campuran. Sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, hal tersebut memberikan ruang yang begitu besar kepada pemerintah desa untuk dapat menentukan arah kebijakannya sendiri serta dapat menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan dari prakarsa masyarakat. Pemerintah desa sebagai aktor yang memainkan peran untuk dapat mengoperasikan sistem sosial-politiknya tentu dapat melakukan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh desanya untuk dengan melibatkan masyarakat, swasta, bahkan campuran.

Seperti halnya terjadi pada pemerintah desa Tanjung yang memiliki posisi sebagai peran utama dalam mengatur jalannya pemerintahan di desa Tanjung tentu tidak terlepas dari berbagai harapan dari masyarakat untuk dapat mengatur serta mengayomi masyarakat. Langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah desa Tanjung dalam mengoperasikan sistem sosial-politiknya yaitu dengan melakukan pembangunan pada aspek pemanfaatan potensi alam guna memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan dari kepala desa Tanjung:

”Dalam pembangunan Desa Wisata Tanjung memang tujuan utama saya yaitu dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Tanjung karena hal tersebut memang sudah tugas dan kewajiban saya sebagai pemimpin Desa Tanjung. Walaupun mungkin tidak secara instan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh warga, tetapi kami akan terus mengupayakan untuk melakukan berbagai inovasi agar dampak dari hadirnya desa wisata dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Pernyataan lain ditegaskan kembali oleh kepala desa Tanjung:

”Saya yang telah diberi amanat dari masyarakat Desa Tanjung dari tahun 2016-2022 untuk dapat memimpin Desa Tanjung tentu saya tidak akan mensia-siakan kesempatan dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu dapat memberi kebermanfaatannya serta dampak-dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Harapan dari masyarakat kepada pemerintah desa Tanjung tersebut memang sudah menjadi tupoksi dari seorang aktor yakni kepala desa Tanjung. Seperti halnya dengan pernyataan yang dinyatakan oleh kepala Desa Tanjung di atas bahwa dalam pembangunan Desa Wisata Tanjung yaitu tujuan utamanya yaitu untuk memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena hal tersebut memang sudah menjadi tanggung jawab pemimpin dalam hal kesejahteraan masyarakatnya.

Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut langkah yang ditempuh oleh pemerintah desa Tanjung yaitu dengan melakukan pembangunan pada sektor pariwisata desa.

”Pada awal masa pembentukan Desa Wisata Tanjung melalui Pokdarwis kita memang belajar terlebih dahulu ke berbagai desa yang telah mendapatkan predikat desa wisata meliputi konsep dalam pembangunan maupun pada proses pengelolaan wisata. Kemudian kita terapkan di Desa Tanjung, tetapi tentu tidak sama seperti desa-desa tersebut karena kita melakukan pembangunannya tentu menyesuaikan potensi yang ada di desa kita serta sesuai dengan kearifan lokal kita” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Pembangunan destinasi wisata yang ada di desa Tanjung tentu tidak sama dengan pembangunan destinasi wisata yang dimiliki oleh desa lain. Hal tersebut dilakukan dengan menyesuaikan potensi yang telah dimiliki oleh desa Tanjung.

Dengan melakukan pembangunan pada sektor pariwisata desa, hal tersebut tentu akan mendatangkan pengunjung sehingga hal tersebut akan terjadi perputaran ekonomi di desa Tanjung yang dapat menjadi surplus kepada peningkatan perekonomian masyarakat desa Tanjung. Hal tersebut dipertegas dalam wawancara bersama salah satu pengurus BumDes:

”Harapan masyarakat dengan hadirnya berbagai wisata yang ada di Desa Tanjung yaitu menginginkan wisata yang ada di Desa Tanjung menjadi wisata unggulan yang menjadi tujuan dari wisatawan yang datang dari luar maupun dalam kota sehingga hal

tersebut dapat menunjang perekonomian masyarakat” (wawancara Pak Dian Fatur Rohman, 26 Februari 2023).

Kemudian pernyataan lain disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Tanjung:

”Harapan kami sebagai masyarakat Desa Tanjung dengan hadirnya wisata yang ada di Desa Tanjung yaitu dapat menambah penghasilan bagi masyarakat sini. Selain itu harapan kami tentunya agar dalam pengelolaan wisata yang ada di Desa Tanjung dampaknya juga dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Tanjung yang tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi wisata” (wawancara Pak Slamet, 26 Februari 2023).

Tetapi perihal dampak perekonomian dengan hadirnya desa Tanjung sebagai desa wisata hanya dirasakan oleh beberapa masyarakat yang berada pada di sekitar area wisata. Pada masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi wisata tentu kurang dapat bahkan tidak dapat merasakan dampak secara signifikan dari hadirnya desa Tanjung sebagai desa wisata. Oleh karena itu pemerintah desa Tanjung harus selalu mengupayakan agar dampak dari hadirnya desa Tanjung sebagai desa wisata dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa Tanjung.

## **B. Upaya Mewujudkan Kemandirian Desa**

Berdasarkan Buku Pedoman Desa Wisata II 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dalam pembangunan desa wisata berkelanjutan tentu harus memperhatikan tiga aspek diantaranya yaitu:

### **1. Aspek Ekonomi**

Pada aspek ekonomi ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berada pada wilayah desa harus dapat memberikan kemudahan kepada pengusaha lokal berskala kecil untuk dapat ikut terlibat. Kemudian selain itu pada pembangunan desa wisata juga harus mampu memberikan pada sektor bisnis lain. Dalam wawancara kepada ketua Badan Pemusyawaratan Rakyat (BPD) Desa Tanjung menyatakan:

”Dalam pembangunan Desa Wisata Tanjung tentu kita berawal dari keinginan pemanfaatan potensi yang ada di Desa Tanjung untuk kemudian dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Berawal dari wisata air terjun yang memang sudah ada sejak lama karena wisata tersebut memang alamiah oleh kodrat Allah Swt.

”Kemudian kami melihat potensi lain yaitu kalibening yang bermula hanya kubangan air atau sungai yang mengalir dengan batuan alami. Bermula dari banyaknya pengunjung yang datang hanya untuk ngumpul bersama maupun melakukan bakaran bahkan ketika pada hari raya besar padahal tempat tersebut belum kami kelola sudah menimbulkan kemacetan di sekitar desa karena saking banyaknya pengunjung yang datang, akhirnya kami bersama kepala desa serta masyarakat desa melakukan musyawarah kemudian pada akhirnya kami membentuk kelompok sadar masyarakat (POKDARWIS) dan setelahnya kami kelola bersama-sama agar dapat memberi dampak positif pada perekonomian masyarakat Desa Tanjung” (wawancara Bapak Nur Sahid, 4 Maret 2023).

Kemudian pernyataan diatas ditegaskan kembali oleh kepala Desa Tanjung:

”Upaya kami untuk menunjang pemerataan ekonomi atau agar seluruh elemen masyarakat dapat merasakan dampak dari hadirnya wisata yang ada di Desa Tanjung yaitu dengan melakukan sistem bagi hasil. Rinciannya yaitu seluruh masyarakat tiap KK yang berada di satu RW dengan lokasi wisata kami beri kesempatan untuk menjaga pintu masuk. Kemudian nanti hasilnya yaitu 40% diberikan kepada warga yang jaga, 10% kepada pihak pemerintah desa yang masuk sebagai PADes, kemudian 50% kepada pemilik lahan maupun buat kas wisata. Kemudian masyarakat lain yang tidak berada pada sekitar lokasi wisata dapat memperoleh keuntungan melalui jualan di akses yang dilewati menuju lokasi wisata seperti jualan bensin, tambal ban, jualan souvenir maupun makanan khas dan lain sebagainya” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023). Melalui kedua pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa pembangunan pariwisata di Desa Tanjung bukan serta merta hanya untuk kepentingan pribadi maupun sekelompok orang saja, tetapi dalam pembangunan pariwisata di Desa Tanjung pemerintah desa sangat memperhatikan serta mengupayakan peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Sehingga hal tersebut telah memenuhi salah satu aspek dalam pembangunan desa wisata yang telah dijelaskan oleh Buku Pedoman Desa Wisata II 2021 yaitu pada aspek ekonomi.

### 1. Aspek Lingkungan

Aspek selanjutnya dalam pembangunan desa wisata yaitu memperhatikan dari segi lingkungan. Dalam aspek lingkungan ini dalam buku Buku Pedoman Desa Wisata II 2021 dijelaskan mengenai tiga indikator diantaranya yaitu:

- pemerintah desa mampu mengelola lingkungan dengan memperhatikan aspek keberlanjutannya sehingga tetap lestari dimasa yang akan datang,
- pemerintah desa dapat mengelola dengan cara optimalisasi, bukan eksploitasi,
- dalam pembangunan harus tetap memperhatikan lingkungan yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya.

Dalam pembangunan Desa Wisata Tanjung tentu sangat memperhatikan beberapa indikator di atas karena konsep dari wisata yang ada di Desa Tanjung yaitu berbasis alami dengan pemanfaatan potensi alam. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan dari salah satu pengurus pokdarwis:

”Dalam pembangunan beberapa wisata yang ada di Desa Tanjung tentu kami sangat memperhatikan pada kelestarian lingkungan serta menjaga ke alamiannya. Karena pada wisata yang ada di Desa Tanjung berbasis pemanfaatan alam dengan memberikan pelayanan berupa pemandangan alam, air terjun, serta kolam renang dengan air alami dari gunung” (wawancara Pak Agus Salim, 26 Februari 2023).

Kemudian pernyataan tersebut dipertegas oleh salah satu pengurus BumDes yang bekerjasama dengan pengurus pokdarwis dalam hal pengelolaan wisata:

”Kami sangat mengutamakan kelestarian alam dalam melakukan pembangunan serta pengelolaan wisata di Desa Tanjung. Hal tersebut dibuktikan dengan pada awal pembangunan Wisata Kali Bening kami bersama masyarakat melakukan penanaman pohon disekitar pinggiran sungai dengan harapan dapat menambah keasrian di sekitar lokasi wisata. Kemudian dari pengurus karang taruna bekerja sama dengan pengurus pokdarwis serta BumDes melakukan penebaran benih ikan serta penanaman pohon di sekitar wisata watu lawang. Hal tersebut kami lakukan karena pada wisata di Desa Tanjung utamanya yaitu wisata berbasis pemanfaatan potensi alam sehingga kami terus berupaya dalam menjaga kealamiannya” (wawancara Pak Dian Fatur Rohman, 26 Februari 2023).

Melalui kedua pernyataan tersebut tentu dapat kita lihat bahwa dalam pembangunan Desa Wisata Tanjung telah memenuhi ketiga indikator pada aspek

lingkungan yang telah dijelaskan di atas. Dalam pembangunan wisata yang ada di Desa Tanjung sangat memperhatikan aspek lestari berkelanjutan karena *stakeholder* terkait sangat sadar betul bahwa wisata yang ada di Desa Tanjung memberikan penawaran berupa potensi alam. Sehingga apabila tidak dikelola dengan prinsip lestari tentu akan merusak citra dari wisata yang ada di Desa Tanjung.

#### 1. Aspek Sosial Budaya

Pada Aspek sosial budaya ini meliputi dua indikator yaitu pembangunan harus melibatkan masyarakat lokal serta dapat menciptakan keseimbangan antara wisatawan dengan masyarakat baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Seperti halnya pada pembangunan Desa Wisata Tanjung pemerintah desa tentu tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan harus bekerjasama maupun berkolaborasi dengan *stakeholder* lainnya. Tetapi disini yang paling penting yaitu keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan.

”Suksesnya Desa Tanjung menjadi desa wisata tentu tidak lepas dari peran masyarakat. Saya juga sangat bangga sekali dengan warga masyarakat Desa Tanjung yang bahu-membahu mulai dari perencanaan, proses pembangunan, hingga pengelolaan semuanya melibatkan masyarakat Desa Tanjung. Tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat Desa Tanjung saya tidak mungkin bisa bekerja sendirian untuk menjadikan Desa Tanjung sebagai desa yang memiliki tujuan wisata” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Tentu peran dari masyarakat Desa Tanjung sangat diperlukan sekali. Keistimewaan lain yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tanjung yaitu kegiatan gotong royong yang mungkin pada masyarakat desa zaman sekarang sudah mengacuhkan hal tersebut, tetapi di Desa Tanjung kegiatan tersebut masih sangat melekat disana. Selain peran masyarakat dalam hal pembangunannya, peran yang sangat penting sekali yaitu peran dalam hal persetujuan masyarakat. Ketika masyarakat tidak menerima desanya untuk dijadikan sebagai desa yang memiliki kunjungan wisata tentu pembangunan Desa Wisata Tanjung sangat mustahil untuk dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas maka peran dari masyarakat Desa Tanjung sangat penting dan yang menentukan dalam proses mewujudkan Desa Wisata Tanjung.

Tujuan dari pembangunan desa wisata selain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berfokus pada sektor ekonomi, dengan melakukan pembangunan desa wisata merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah Desa Tanjung dalam mewujudkan desa mandiri. Dalam menunjang seluruh aspek serta indikator untuk mewujudkan suatu desa menjadi desa mandiri, tentu pemerintah desa bersama *stakeholder* terkait melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya, salah satunya yaitu melalui pembangunan desa wisata. Hal tersebut ditegaskan oleh pernyataan dari kepala Desa Tanjung:

”Semisal saya diberikan amanah lagi untuk memimpin Desa Tanjung, setelah fokus pada pembangunan desa wisata, fokus saya yaitu mewujudkan Desa Tanjung sebagai desa mandiri karena beberapa upaya yang telah saya lakukan dengan semua *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan desa wisata tentu merupakan salah satu langkah kami dalam upaya memenuhi persyaratan maupun indikator dari desa mandiri dan saya sedang berupaya mengusahakan itu” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 desa mandiri atau desa semesta merupakan desa maju yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pembangunan desa demi peningkatan kualitas hidup serta kehidupan sebesar-besarnya guna menopang kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, serta ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Tanjung yang saat ini berstatus sebagai desa maju, untuk menjadi sebuah desa mandiri tentu harus melalui satu tingkatan lagi dengan memenuhi ketiga indikator yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, serta ketahanan ekologi. Dalam upaya pemerintah Desa Tanjung dalam mewujudkan desa mandiri melalui pembangunan desa wisata dapat memenuhi beberapa indikator diantaranya yaitu:

#### 1. Ketahanan Sosial

Upaya pemerintah Desa Tanjung dalam mewujudkan desa mandiri melalui desa wisata yang pertama dapat dilihat dari segi ketahanan sosial yang memiliki empat dimensi diantaranya yaitu:

##### a) Modal Sosial

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dalam pemenuhan indikator dalam dimensi modal sosial yaitu dalam pembangunan desa wisata pemerintah Desa

Tanjung sangat mengutamakan partisipasi maupun keterlibatan dari masyarakat Desa Tanjung. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan kepala Desa Tanjung:

”Dari awal pembangunan sampai pada pengelolaan wisata yang ada di Desa Tanjung kami sangat mengutamakan kontribusi dari masyarakat desa sini. Saya cukup mengapresiasi dari kontribusi masyarakat desa sini yang masih kuat nilai-nilai gotong royongnya. Pada awal pembangunan wahana wisata, kami bersama masyarakat juga bahu membahu dalam mewujudkan wisata yang ada baik dari tenaga, pikiran, bahkan materi” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Berdasarkan pernyataan dari kepala Desa Tanjung dapat kita lihat bahwa upayanya dalam melakukan pembangunan Desa Wisata Tanjung dapat lebih menghidupkan kembali solidaritas sosial antar masyarakat Desa Tanjung. Selain itu juga dalam pengelolaann seluruh masyarakat sekitar Desa Tanjung juga mendapatkan bagian untuk menjaga pos pintu masuk. Selain kita lihat dari sisi ekonominya, dapat juga kita lihat dengan adanya pos jaga yang melibatkan masyarakat. Hal tersebut tentu akan membuat solidaritas antar warga menjadi lebih kuat karena mereka memiliki visi yang sama.

”Dengan upaya kami untuk melakukan pengelolaan dengan mengadakan pos jaga yang melibatkan masyarakat tentu hal tersebut semakin membuat solidaritas antar masyarakat lebih kuat. Seperti halnya sebelum ada wisata di Desa Tanjung tentu masyarakat akan berkumpul ketika ada acara tertentu. Tetapi ketika ada wisata atau pada saat ini mereka dapat berkumpul pada saat melakukan penjagaan di pos pintu masuk wisata” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat dengan hadirnya wisata di Desa Tanjung tentu akan semakin menambah waktu masyarakat untuk berkumpul. Hal tersebut tentu akan semakin menambah solidaritas dari masyarakat Desa Tanjung yang dapat menjadi salah satu pemenuhan indikator dalam mewujudkan desa mandiri.

Selain hal tersebut dengan hadirnya wisata yang di Desa Tanjung juga memiliki pengaruh terhadap pengaktifan kembali poskamling desa. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan dari kepala desa:

”Desa Tanjung yang sudah menjadi desa dengan tujuan wisata yang menghadirkan masyarakat dari berbagai daerah tentu kami juga memikirkan perihal keamanan desa. Upaya yang kami lakukan yaitu dengan pengaktifan serta pengadaan poskamling dititik titik tertentu. Walaupun wisatawan hanya berkunjung pada siang hari mungkin paling malam sekitar jam enam maghrib. Tetapi kita harus tetap

waspada perihal keamanan masyarakat karena kita tidak tahu ketika ada orang yang memiliki niat buruk untuk kembali ke Desa Tanjung pada malam hari” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut pemerintah Desa Tanjung juga memikirkan perihal keamanan desa. Pemerintah desa sadar betul bahwa dengan hadirnya Desa Tanjung sebagai desa wisata orang tentu akan lebih bebas keluar masuk desa. Sehingga pemerintah Desa Tanjung mengupayakan keamanan dengan pengaktifan kembali poskamling desa.

”Sejak Desa Tanjung memiliki berbagai destinasi wisata kami mendapat arahan dari bapak kepala desa untuk menghidupkan kembali sitem poskamling yang ada di Desa Tanjung. Hal tersebut kami lakukan dalam rangka upaya dalam memberikan rasa aman terhadap msyarakat sini karena orang dari berbagai daerah bebas keluar masuk desa sini. Kami hanya mewaspadaai agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan” (wawancara Pak Slamet, 26 Februari 2023).

Dengan pengaktifan kembali sistem poskamling hal tersebut dilakukan agar selalu tercipta keamanan bagi masyarakat di Desa Tanjung serta upaya dalam mengurangi dampak negatif dari hadirnya berbagai wisata yang ada di Desa Tanjung.

#### b) Dimensi Kesehatan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dalam pemenuhan indikator dalam dimensi kesehatan yaitu dengan hadirnya desa wisata upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pelatihan penolongan pertama pada tiap-ap pengelola wisata. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan apabila ada pengunjung yang datang kemudian terjadi sesuatu seperti sakit atau kecelakaan pada saat berwisata maka hal tersebut dapat ditangani melalui pengelola wisata yang ada di sekitar wisata. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan dari salah satu pengurus pokdarwis:

”Salah satu progam yang kami lakukan yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan penolongan pertama dengan target sasaran kepada tiap-tiap pengelola wisata yang di Desa Tanjung. Hal tersebut merupakan salah satu upaya kami untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan sehingga hal tersebut dapat ditangani melalui penolongan pertama” (wawancara Pak Agus Salim, 26 Februari 2023).

Hal tersebut sangat penting dilakukan karena pada setiap pengelola wisata harus memiliki ilmu terkait pertolongan pertama. Apabila pada pengelola wisata tidak

memiliki pemahaman terkait hal tersebut maka diperlukan tenaga medis ataupun klinik terdekat dari tiap-tiap wisata untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Di Desa Tanjung sendiri untuk puskesmas pembantu terdekat yang berada kurang lebih 7 km atau dapat ditempuh kurang lebih sekitar 4 menit dari balai Desa Tanjung. Tetapi kalau dari tiap-tiap lokasi wisata jaraknya mungkin lebih dari 7 km maupun kurang hal tersebut dikarenakan wisata yang ada berada pada titik lokasi yang berbeda-beda.

c) Dimensi Pendidikan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dalam pemenuhan indikator dalam dimensi pendidikan melalui pariwisata yang ada di Desa Tanjung yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal tersebut seperti pelatihan kesenian-kesenian dari daerah tanjung yang kemudian akan ditampilkan di lokasi wisata pada saat ada *event* tertentu. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan dari salah satu pengurus BumDes yang kebetulan juga salah satu pelaku kesenian di Desa Tanjung:

”Dengan hadirnya beberapa wisata yang ada di Desa Tanjung kami juga fokus untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Desa Tanjung untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti, pelatihan gamelan, tari-tarian khas Desa Tanjung, rebana, hingga orkestra atau dangdut. Hasil dari pemberdayaan pada sektor non-formal seperti itu nantinya akan kita tampilkan di lokasi wisata ketika ada event tertentu. Seperti kegiatan yang telah berlalu di Desa Tanjung ada event desa mitra yang merupakan program dari KMJS (Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang) yang telah mengadakan event di wisata watu lawang kemudian kami dari pihak masyarakat Desa Tanjung menampilkan berbagai kesenian yang ada di Desa Tanjung” (wawancara Pak Dian Fatur Rohman, 26 Februari 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut tentu dengan hadirnya Desa Tanjung sebagai desa wisata telah memberikan semangat serta gairah baru kepada masyarakat Desa Tanjung untuk terus melestarikan budaya setempat. Bukti dari keseriusan pemerintah Desa Tanjung dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dapat kita lihat di RPJMDes tanjung, pemerintah Desa Tanjung telah memasukkan program pengembangan dan pembinaan sanggar seni yang telah terlaksana pada tahun ke tiga samapai tahun ke lima pada masa pemerintah Bapak Dwi Ganoto dengan anggaran tercantum Rp.5.000.000 rupiah. Selain itu dengan hadirnya Desa Tanjung sebagai desa wisata

juga telah memberi dampak untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait kesenian lokal setempat.

d) Dimensi Permukiman

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dalam pemenuhan indikator dalam dimensi permukiman melalui desa wisata dapat kita lihat melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemenuhan akses informasi dan komunikasi seperti pengadaan jaringan internet. Dengan hadirnya Desa Tanjung sebagai desa wisata, pemerintah Desa Tanjung telah mengupayakan pengadaan menara telekomunikasi untuk memudahkan wisatawan dalam melakukan komunikasi maupun mengakses jejaring sosial. Desa wisata di Desa Tanjung yang merupakan wisata berbasis alam serta letak wisata yang ada berada di penjuru desa, hal tersebut menjadikan di lokasi tersebut kurang dapat menjangkau dalam mengakses internet. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah Desa Tanjung yaitu melakukan *lobbying* dengan salah satu pihak penyedia menara untuk melakukan pembangunan menara di beberapa titik lokasi wisata.

”Dalam menunjang kenyamanan pengunjung wisata kami mengupayakan untuk melakukan pendirian menara telekomunikasi untuk dapat memudahkan wisatawan dalam mengakses jejaring sosial karena kami juga ingin menyesuaikan dengan perkembangan zaman dimana zaman sekarang apa-apa serba digital sehingga ketika ada wisatawan yang ingin berswafoto kemudian ingin langsung mempublish di media sosial langsung dapat dilakukan tanpa terkendala jaringan” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut tentu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dapat menjadi pemenuhan dalam salah satu indikator desa mandiri yaitu pada dimensi permukiman. Dengan didirikannya menara telekomunikasi selain dapat menambah kenyamanan pengunjung, hal tersebut tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tanjung untuk lebih mudah dalam mengakses informasi melalui jaringan internet.

2. Ketahanan Ekonomi

Upaya pemerintah Desa Tanjung dalam mewujudkan desa mandiri melalui desa wisata yang kedua dapat dilihat dari segi ketahanan ekonomi. Dalam pembangunan Desa Wisata Tanjung tentu harapan dari masyarakat yaitu terkait peningkatan ekonomi masyarakat, karena dengan dijadikannya Desa Tanjung sebagai desa wisata tentu terjadi

perputaran ekonomi di dalamnya sehingga hal tersebut dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan hadirnya pemanfaatan pariwisata yang ada di Desa Tanjung selain pendapatan masyarakat melalui penjagaan pos pintu masuk wisata yang telah dijelaskan sebelumnya, pemanfaatan ekonomi dari adanya wisata di Desa Tanjung juga dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tanjung untuk berdagang di sekitar lokasi wisata. Dengan pembangunan pada sektor pariwisata yang telah dilakukan cukup membantu dalam hal perekonomian masyarakat Desa Tanjung. Berikut pernyataan dari salah satu masyarakat Desa Tanjung yang memanfaatkan wisata dengan berdagang:

”Alhamdulillah sejak hadirnya Wisata Kali Bening ini sangat membantu perekonomian saya. Sebelum ada wisata ini saya bekerja serabutan, kemudian setelah wisata kali bening mulai rame dikunjungi saya dan istri saya memutuskan untuk berdagang dengan menyewa lahan sebesar Rp. 400.000/bulan. Penghasilan saya sehari rata-rata Rp. 300.000-Rp.400.000. Kalau rame pernah mencapai Rp.2.500.000 sehari, paling sepi saya masih mendapatkan kisaran Rp.100.000/harinya” (wawancara bapak Muhsin, 2 Maret 2023).

Kemudian dipertegas oleh pernyataan dari salah satu masyarakat Desa Tanjung:

”Dengan hadirnya Wisata Kali Bening hal tersebut sangat membantu perekonomian kami. Sebelum ada Wisata Kali Bening, perekonomian saya hanya bergantung pada hasil pertanian yang saya lakukan karena saya bekerja sebagai petani. Istri saya yang semula hanya Ibu Rumah Tangga kini sejak hadirnya Wisata Kali Bening, istri saya ingin memanfaatkan dengan membuka warung di sekitar wisata. Penghasilan kami sehari dengan berdagang rata-rata Rp.80.000 sampai Rp.100.000. tetapi kalau wisata sedang ramai dapat mencapai Rp.900.000/hari. Sehingga dengan adanya Wisata Kali Bening sangat membantu perekonomian kami” (wawancara Pak Karnoto, 2 Maret 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan pemanfaatan potensi alam menjadi destinasi wisata yang ada di Desa Tanjung, hal tersebut cukup membantu perekonomian masyarakat yang dimanfaatkan dengan berdagang. Selain itu, ketika ada wisatawan yang ingin menginap disediakan homestay dengan pemanfaatan rumah warga karena di Desa Tanjung sendiri belum tersedia hotel maupun homestay. Hal tersebut juga dapat membantu perekonomian masyarakat dengan penyedia rumah sebagai tempat

penginapan. Selain itu dalam menunjang peningkatan perekonomian upaya yang dilakukan oleh Desa Tanjung yaitu melakukan pembangunan maupun perawatan jalan. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan akses wisatawan menuju lokasi destinasi wisata yang ada di Desa Tanjung. Dengan dilakukannya pembangunan serta perawatan jalan hal tersebut merupakan salah satu pemenuhan aspek yang harus dipenuhi dalam pembangunan desa wisata yaitu aksesibilitas. Dengan aksesibilitas yang mudah dilalui maka akan memberikan dampak kenyamanan pada pengunjung. Marwah positif yang selalu terjaga pada Desa Tanjung sehingga hal tersebut akan dapat meningkatkan kapasitas pengunjung ke destinasi wisata yang ada di Desa Tanjung yang akan memberikan dampak positif juga terhadap perekonomian masyarakat Desa Tanjung.

Upaya lain yang ingin dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat yaitu keinginan untuk membangun pertokoan oleh-oleh serta paket wisata.

”Sebenarnya keinginan saya kedepannya yaitu ingin membangun toko yang kemudian dikelola oleh BumDes ataupun pusat oleh-oleh yang di dalamnya berisikan produk-produk khas Desa Tanjung. Selain itu kami juga memiliki keinginan untuk membuat paket wisata yang di dalamnya tersedia paket *tour guide* untuk mengantarkan wisatawan ke pelaku UMKM di Desa Tanjung untuk memberikan edukasi mengenai proses pengolahan kopi tanjung, mulai dari pemetikan sampai menjadi kopi siap saji, pembuatan kerupuk gadung, kolang-kaling, serta gula aren. Selain itu kami juga memiliki keinginan untuk mengadakan wisata edukasi seperti mmberikan pelajaran terkait kesenian yang ada di Desa Tanjung seperti tari-tarian, belajar gamelan dll. Hal tersebut merupakan salah satu upaya kami dalam memperkenalkan kearifan lokal khas Desa Tanjung serta upaya dalam melakukan pemerataan peningkatan ekonomi masyarakat” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Berdasarkan pernyataan dari kepala Desa Tanjung, langkah konkret dalam pembangunan desa wisata yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Harapan dari pemerintah Desa Tanjung dengan hadirnya Desa Tanjung sebagai desa wisata tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Tanjung. Sehingga langkah pemerintah Desa Tanjung sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pada sektor perekonomian dengan melakukan pembangunan Desa Wisata Tanjung, hal

tersebut sejalan dengan upaya yang dilakukan dalam upaya pemenuhan indikator untuk mewujudkan Desa Tanjung sebagai desa mandiri.

### 3. Ketahanan Ekologi

Upaya pemerintah Desa Tanjung dalam mewujudkan desa mandiri melalui desa wisata yang ketiga dapat dilihat dari segi ketahanan ekologi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dalam pemenuhan indikator menuju desa mandiri melalui desa wisata dalam ketahanan ekologi dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Desa Tanjung mendeklarasikan diri sebagai desa wisata melalui pemanfaatan potensi alam sehingga beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Tanjung yaitu berbasis wisata alam serta buatan tetapi konsepnya tetap mengutamakan keasrian alam. Seperti halnya dalam pembangunan destinasi wisata kali bening. Pada awal pembangunan pemerintah desa bersama masyarakat melakukan gotong royong pembersihan sungai agar aliran sungai dapat dilalui alir dengan lancar serta melakukan penanaman pohon disekitar aliran sungai.

”Pada awal pembangunan Wisata Kali Bening karena di Wisata Kali Bening yaitu berfokus pada wisata air, kami bersinergi bersama masyarakat melakukan gotong royong melakukan pembersihan di sekitar aliran sungai sehingga sungai yang bersih tentu akan menciptakan keindahan tersendiri. Selain itu kami juga mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman pohon di area sepanjang aliran sungai di Wisata Kali Bening, hal tersebut kami lakukan dengan harapan agar dapat menambah keasrian pada wisata tersebut” (wawancara Pak Dwi Ganoto, 24 Februari 2023).

Berdasarkan pernyataan dari kepala Desa Tanjung tersebut, dalam pembangunan destinasi wisata yang ada di kalibening juga sangat memperhatikan konsep pelestarian lingkungan. Upaya seperti yang dilakukan dengan penanaman pohon hal tersebut tentu akan mengurangi terjadinya tanah longsor serta tetap mempertahankan kualitas air bersih. Selain upaya tersebut, upaya lain yang dilakukan dalam pembangunan destinasi wisata yang ada di Desa Tanjung yaitu pada pembangunan wisata Watu Lawang.

”Kami sangat mengutamakan kelestarian alam dalam melakukan pembangunan serta pengelolaan wisata di Desa Tanjung. Hal tersebut dibuktikan dengan pada awal pembangunan Wisata Kali Bening kami bersama masyarakat melakukan penanaman pohon disekitar pinggiran sungai dengan harapan dapat menambah keasrian di sekitar lokasi wisata. Kemudian dari pengurus karang taruna bekerja sama dengan pengurus

pokdarwis serta BumDes melakukan penebaran benih ikan serta penanaman pohon di sekitar wisata watu lawang. Hal tersebut kami lakukan karena pada wisata di Desa Tanjung utamanya yaitu wisata berbasis pemanfaatan potensi alam sehingga kami terus berupaya dalam menjaga kealamiannya” (wawancara Pak Dian Fatur Rohman, 26 Februari 2023).

Gambar 5. 1 Penyebaran Benih Ikan Tawar di Sungai



Sumber: *Official Account Facebook Info Seputar Desa Tanjung*

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita lihat bahwa dalam pembangunan destinasi wisata yang ada di Desa Tanjung justru malah semakin menambah keasrian serta kelestarian lingkungan. Dengan membawa konsep wisata buatan berbasis keasrian lingkungan hal tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dalam mewujudkan Desa Tanjung untuk dapat menjadi desa mandiri telah dilakukan melalui salah satunya pembangunan desa wisata. Namun untuk dapat mencapai desa mandiri, pemerintah Desa Tanjung harus tetap melakukan upaya pembangunan di sektor lain karena pada pembangunan desa wisata tentu tidak dapat memenuhi keseluruhan dari indikator desa mandiri.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai politik pembangunan desa wisata menuju terwujudnya kemandirian desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

Dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan ruang yang begitu besar kepada desa untuk dapat mengurus urusan pemerintahannya sendiri, hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah desa Tanjung untuk melakukan pembangunan pada sektor pariwisata dengan pemanfaatan potensi alam. Terdapat beberapa aktor utama dalam pembangunan desa wisata Tanjung yaitu Pemerintah Desa Tanjung, Pokdarwis Desa Tanjung, masyarakat desa Tanjung, serta investor. Keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dinilai tidak proporsional karena dalam forum tersebut posisi masyarakat hanya sebagai pihak yang diundang yang memiliki posisi inferior dibanding pemerintah desa. Untuk mengurus urusan pariwisata yang ada di desa Tanjung, Pemerintah desa Tanjung menyerahkan hal tersebut kepada POKDARWIS desa Tanjung. Diantara beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Tanjung, hanya Wisata Kali Bening yang dari awal dibangun sampai sekarang masih ramai didatangi pengunjung. Hal tersebut dikarenakan salah satunya pada destinasi wisata lain kurang mendapatkan perawatan maupun pengelolaan dengan baik serta kurangnya inovasi dari pokdarwis maupun pengelola wisata yang ada.

Perihal dampak perekonomian dengan hadirnya desa Tanjung sebagai desa wisata hanya dirasakan oleh beberapa masyarakat yang berada pada di sekitar area wisata. Pada masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi wisata tentu kurang dapat bahkan tidak dapat merasakan dampak secara signifikan dari hadirnya desa Tanjung sebagai desa wisata. Oleh karena itu pemerintah desa Tanjung harus selalu mengupayakan agar dampak dari hadirnya desa Tanjung sebagai desa wisata dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa Tanjung.

Keinginan dari pemerintah Desa Tanjung untuk mewujudkan Desa Tanjung sebagai desa mandiri tentu dapat dilakukan melalui pembangunan desa wisata. Untuk mewujudkan desa mandiri dapat terpenuhi beberapa indikator dari desa mandiri baik dari

segi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, serta ketahanan ekologi. Tetapi untuk mewujudkan suatu desa menjadi desa mandiri tidak dapat hanya dilakukan melalui pembangunan pada sektor pariwisata. Dalam mewujudkan Desa Tanjung sebagai desa mandiri harus di topang juga dengan melakukan pembangunan di sektor lain agar dapat memenuhi semua indikator dari desa mandiri seperti melakukan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial lainnya.

### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah Desa Tanjung agar tetap menjaga komunikasi dengan stakeholder yang terlibat dalam pembangunan pariwisata di Desa Tanjung agar pariwisata dapat terus berkembang yang dapat memberi kebermanfaatan bagi semua pihak. Selain itu untuk dapat mewujudkan Desa Tanjung menjadi desa mandiri harus dibarengi dengan upaya lain untuk dapat memenuhi semua indikator dari desa mandiri.
2. Bagi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) agar selalu berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman agar wisata di Desa Tanjung dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Selain itu pokdawis juga dapat melakukan promosi wisata di Desa Tanjung dengan mengadakan event sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung.
3. Bagi masyarakat agar selalu dapat menerima wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Tanjung dengan menjaga keramahan sehingga wisatawan yang datang akan merasa lebih nyaman. Selain itu masyarakat juga diharapkan dapat selalu mendukung program pemerintah Desa Tanjung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam, B. S. (2018). Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui progam Desa Wisata. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 1.
- Anggito, A. d. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak.
- Asri, E. N. (2022). Politik Pembangunan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo*, 25.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Kajian Mata Kuliah Umum ISSN 1412-1271 21 (1)*, 35.
- Fahira, N. S. (2022). Peran Pemerintah Desa Purworejo dalam Pengembangan Wisata Alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(3), 291-303.
- Habibi, M. M. (2022). Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-ISSN 2527-8495 7 (2)*, 429-437.
- Hardani, S. M. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasyim, N. M. (2019). Peningkatan Kemandirian Desa Panggungharjo Melalui Komunikasi Pembangunan. *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Herry Porda Nugroho Putro, d. (2022). Peran Modal Sosial dalam Pengembangan UMKM Kerajinan di Kampung Purun. *Universitas Lambung Mangkurat*, 205.
- Hidayat, E. S. (2020). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CURUG KEMBAR DESA RAKSABAYA. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara E-ISSN 2614-2945, 7(2)*.

- Hidayat, E. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945* 7 (2).
- Ira, W. d. (2020). Partisipasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang). *JPT*, 125.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Institut Pertanian Bogor Vol 2 (1)* , 53-62.
- Kemendes. (2022). *Hasil Rekomendasi IDM*. Retrieved from Indeks Desa Membangun (IDM): <https://idm.kemendes.go.id/rekomendasi>
- Larasati, D. C. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang . *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*.
- Lisnawati, & Soraya lestari. (2019). Analisis Faktor Pembangunan Desa dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 161.
- Marlina, N. (2019). Kemandirian masyarakat desa wisata dalam perspektif community based tourism: Studi kasus Desa Ketengger, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 17.
- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945* 6 (3).
- Nugraha, B. A. (2019). Perbandingan Keberhasilan Implementasi Program Desa Mandiri Pangan Desa Pulosari dan Desa Batusari Kabupaten Pemalang. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang*.
- Nopus, T. T. (2019). ANALISIS PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI KEARIFAN LOKAL GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN

- MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan). *UIN Raden Intan Lampung*.
- Prameswari, G. N. (2021). Pengembangan Desa Wisata Taman Kalianyar Mumbul dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa Kalianyar. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Rachmawati, R. A. (2020). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMDes Sinar Mulya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mulyosari. *Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung*.
- Samsir, A. (2017). *Pembangunan Desa Terintegrasi*. Makassar: Perkumpulan KATALIS.
- Sari, K. d. (2021). Potensi Lokal dan Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): Studi Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan 1 (2)*.
- Sarwono, S. W. (2017). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Suparjan, E. d. (2021). *WAJAH PEMBANGUNAN DESA Refleksi Problem Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Tanjung, P. D. (2022, Januari 28). *Wilayah Desa*. Retrieved from Webiste Resmi Desa Tanjung: <http://tanjung.jepara.go.id/index.php/artikel/2022/1/28/wilayah-desa>
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Tristantono, Y. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*.
- Warjio. (2016). *Politik Pembangunan (Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi)*. Jakarta: Kencana.
- Wirdayanti, A. d. (2021). *Pedoman Desa Wisata*. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

## LAMPIRAN

## Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
 Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 554/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023 24 Februari 2023  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
 Pemerintah Desa Tanjung  
 Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Politik Pembangunan Desa Wisata (Studi kasus pemerintah Desa Tanjung Kec. Pakis Aji Kab. Jepara)**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Rizal Eka Ardiyanto  
 NIM : 1906016049  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Jurusan : Ilmu Politik  
 Tempat/ Tgl lahir : Jepara, 25 Oktober 2000  
 CP/e-mail : 085336398218/rardianto333@gmail.com  
 Nama Ayah/ Ibu : Subiyanto/Listiyorini  
 Pekerjaan : Wirausaha  
 Alamat : Guyangan Rt.02/Rw.01, Bangsri, Jepara

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

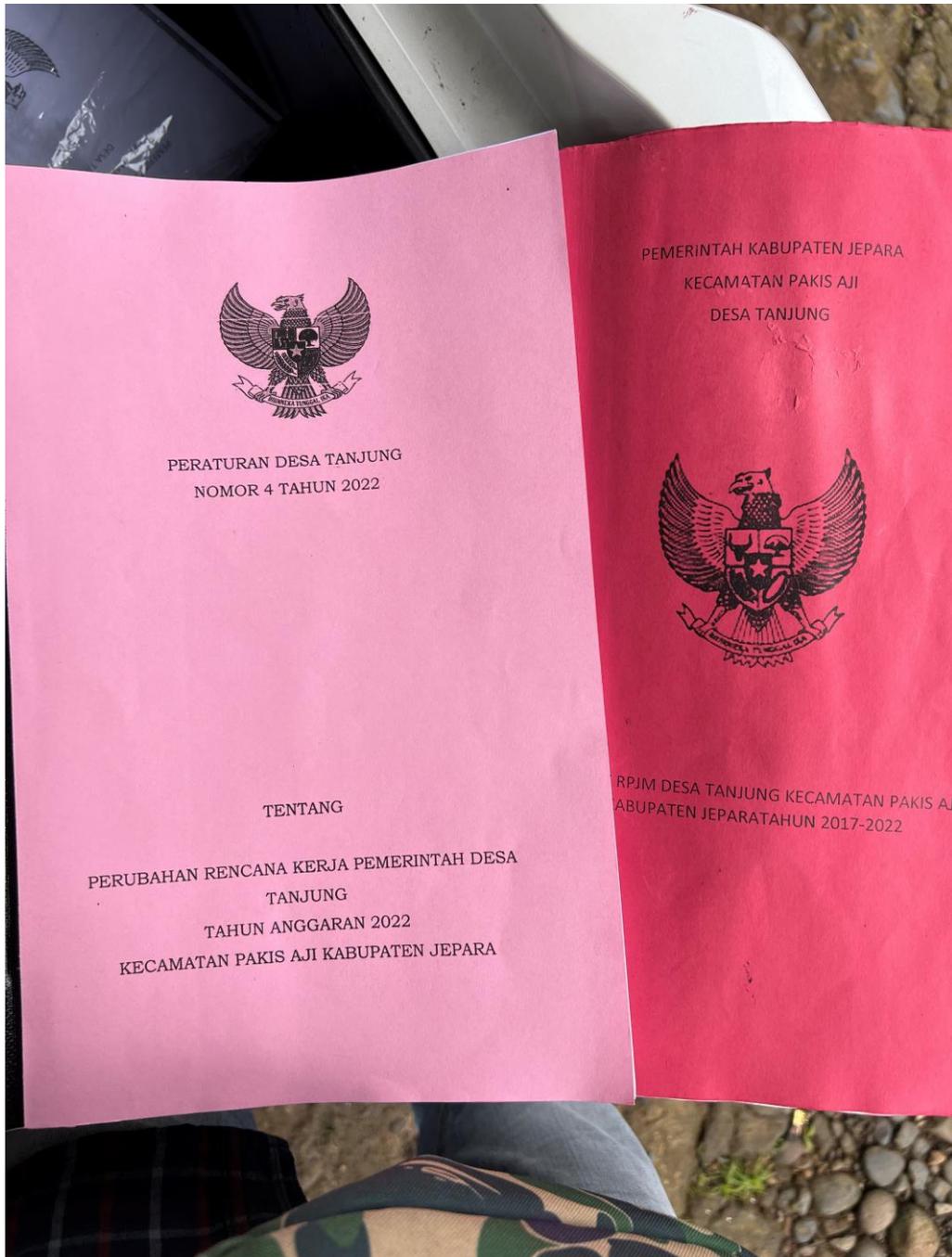


Dekan  
 KaSub.hag Akademik

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :  
 Dekan FISIP UIN Walisongo

**RKPDes dan RPJMDes Tanjung 2017-2022**



**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Dwi Ganoto**



**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Hariyanto**



**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Dian Fatur Rohman**



**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Nur Sahid**



### Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Agus Salim



### Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Karnoto



### Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Muhsin



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Rizal Eka Ardiyanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 25 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Guyangan Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Bangsri, Kabupaten  
Jepara  
Nomor Hp/Wa : 085336398218  
Email : [rardianto333@gmail.com](mailto:rardianto333@gmail.com)

## Riwayat Pendidikan :

1. SD N 01 Krasak, Bangsri
2. SMP N 01 Bangsri
3. MAN 01 Kudus
4. UIN Walisongo Semarang

## Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus HMJ Ilmu Politik Periode 2020
2. Pengurus PMII Rayon FISIP Periode 2020/2021
3. Pengurus DEMA FISIP Periode 2021
4. Pengurus SEMA FISIP 2022